

WE MANIRATU ARUNG DATA

*Srikandi Dalam Perjuangan
Melawan Belanda*

Bahtiar
Muhammad Amir
Rosdiana Hafid

WE MANIRATU ARUNG DATA

Srikandi dalam Perjuangan Melawan Belanda

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

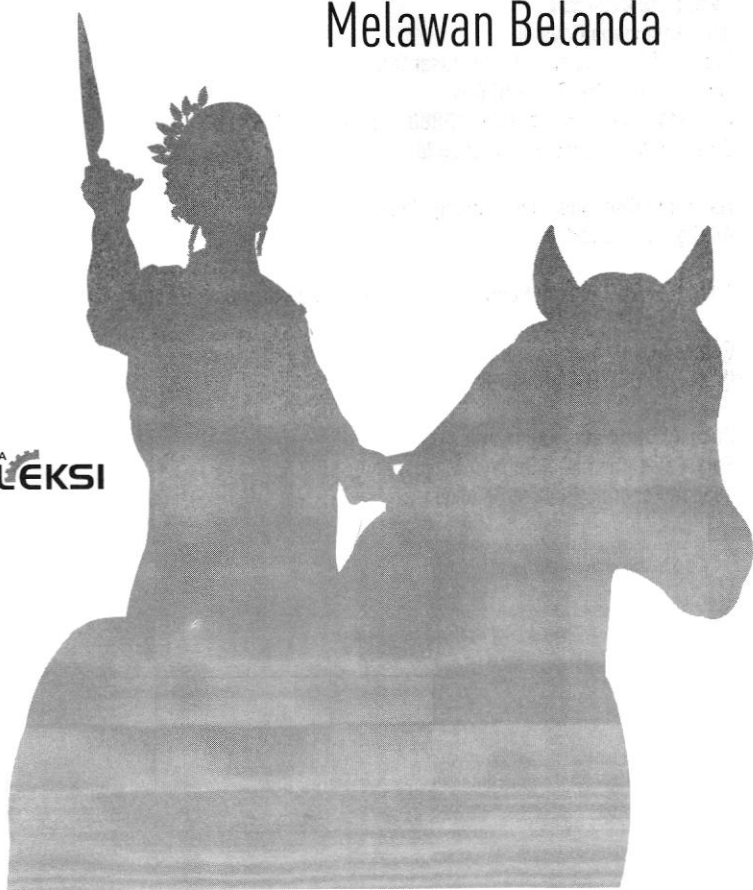
- (1) Barang Siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAHTIAR • MUHAMMAD AMIR • ROSDIANA HAFID

WE MANIRATU ARUNG DATA

Srikandi dalam Perjuangan
Melawan Belanda

PUSTAKA
REFLEKSI



Katalog Dalam Terbitan (KDT)
We Maniratu Arung Data; Srikandi Dalam Perjuangan Melawan Belanda
-Makassar: 2015
xvi+192 hal; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © 2015 pada Penulis

Hak penerbitan pada PUSTAKA REFLEKSI. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penerbit PUSTAKA REFLEKSI.

WE MANIRATU ARUNG DATA; Srikandi dalam Perjuangan Melawan Belanda

Penulis : Bahtiar, Muhammad Amir, Rosdiana Hafid
Editor : Anwar Nasyaruddin
Desain Visual : Narto Anjala

Penerbit:

**PUSTAKA
REFLEKSI**

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116
Email : refleksibooks@yahoo.co.id

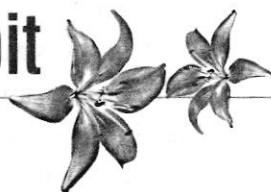
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2015
ISBN : 978-979-3570-80-8

Buku ini Terbit atas kerjasama:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan Penerbit Pustaka Refleksi

Pengantar Penerbit



Untuk yang kesekian kalinya, Penerbit Kelompok Pustaka Refleksi Makassar diberi kepercayaan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar untuk menerbitkan hasil penelitian para peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya ke dalam bentuk buku. Judul buku yang diberi kepercayaan tersebut kali ini adalah **We Maniratu Arung Data, Srikandi Dalam Perjuangan Melawan Belanda**. Buku ini mengisahkan perjalanan perjuangan We Maniratu Arung Data, Raja Bone ke-25 melawan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah wilayah Kerajaan Bone dan sekitarnya, setelah diserahkan oleh Inggris yang sempat menguasai sekitar lima tahun sebelumnya.

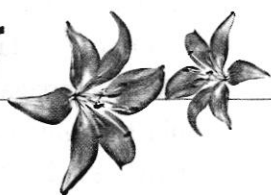
Ketiga penulis yang diberi kepercayaan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk meneliti dan menuliskan ke dalam bentuk naskah buku adalah Bahtiar, Muhammad Amir dan Rosdiana Hafid. Mereka tergabung dalam satu tim untuk mengangkat dan mengapungkan sejarah perjuangan We Maniratu Arung Data dan suasana di wilayah Kerajaan Bone dan sekitarnya. Karena kita semua paham bahwa suasana sosial, ekonomi, politik dan keamanan pada masa itu penuh dengan ketidakpastian dan kegetiran. Tahun-tahun yang penuh dengan pergolakan.

Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk masuk ke lorong waktu, memasuki masa silam, bagaimana Arung Datu bersama rakyatnya melawan Belanda dengan penuh kegigihan. Sebagai seorang srikandi yang tidak ingin rakyatnya dan wilayahnya dijadikan wilayah jajahan, berperang dengan penuh keberanian dan semangat. Episode demi episode digambarkan para penulisnya mengenai pemimpin dan rakyatnya saling membahu melawan penjajah yang sudah menggunakan senjata lebih modern ketimbang rakyat Kerajaan Bone. Tapi itu tidak membuat nyali ratu dan rakyatnya melemah, melainkan semakin bergelora, dengan keyakinan mereka harus menjadi rakyat dan kerajaan merdeka.

Semoga dengan kehadiran buku ini, semakin membuka wawasan kesejarahan dan pengetahuan tentang masa lalu khususnya di Kerajaan Bone mengenai We Maniratu Arung Data. Sejarah masa lalu seiring perjalanan waktu semakin jauh, dan para generasi sekarang dan akan datang mulai terlupakan dengan sejarahnya. Buku ini akan mendekatkan sejarah masa lalu, sekarang dan akan datang, semoga.

Pustaka Refleksi

Pengantar Editor



We Maniratu Arung Data, Srikandi Dalam Perjuangan Melawan Belanda, begitulah judul buku ini. Membaca judulnya saja, dalam benak pembaca sudah diperkenalkan kepada sosok wanita yang mempunyai keberanian melawan penjajah. We Maniratu Arung Data, adalah salah satu dari sedikit raja wanita yang pernah memerintah dan mempunyai keberanian melawan Belanda. Bahkan ia rela tidak menikah sampai akhir hayatnya demi berjuang membebaskan negerinya dari pengaruh penjajah.

Dalam silsilah Kerajaan Bone, dari raja pertama sampai raja terakhir, ada enam raja wanita yang memerintah. Mereka adalah, We Benrigau Makkalempie Mallajange ri Cina (1496-1516), We Tenri Pattuppu Matinroe ri Sidenreng (1602-1611), Batari Toja Daeng Talaga Matinroe ri Tippulue (1714-1715), We Maniratu Arung Data Matinroe ri Kessi (1823-1835), Pancaittana Besse Kajuara Matinroe ri Majennang (1857-1860) dan Fatimah Banri Arung Timurung Matinroe ri Bolampare'na (1871-1895).

Pada penerbitan buku ini, lebih spesifik menguraikan biografi perjuangan We Maniratu Arung Data melawan kekuasaan pemerintahan kolonial, terutama di wilayah Kerajaan Bone dan latar belakang keluarganya. Mengapa ia dipilih dari lima raja

Bone yang wanita lainnya? Dari penjelasan tim penulis dalam halaman Pendahuluan, We Maniratu Arung Data bukan saja karena ia sebagai seorang raja wanita dari Kerajaan Bone. Ia dinilai pula sebagai seorang raja wanita yang berkarakter. Ia pantang menyerah dan tidak rela tunduk terhadap penjajah Belanda. Ia berani membela martabat, kehormatan dan kedaulatan Kerajaan Bone dari keinginan Belanda ingin mengatur dan mengendalikan wilayah kerajaannya. Bahkan ia menuntut kesetaraan antara bangsa Kerajaan Bone dengan bangsa kerajaan Belanda.

Tentu saja permintaan raja Bone ke- 25 ini, ditolak mentah-mentah oleh pihak Belanda. Bagi kolonial, ada sikap merasa lebih tinggi derajat mereka dari ras bangsa Asia. Sebagai bangsa penjajah, ada sikap superior dan menganggap bangsa jajahannya termasuk ras kelas dua. Artinya, bagaimana pun dan apapun alasannya, bangsa penjajah harus lebih tinggi dari bangsa terjajah. Bagi Belanda, kemampuannya menjajah bangsa lain, yaitu bangsa Indonesia sudah menunjukkan bukti bahwa memang mereka lebih tinggi derajatnya.

Sementara di mata We Maniratu Arung Data, setiap ras di dunia ini mempunyai kesamaan dalam derajat, hak dan kewajiban. Olehnya, sikap Belanda yang merasa lebih, sangat ditentang oleh raja Bone itu. Ia selalu mempengaruhi rakyatnya untuk jangan tunduk atau patuh atas permintaan Belanda. Baginya, ras kulit putih dan ras sawo matang sama, mempunyai kedudukan yang setara dalam hukum, hak asasi, dan bernegara, serta masing-masing kerajaan mempunyai kedaulatan yang sama. Olehnya We Maniratu Arung Data, tidak pernah mau mengalah, terus memperlihatkan perlawanan yang tegas.

Bahkan We Maniratu Arung Data juga menuntut, bahwa sesuai perjanjian Bungaya tempo hari, Raja Bone merupakan Koordinator bagi raja lainnya dalam bekerjasama dengan Belanda. Di masa

pemerintahan Arung Palakka, ada kesepakatan antara raja Bone dan Kolonial Belanda, setiap kerajaan palili, kalau ingin ketemu atau meminta bantuan Belanda dalam bentuk apa saja, harus terlebih dahulu berkonsultasi, minimal mendapat persetujuan raja Bone. Namun Belanda menghapus kesepakatan itu dengan membuat pembaharuan perjanjian Bungaya secara sepihak. Inilah yang semakin membuat raja Bone ke-25 ini semakin tidak percaya dengan Belanda.

Dalam paparan para penulisnya dalam buku ini, diawali dengan menggambarkan suasana kerajaan Bone dan wilayah Sulawesi Selatan pada masa itu. Kemudian bagaimana kehidupan dan latar belakang lingkungan istana kerajaan Bone yang turut mempengaruhi karakter We Maniratu Arung Data kelak menjadi raja Bone. Buku ini diakhiri dengan penggambaran suasana perjuangan raja Bone melawan Belanda. Pada penggambaran perlawanan Arung Data, dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama, dilukiskan awal perlawanan terhadap Belanda, selanjutnya puncak perlawanan, dan akhir perlawanan dan diakhiri dengan penggambaran pasca perlawanan.

Episode demi episode perlawanan We Maniratu terhadap Belanda dianalisa dan ditafsirkan para penulisnya dengan pendekatan kesejarahan. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi referensi dalam melihat masa lalu dengan pendekatan masa kini dan akan datang, khususnya di masa perjuangan dan perlawanan We Maniratu Arung Data, raja Bone ke-25 yang tidak pernah menyerah kepada Belanda sampai akhir hayatnya. Ini suatu perjuangan yang abadi demi cita-cita luhur yang patut ditiru oleh generasi muda masa kini dan akan datang.

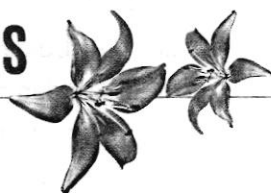
Editor

peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan bertindak terhadap berbagai isu yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses ini. Melalui pendidikan, nilai-nilai yang baik dapat ditanamkan dan diperkuat pada generasi muda. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai anak-anak. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat nilai-nilai yang positif harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua elemen masyarakat.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi bangsa ini juga sangat kompleks. Perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang inovatif dan adaptif untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat membangun bangsa yang lebih maju, adil, dan berkeadilan.

Pengantar Penulis



Buku ini merupakan penyempurnaan dari laporan hasil penelitian tim penulis, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar pada 2012. Secara spesifik buku ini tidak hanya memuat uraian tentang perjuangan We Maniratu Arung Data dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di daerah Bone pada khususnya, tetapi juga tentang latar belakang keluarga dan perlawanan We Maniratu Arung Data terhadap Belanda.

Buku ini tidak akan pernah terwujud seperti apa adanya sekarang, tanpa dorongan, bantuan, dan kebaikan hati dari semua pihak, baik sebagai instansi maupun sebagai pribadi. Untuk itu, pada tempatnyalah kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Dra. Lindyastuti Setiawati, MM. yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta arahan dan bimbingan, mulai dari tahap awal proses penelitian hingga terwujudnya buku ini.

Ucapan terima kasih yang sama kami haturkan sedalam-dalamnya kepada Dr. Edward L. Poelinggomang, MA. dan Dr.

Abd. Latif masing-masing selaku konsultan dan pembahas. Beliau dalam kesibukannya, tetap berupaya meluangkan waktunya untuk memeriksa dan menelaah serta memberikan nasehat dan dorongan kepada kami untuk membenahi dan mewujudkan tulisan ini. Oleh karena tanpa bantuan dan kebaikan hati beliau, pastilah buku ini tidak akan pernah terwujud untuk sampai kepada pembaca sebagaimana adanya sekarang.

Pernyataan terima kasih kami tujuan pula kepada Drs. Syahrir Kila, M. Si. yang dalam kesibukannya sebagai seorang peneliti, beliau masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk membaca dan mengedit buku ini. Banyak saran dan kritikan berharga yang kami peroleh dari beliau. Kebaikan hati dan keramahannya di dalam memberikan petunjuk yang amat berharga, tidak akan pernah kami lupakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kejernihan pikiran dan kesehatan yang baik, sehingga beliau selalu mampu untuk membimbing generasi-generasi terdidik bangsa di masa mendatang.

Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, Kepala Perpustakaan Nasional Jakarta, dan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh stafnya masing-masing yang telah bermurah hati membantu kami selama melakukan penelitian. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf penerbit Pustaka Refleksi Makassar. Sebab, tanpa bantuan mereka semua, kami yakin tidak dapat mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Pada ruang terbatas ini, kami juga seharusnya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

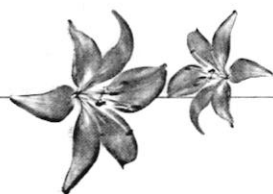
teman-teman peneliti dan seluruh staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, serta kerabat dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tak ternilai. Atas semua kebaikan hati mereka itu, tidak akan pernah kami lupakan dan tentu tidak dapat kami balas hanya dengan ucapan terima kasih. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt, atas segala amal kebbaikannya.

Akhirnya, buku ini kami persembahkan kepada mereka semua sebagai wujud dari penghargaan dan terima kasih kami. Walaupun demikian, semua kesalahan dan kekurangan buku ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kami demi kesempurnaan buku ini.

Makassar, Juni 2015

Tim Penulis

Daftar Isi



PENGANTAR PENERBIT ~ v

PENGANTAR EDITOR ~ vii

PENGANTAR PENULIS ~ xi

DAFTAR ISI ~ xv

PENDAHULUAN ~ 1

BONE SEBAGAI FOKUS PENELITIAN ~ 17

Sejarah Singkat Kerajaan Bone ~ 18

Geografi dan Demografi ~ 29

Kedadaan Sosial Budaya Masyarakat Bone ~ 34

Kehidupan Politik dan Ekonomi ~ 43

LATAR BELAKANG KELUARGA DAN PERLAWANAN

WE MANIRATU ARUNG DATA ~ 49

Lingkungan Keluarga ~ 51

Sekilas Hubungan Bone dengan VOC ~ 63

Kebijakan Inggris Terhadap Bone ~ 69

Pemulihan Kedudukan Kekuasaan Belanda ~ 87

Pembaharuan Kontrak Bungaya ~ 93

**PASANG SURUT PERLAWANAN WE MANIRATU
ARUNG DATA ~ 103**

- Awal Perlawanan ~ 105
- Puncak Perlawanan ~ 115
- Akhir Perlawanan ~ 131
- Pasca Perlawanan ~ 141

KESIMPULAN ~ 157

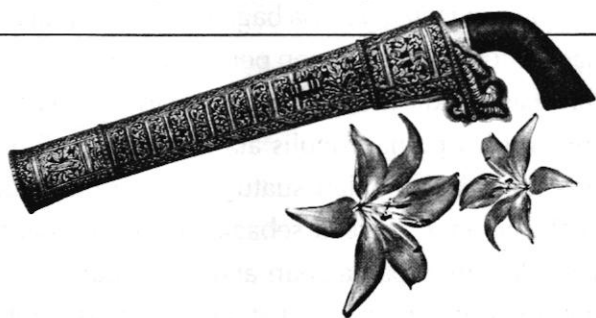
DAFTAR PUSTAKA ~ 165

INDEKS ~ 175

LAMPIRAN ~ 183

TENTANG PENULIS ~ 189

PENDAHULUAN



Penulisan biografi atau riwayat hidup seorang tokoh pejuang atau pemimpin telah berkembang dengan pesat, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun masih banyak di antara para pemimpin atau tokoh-tokoh pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, terutama yang telah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda tidak lagi dikenal oleh masyarakat mengenai jasa-jasanya karena biografi tentang dirinya tidak pernah ditulis atau terungkap di masyarakat. Jelas, konsekuensinya adalah suatu kerugian besar bagi masyarakat. Sebab, peranan mereka sebagai pemimpin bangsa, sebagai pejuang di zaman penjajahan atau di zaman revolusi, sebagai pemimpin politik di masyarakat, atau sebagai pembaharu di zaman kemerdekaan, dan lain-lain, tidak lagi banyak dikenal oleh bangsa kita. Itulah sebabnya Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memperingatkan, bahwa “hanya bangsa yang tahu menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya yang dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar”.¹

¹ Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai jasa seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang bertujuan menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar ataupun telah berjasa baik di bidang politik, ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan, maupun di bidang ilmu pengetahuan

Salah satu tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah We Maniratu Arung Data. Sebab, tokoh pemimpin ini bukan saja sebagai seorang raja dari Kerajaan Bone dan srikandi yang pantang menyerah terhadap pasukan Belanda dalam membela martabat dan kehormatan serta kedaulatan bangsa dan tanah airnya. Tetapi juga seorang pejuang kemerdekaan yang menuntut kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain, terutama Belanda. Selain itu, juga karena tokoh pejuang ini mempunyai peranan penting dalam perlawanan menentang Belanda yang bergiat memulihkan kembali kedudukan kekuasaan kolonialnya di daerah Sulawesi Selatan pada awal abad ke-19. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Inggris menyerahkan wilayah kekuasaannya di Kepulauan Indonesia kepada Belanda pada 1816. Setelah mengambil alih kembali kekuasaan Inggris, pemerintah Hindia Belanda mulai memulihkan kembali kedudukan kekuasaan kolonialnya di daerah ini. Namun usaha mereka itu diperhadapkan oleh sikap sejumlah kerajaan sekutu dan sahabat yang menolak dan menentang kehadirannya, terutama Kerajaan Bone dan sekutunya (Kerajaan Suppa dan Tenete, serta Konfederasi Mandar).²

Meskipun demikian pemerintah Belanda tetap berupaya untuk menguasai kerajaan-kerajaan itu, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan politik *divide et impera* (pecah belah dan kuasai). Hal inilah yang antara lain menjadi penyebab terjadinya tindak perlawanan atau konflik antara Belanda dengan Kerajaan Bone bersama sekutunya. Benih-benih konflik yang telah tumbuh

yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan bangsa, adalah dengan meneliti dan menulis biografinya.

² Sumber Arsip, 1973. Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Djakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), No. 5; Amir, Muhammad. 2011. Konflik Balanipa-Belanda di Mandar 1862-1872. Makassar: Tesis Universitas Hasanuddin.

sejak lama itu,³ kembali bergolak ketika Komisaris Belanda, Peter Theoderus Chasse yang didampingi oleh Letkol Bischeff dan Kapten Laut Dieta tiba di Makassar dan mengundang para penguasa kerajaan untuk menghadiri serah terima kekuasaan dari pihak Inggris pada tanggal 7 Oktober 1816.⁴ Sebab, pada upacara serah terima itu, hanya sebagian penguasa kerajaan yang datang menghadiri undangan Belanda, seperti Gowa, Sidenreng, Soppeng, dan Konfederasi Turatea. Sedangkan Bone, Suppa, Tanete, dan kerajaan-kerajaan di Mandar menolak untuk menghadiri undangan tersebut. Itulah sebabnya Belanda mendesak dan memaksa Bone dan Tanete untuk melepaskan kekuasaan atas daerah-daerah yang diduduki, seperti Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Segeri, Labakkang, Pangkajene, dan Maros. Daerah-daerah tersebut, sesungguhnya merupakan daerah penghasil utama beras di Sulawesi Selatan dan merupakan wilayah kekuasaan langsung Belanda sejak zaman VOC.⁵

Usaha pemerintah Belanda untuk memperluas dan memperkuat kembali kedudukan kekuasaannya di Sulawesi Selatan, belum menunjukkan kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai cara yang ditempuh untuk membujuk kerajaan-kerajaan di

³ Konflik itu tampaknya bukanlah hal yang baru terjadi setelah pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kedudukan kekuasaan Inggris awal abad ke-19. Sebab jauh sebelumnya, yaitu sejak kehadiran dan usaha VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) untuk menguasai perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara abad ke-17, telah terjadi konflik atau tindak perlawanan menentang monopoli perdagangan VOC.

⁴ Sumber Arsip, 1854. *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (TNI)*, Jilid II, hlm. 174. Namun sumber lain menyebutkan bahwa serah terima kekuasaan itu berlangsung pada tanggal 25 September 1816 (Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), hlm 56.

⁵ Namun menjelang akhir kekuasaan VOC hingga zaman kekuasaan Inggris, daerah-daerah tersebut berhasil direbut dan diduduki oleh Kerajaan Bone dan Tanete (Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, hlm. 333; Kadir, Harun, dkk., 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm 51-52.

kawasan ini, agar mereka bersedia menerima Belanda sebagai sahabat dan sekutu, tetapi tetap tidak mengalami kemajuan yang berarti. Sebab Bone dan sekutu-sekutunya tetap memperlihatkan sikap permusuhan dan tidak percaya lagi terhadap maksud “baik” Belanda. Itulah sebabnya Gubernur Makassar dan Daerah Takluknya, Kolonel Jan David van Schelle (1821-1825), yang merangkap sebagai komandan pasukan Belanda di daerah ini, meminta bantuan pasukan dan senjata kepada pemerintah Belanda di Batavia pada Oktober 1821, untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan yang tidak mau mengakui kekuasaan Belanda. Mayor Jenderal de Kock pada dasarnya dapat menyetujui permintaan itu, tetapi tidak dapat memenuhinya dalam waktu singkat, karena pasukan Belanda harus pula dikerahkan untuk menghadapi perlawanan di daerah lainnya di Indonesia.⁶

Kenyataan itu mendorong Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip van der Capellen membentuk sebuah komisi pada Februari 1824, yang anggota-anggotanya terdiri atas Van Schelle (Gubernur Makassar) dan Mr. Johan Hendrik Tobias (utusan pemerintah pusat di Batavia). Tugas komisi itu adalah meneliti dan menyusun laporan mengenai keadaan politik di Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada gubernur jenderal, dan mempersiapkan kunjungan Van der Capellen ke Makassar untuk bertemu dengan raja-raja di Sulawesi Selatan guna membicarakan kontrak baru sebagai pengganti *Cappaya ri Bungaya* (Perjanjian Bungaya) 1667 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sudah berubah. Untuk itu maka diselenggarakan suatu

⁶ Sumber Arsip, 1971. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), *Staatkundig Overzicht van Nederlandsh Indie, 1837* (Laporan Politik Tahun 1837). Djakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sedjarah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), No. 4, hlm. 35-35 dan 121-133; Abduh, Muhammad. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm.48.

pertemuan di Sidenreng pada Mei 1824. Hadir dalam pertemuan itu raja dan para pembesar dari Sidenreng, Wajo, dan Luwu. Komisi diwakili oleh Tobias dan ditemani oleh M. Francis sebagai pencatat. Sementara Bone, Suppa, dan Tanete tidak hadir karena masih berkonflik dengan Belanda.⁷

Berdasarkan hasil pertemuan di Sidenreng, dan laporan hasil penelitian yang dibuat oleh komisi, maka Gubernur Jenderal Van der Capellen berangkat ke Makassar pada Juli 1824. Ia mengundang raja-raja di Sulawesi Selatan untuk diajak berunding mengenai penataan pemerintahan kolonial di kawasan ini. Komisariss Tobias diperintahkan menyampaikan surat undangan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan. Selain mengirimkan surat, Tobias juga melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memulihkan kembali kedudukan kekuasaan Belanda. Namun usaha Tobias itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena sejumlah kerajaan menolak menghadiri pertemuan itu, terutama Bone, Suppa, dan Tanete.⁸

Meskipun demikian perundingan tetap dilaksanakan. Dalam perundingan tersebut, ternyata hanya sebagian diantara raja-raja yang hadir. Adapun raja-raja yang hadir dalam perundingan itu, antara lain adalah raja Gowa, Sidenreng, Sanrobone, Binamu, Bangkala, Laikang, dan Buton. Sedangkan raja-raja yang tidak hadir adalah raja Bone, Tanete, Suppa, Soppeng, Luwu, dan Konfederasi Mandar. Dalam perundingan yang dimulai sejak 4 Juli 1824, tidak berhasil merumuskan keputusan-keputusan seperti yang diharapkan oleh Belanda. Sebab terdapat banyak kendala yang sangat berarti, bukan saja karena keinginan Belanda memaksakan

⁷ Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, loc. cit.; Poelinggomang, 2002, op. cit., hlm.64).

⁸ Sumber Arsip, 1854, op. cit., hlm.178; Mattulada,1998, op. cit., hlm.336; Mappan-gara, Suriadi, 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-1860)*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm 104.

kehendaknya, tetapi juga karena Kerajaan Bone dan sekutu-sekutunya tidak ikhlas menerima kedatangan kembali kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya Van der Capellen memutuskan untuk melancarkan serangan militer terhadap Bone, Suppa, dan Tanete.⁹ Serangan militer inilah yang memicu terjadi konflik berupa perang terbuka antara kerajaan-kerajaan itu dengan Belanda.

Serangan militer Belanda di bawah pimpinan Kolonel H. van de Stuers terhadap Tanete pada pertengahan Juli 1824, berhasil menaklukkan kerajaan itu sehingga La Patau terpaksa melarikan diri dan harus menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya Daeng Tanisanga.¹⁰ Namun serangan Belanda di bawah pimpinan Letkol Buys untuk menaklukkan Suppa pada awal Agustus 1824, ternyata mengalami kegagalan.¹¹ Demikian pula serangan Belanda berikutnya yang dipimpin oleh Kolonel H. van de Stuers pada pertengahan Agustus 1824, juga mengalami hal yang sama, yaitu gagal menaklukkan Suppa.¹² Kegagalan Belanda menaklukkan

⁹ Dalam laporan H. van de Stuers, antara lain disebutkan bahwa tujuan ekspedisi atau serangan militer tersebut adalah untuk menduduki kerajaan-kerajaan itu, memaksanya menyerah, menangkap rajanya, dan menguasai kembali daerah-daerah seperti Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Labbakang, dan Pangkajene (Stuers, H. van de, 1854. *De Expeditie Tegen Tanette en Soepa in 1824*, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie (TNI)*, Volume 59, hlm. 373-389; Leyds, W.J., 1940. *Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar*. Majene: 9 Februari 1940; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm.334; Daeng Patunru, dkk., 1989, *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 236.

¹⁰ Atas kekelahan itu, Daeng Tanisanga terpaksa pula harus menandatangani pembaharuan Kontrak Bungaya dan menerima kedudukan kekuasaan sebagai raja pimjaman. Meskipun demikian, La Patau tetap berjuang dan senantiasa melakukan perlawanan, sehingga pemerintah Belanda berulang kali pula melakukan penyerangan terhadap kedudukan La Patau bersama pasukannya.

¹¹ Sebab, Kerajaan Suppa yang mendapat dukungan dan bantuan dari sekutu-sekutunya, terutama kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng (kecuali Sidenreng) memberikan perlawanan sengit, sehingga pasukan Belanda bukan saja tidak dapat menembus benteng pertahanan Suppa, tetapi juga mengalami banyak korban jiwa.

¹² Kerajaan Suppa baru dapat ditaklukkan setelah pemerintah Belanda melancarkan serangan militer secara besar-besaran di bawah dipimpin Mayor Jenderal Van Geen pada akhir Juli 1825. Atas kekalahan itu, Kerajaan Suppa, Sawitto, Alitta, dan Rappang terpaksa harus menandatangani pembaharuan Kontrak Bungaya pada tanggal 11 Agustus 1825.

Suppa hingga awal September 1824, mendorong laskar Kerajaan Bone yang bertahan di Lamuru dan Camba kembali melancarkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Labakkang, Pangkajene, dan Maros pada September 1824. Demikian pula di wilayah bagian selatan, laskar Bone kembali melakukan penyerangan terhadap kubu pertahanan Belanda di Bulukumba dan Bantaeng pada Oktober 1824. Itulah sebabnya pimpinan pasukan Belanda di Makassar, Kolonel van Schalle mendesak pemerintah Belanda di Batavia, agar secepatnya mengirimkan bantuan pasukan dan persenjataan yang memadai untuk melakukan penyerangan terhadap Bone. Sebab kerajaan itu merupakan salah satu pusat perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan. Bantuan pasukan yang diharapkan itu tiba di Makassar pada November di bawah pimpinan oleh Kolonel Bischoff. Menyusul pasukan ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal van Geen yang tiba di Makassar pada Januari 1825.

Serangan militer Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal van Geen untuk menaklukkan Kerajaan Bone, mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pimpinan Raja Bone We Maniratu Arung Data, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Arung Data harus memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di mata rakyat yang dipimpinnya karena serangan militer yang dilancarkan oleh pasukan Belanda terhadap bangsa dan tanah airnya. Sementara dukungan rakyat terhadap kebijakan raja dan para pemimpinnya itu tidak perlu diragukan lagi. Sebab, “budaya panutan” masih sangat kuat berperan dalam kehidupan masyarakat ketika itu, sebagaimana tercermin dalam ungkapan di masyarakat bahwa *“polo pang polo panni assaleng puakku mua, narekko naposiri’ni puatta, napomateni tu jowana”* (saya merelakan paha dan sayap

atau tangan saya patah, asalkan di dalam membela rajaku atau pemimpinku, kalau rajaku atau pemimpinku sudah merasakan sesuatu yang memalukan, maka rakyat pengikutnya sudah harus bersedia mati).¹³ Dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah, dan dukungan penuh dari rakyat yang dipimpinnya, Raja Bone We Maniratu Arung Data bersama para pembesar kerajaan lainnya, tampil ke medan juang untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, demi untuk membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Gambaran singkat tentang perlawanan Bone di bawah pimpinan Raja Bone We Maniratu Arung Data tersebut, tidak hanya dapat memberikan pemahaman tentang dinamika kesejarahan Kerajaan Bone, tetapi juga merupakan suatu bukti bahwa upaya Belanda dalam memulihkan kembali kedudukan kekuasaannya di daerah ini, senantiasa mendapat perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya Belanda memberikan julukan kepada daerah ini sebagai *de onrust eiland* (pulau keonaran). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan latar belakang dan dinamika perlawanan We Maniratu Arung Data serta perubahan sosial yang menyertainya. Sekaligus menambah referensi atau nuansa lokal dalam sejarah nasional yang hingga kini masih terasa sepi, sehingga tidak utuh menghadirkan proses meng-Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan yang amat berarti dalam membangun jatidiri bangsa serta dapat meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam membangun kekinian dan hari esok yang lebih baik.

¹³ Gonggong, Anhar, 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 87; Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 101; Ali, Muhammad, 1984. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai, hlm. 16.

Perlawanan rakyat Bone di bawah pimpinan Raja Bone We Maniratu Arung Data dalam menentang pendudukan militer Belanda tersebut, kemudian dikenal dengan Perang Bone I 1824-1825. Perang ini bukan hanya merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dilakukan oleh rakyat Bone dalam menentang kekuasaan Belanda, tetapi juga merupakan salah satu mata rantai perjuangan dalam menentang pendudukan militer Belanda di daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, juga merupakan suatu fakta bahwa upaya Belanda dalam memperluas hegemoni kekuasaan di daerah ini, senantiasa mendapat perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan. Namun perlawanan yang dipimpin oleh We Maniratu Arung Data tersebut, masih kurang mendapat perhatian dari para penulis dan belum terungkap secara utuh,¹⁴ sehingga tidak menutup kemungkinan peranan We Maniratu Arung Data dalam peristiwa yang mempunyai makna penting dalam sejarah perjuangan bangsa menentang kekuasaan Belanda, tidak lagi dikenal atau kurang diketahui secara luas di masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini, adalah mengapa We Maniratu Arung Data berani melakukan perlawanan terhadap Belanda

¹⁴ Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sudah ada beberapa karya tulis tentang Raja Bone We Maniratu Arung Data, antara lain: (1) *I Manneng Arung Data, Ratu Bone Yang Menolak Kehadiran Belanda* oleh Suriadi Mappangara, (2) *I Manieng Arung Data, Srikandi Bone Abad XIX* oleh Edward L. Poelinggomang, (3) *Nilai Perjuangan We Maniratu Arung Data, Raja Bone XXV (1823-1835) Melawan Belanda* oleh Asmat Riady Lamallongeng. Namun karya-karya itu masih berupa makalah yang disampaikan pada seminar kearsipan dengan tema "Penggalian Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data, Ratu Bone XXV di Watampone 5 November 2012, sehingga pembahasannya masih terbatas atau belum memberikan gambaran secara kronologis sebagaimana mestinya. Kajian-kajian lainnya mengenai We Maniratu Arung Data, juga masih bersifat spasial, karena hanya merupakan bagian dari berbagai karya tulis, seperti *Kerajaan Bone Abad XIX: Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-1860* oleh Suriadi Mappangara, *Sejarah Perjuangan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan* oleh Muhammad Abduh, dkk., *Sejarah Bone* oleh Abd. Razak Daeng Patunru, *Rumpa'na Bone (Perang Bone) 1905* oleh Andi Muhammad Ali, dan *Bone Selayang Pandang* oleh Andi Muhammad Ali.

pada waktu itu? Pokok persoalan ini dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan, yaitu siapa sesungguhnya We Maniratu Arung Data, bagaimana latar belakang dan dinamika perlawanan serta kesudahan perlawanan We Maniratu Arung Data? Dari rumusan persoalan tersebut, nampaklah dengan jelas bahwa kajian ini tidak hanya berusaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan kapan terjadinya perlawanan We Maniratu Arung Data, tetapi juga berusaha untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu sesungguhnya. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebab musabab serta faktor kondisional yang ada dan berkembang pada waktu itu atau yang mendasari terjadinya perjuangan atau perlawanan itu.

Mengacu pada pokok dan rumusan persoalan penelitian yang diajukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai hal menyangkut dinamika kesejarahan Kerajaan Bone. Terutama menyangkut perlawanan Raja Bone We Maniratu Arung Data dalam menentang kekuasaan Belanda. Selain itu, juga mengungkapkan siapa sesungguhnya We Maniratu Arung Data, menguraikan latar belakang dan dinamika perlawanan We Maniratu Arung Data, serta perubahan sosial pasca perlawanan di Kerajaan Bone. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi, dimana dan kapan itu terjadi, tetapi juga untuk mengungkapkan dan menguraikan bagaimana dan mengapa terjadi tindak perlawanan terhadap Belanda. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor-faktor kondisional yang mendasari terjadinya tindak perlawanan atau konflik antara Bone dengan Belanda.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menghargai dan menghormati jasa-jasanya, tetapi juga bertujuan untuk menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para tokoh pejuang atau pemimpin yang berguna sebagai suri tauladan bagi generasi penerus demi kesinambungan perjuangan bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Patut dikemukakan bahwa penulisan riwayat hidup seorang tokoh pejuang, selain menuturkan secara kronologis kejadian-kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau tidak hanya sekedar mengisahkan riwayat hidupnya, pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Tetapi pada hakekatnya, juga menyangkut sejarah kehidupan masyarakat lingkungannya, komponen-komponen lain di masyarakat, kondisi politik pada waktu itu, peranannya sebagai pemimpin, sistem sosial yang berlaku pada masa itu, dan lain-lain. Dengan demikian, maka penelusuran kembali perjalanan hidup dan kehidupan seorang tokoh pejuang atau pemimpin, bertujuan untuk mengungkapkan tabir atau nilai-nilai yang selama ini seolah-olah menutupi diri mereka yang sebenarnya, bagaimana mereka hidup, mengembangkan diri, berintegrasi dengan masyarakat zamannya, serta memberikan refleksi dan sumbangan kepada dinamika kesejarahan.

Berdasarkan persoalan penelitian dan tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis dan praktis maupun kelembagaan. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan memperkaya khasanah historiografi Indonesia, khususnya sejarah lokal di Indonesia. Sebab, dalam sejarah nasional hingga kini masih kurang proporsional nuansa lokalnya, khususnya di luar Jawa.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, terutama di dalam membangun karakter dan jatidiri bangsa serta dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam menentukan arah kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan budaya Bangsa.

Secara kelembagaan, yaitu tersedianya data dan informasi kesejarahan tentang perjuangan Raja Bone We Maniratu Arung Data dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda pada Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, baik untuk kepentingan masyarakat umum, maupun untuk kajian lebih lanjut. Sebab, realitas dewasa ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Itulah sebabnya para sejarawan sering menampilkan pernyataan, bahwa studi sejarah tidak hanya suatu dialog antara sejarawan dengan masa lalu, tetapi seharusnya dapat memberikan permasalahan bagi kehidupan manusia.

Penggunaan metode dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu keharusan. Di dalam suatu penelitian pada hakekatnya dapat menggunakan berbagai macam cara atau metode.¹⁵ Penggunaan metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan penelitian.¹⁶ Sejarah sebagai bahagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, memiliki metode tersendiri yang disebut metode sejarah (*historical method*) yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah.

¹⁵ Sebenarnya metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, namun dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Sartono Kartodirdjo, bahwa metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode adalah "bagaimana memperoleh pengetahuan" (*how to know*), sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana harus mengetahui" (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah "bagaimana mengetahui sejarah", sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana mengetahui sejarah" (Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, hlm. ix; Sjamsuddin, Helius, 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta; Ombak, hlm. 14.

¹⁶ Sumadi, Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.

Sehubungan dengan uraian itu, penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal,¹⁷ dengan fokus perhatian pada perjuangan We Maniratu Arung Data dalam menentang Belanda di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian sejarah.¹⁸ Pada intinya metode penelitian sejarah ini, meliputi *heuristik* (pencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisa sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis.¹⁹ Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber.

Prosedur penelitian akan mengikuti tahapan-tahapan kegiatan penelitian sejarah dan menyajikan dengan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah, yaitu secara kronologis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, baik berupa dokumen dan sumber-sumber sejarah lainnya yang tersimpan pada lembaga kearsipan, maupun berupa naskah *lontara*, surat kabar, majalah, hasil penelitian, dan sumber tertulis lainnya pada lembaga perpustakaan dan sejumlah instansi pemerintah yang bergiat dalam pendataan sejarah dan kebudayaan

¹⁷ Sejarah lokal dimaksudkan sebagai suatu peristiwa masa lalu dari sekelompok komunitas yang hidup dan berkembang di daerah geografi tertentu. Mengenai batas-batas dan asal mula sejarah lokal serta maknanya bagi penulisan sejarah nasional (Abdullah, Taufik, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 310-323).

¹⁸ Menurut Gilbert J. Garraghan, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya, dan mengajukan sintesa secara tertulis (Gilbert J. Garraghan, 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press, hlm. 33). Louis Gottschalk merumuskan metode penelitian sejarah sebagai suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang disimpulkan dari dokumen menjadi suatu kisah sejarah yang saling berkaitan (Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 18).

¹⁹ Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu, 1978, hlm. 17; Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 18 dan 34.

daerah. Misalnya, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Selain itu, juga dilakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah, lembaga swasta, dan koleksi-koleksi pribadi di Kabupaten Bone. Di samping itu, dilakukan pula penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan. Sebab, pada umumnya rakyat yang menyimpan tradisi lisan, selalu menuangkan kenyataan historis dan landasan kultur kehidupan politik dan sosial mereka dalam bentuk cerita rakyat misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sikap memarjinalkan kenyataan historis yang tidak tertuang dalam naskah (dokumen dan manuskrip).

Dokumen dan keterangan yang dikumpulkan tersebut, sebelum diinterpretasi dan digunakan dalam penyusunan naskah, dikritik terlebih dahulu untuk memastikan otentitas dan validitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan yang bermanfaat dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Langkah selanjutnya, adalah melakukan penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik atau lulus seleksi sebagai suatu fakta. Penafsiran ini dilakukan dengan jalan merangkaikan berbagai fakta dan memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu secara maksimal dan objektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arti dan makna fakta itu dalam rangka penyusunan naskah hasil penelitian.

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena itu, persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan peristiwa itu dan perubahan sosial yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda halnya dengan penulisan yang bersifat deskripsi narasi, yang hanya menampilkan gambaran kisah sejarah dalam urutan waktu (kronologis). Sebab, disadari bahwa penulisan sejarah yang hanya bersifat deskripsi narasi, kurang memberikan kepuasan bagi pemahaman peristiwa dan perubahan sosial yang menyertainya. []

BONE SEBAGAI FOKUS PENELITIAN



SEJARAH SINGKAT KERAJAAN BONE

Pada zaman dahulu Bone dijuluki dengan sebutan *Tanah Bone*, tapi sekarang Bone lebih dikenal dengan sebutan "Bumi Arung Palakka". Kerajaan Bone diperkirakan mulai pertama dibentuk pada tahun 1330 atau awal abad ke IV, di bawah pemerintahan *Tomanurung ri Matajang* yang bergelar *MatasilompoE*. Namun sebelum terbentuknya Kerajaan Bone, dan sebelum datangnya *Tomanurung ri Matajang*, terlebih dahulu telah ada kelompok-kelompok masyarakat kecil yang disebut *anang* yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar *ulu anang* yang disebut *matowa*.²⁰

Khusus yang mengatur kehidupan dalam wilayahnya, *matowa* memiliki seorang pembantu. Pembantu-pembantu tersebut ada yang bergelar *kalula* (petugas *wanua* paling rendah yang membantu *matowa*), dan ada juga yang bergelar *mado* (petugas *wanua* di luar *matowa*, yang membantu *matowa*). Para *matowa* ini di samping

²⁰ Daeng Patunru. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 6. Dimana-mana muncul gerombolan-gerombolan manusia. Tiap-tiap sanak keturunan, bersatu bersama-sama menyelamatkan anggotanya masing-masing. Kelompok asal dari satu keturunan, dalam Bahasa Bugis disebut "*anang*". Satu *anang* yang disukai serta dihormati oleh orang banyak itulah yang diangkat menjadi "*ulu anang*", dan pimpinan dari *uluanang* disebut "*matowa*" atau "*Puang Matowa*".

berfungsi sebagai kepala pemerintahan, mereka juga berfungsi sebagai pimpinan keagamaan.²¹

Setiap *wanua* (daerah) mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan organisatoris dengan *wanua-wanua* lain dan tidak terikat oleh sistem kekuasaan antara satu dengan yang lainnya. Sistem pengangkatan *matowa* dilakukan melalui pemilihan langsung secara demokrasi murni, dan tidak ada pertalian antara kampung yang satu dengan kampung lainnya, yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

Dalam membentuk suatu kelompok atau *wanua*, mereka mengutamakan adanya ikatan serta rasa seketurunan dari satu nenek moyang yang sama (*primus inter pares*). Selain itu, membentuk pula persekutuan teritorial yang tertutup terhadap persekutuan teritorial hidup lainnya dalam sistem kehidupan *patrimonial* (garis keturunan dari pihak ayah). Hal seperti inilah yang memicu terjadinya perseteruan antara *wanua* satu dengan *wanua* lainnya.²²

Selama tujuh *pariama*²³ atau kurang lebih 70 tahun yang disebut sebagai Bone, pada awalnya hanya meliputi tujuh unit kampung (*wanua*), yaitu; *Wanua Ujung*, *Wanua Ta'*, *Wanua Pongeng*, *Wanua Tanete Riattang*, *Wanua Tanete Riawang*, *Wanua Tibojong*, dan *Wanua Macege*. Ketujuh *wanua* tersebut tenggelam dalam situasi konflik yang berkepanjangan, sehingga kondisi ini dalam Bahasa Bugis disebut dengan *sianre bale tauwwe* (yang kuat

²¹ *bid*, hlm. 11.

²² Mattulada, 1998. *op. cit*, hlm, 39; <http://jelajahi-imajinasiku.blogspot.com/2012/12/sejarah-bone-terbentuk-perkembangan-dan.html>. Diakses pada tanggal 26 September 2013.

²³ Ada yang menafsir kalau satu *pariama* sama dengan seRatus tahun, tetapi ada pula yang mengatakan sepuluh tahun. Namun beberapa informasi dari *Lontara'* lebih rasional memakai sepuluh tahun, sehingga hal inilah yg diikuti

memakan yang lemah)²⁴. Mereka sulit membedakan antara lawan dan kawan, begitu pula sudah tidak mempunyai *ade'* (hukum), yang dipakai adalah hukum rimba siapa yang kuat dialah yang menang, sebagaimana disebutkan dalam *lontarak*:

"Sianre baleni tauwwe, siabbelli-belliang, detonna ade', dettona bicara, riasenni pitu-tutturenni ittana de'arung, de'ade' sikotoniro ittana tossissenna siEwa ada to Bone"

Artinya:

"Orang saling memakan laksana ikan besar memakan ikan kecil, saling serang menyerang (bunuh membunuh), tidak ada aturan, tidak ada bicara di antara mereka, selama tujuh generasi lamanya tidak ada raja, tidak ada adat (*ade'*), selama itu pula lamanya tidak saling kenal orang Bone".²⁵

Konflik ini merupakan akibat dari kekosongan kepemimpinan, disebabkan tidak adanya tokoh yang dianggap pantas menjadi pemimpin besar, yang dapat mempersatukan visi dan misi ke tujuh *anang* tersebut. Hal ini dikisahkan dalam *lontarak* secara implisit dijelaskan dalam *Sure La Galigo*, bahwa hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya lagi keturunan-keturunan La Galigo di Bone.

Ketujuh pemimpin (*kalula*) kelompok masyarakat (*anang*) saling mengklaim "hak" atas kepemimpinan wilayah Bone tersebut. Ada juga budayawan yang menyebut kalau *matowa anang* Cina, Barebbo, Awangpone dan Palakka sudah turut dalam perjanjian *Tomanurung* dengan orang Bone, namun karena kurangnya data atau *lontarak* yang mendukung penulis menafikan pernyataan tersebut.²⁶

²⁴ Mereka gampang terpancing untuk saling serang menyerang, sebab luas Bone pada saat itu terbilang sempit, dibanding dengan Kabupaten Bone (Watampone) sekarang.

²⁵ Qahhar, Abdul. 2010. *Arung Palakka Datu Tungke'na Tana Ugi'E*. Mengenal Sejarah Bone dan Pahlawannya. Yayasan Al Mualim, hlm. 10.

²⁶ Anonim. 2013. "Persekutuan Tujuh Anang". Dalam: *Majalah Proviles*, Vol.V/ No.28/April 2013. hlm. 29-30.

Konflik antar *kalula* berlangsung selama bertahun-tahun. Masing-masing mengklaim sebagai keturunan La Galigo, yang karena keterbatasannya tidak mampu menunjukkan bukti-bukti sebab mereka belum mengenal silsilah. Mereka merasa berhak atas kepemimpinan di kalangan *kalula*. Semangat kejahiliyahan membara untuk saling serang, sehingga perang saudara (kelompok) sudah tidak dapat terelakkan lagi.

Berdirinya Kerajaan Bone dimulai dengan kehadiran *Tomanurung*. Di mana *Tomanurung* di Kerajaan Gowa adalah perempuan, sebaliknya *Tomanurung* di Kerajaan Bone adalah laki-laki. Kedatangan *Tomanurung* sebagai penguasa tunggal di Kerajaan Bone, diawali dengan sebuah ikrar antara *Tomanurung* dengan penguasa-penguasa lokal.

Ketika konflik tengah berlangsung, tiba-tiba terjadi sebuah gejala alam yang sangat mengerikan melanda wilayah Bone dan sekitarnya. Gempa bumi yang disertai dengan angin kencang yang hebat, disusul hujan lebat dan petir yang sambar menyambar silih berganti, gemuruh guntur dan halilintar tiada henti-hentinya seolah-olah bumi akan runtuh untuk selamanya.²⁷

Kejadian tersebut berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Setelah keadaan mulai pulih kembali, tiba-tiba di tengah lapangan terlihat sebuah cahaya terang yang menyilaukan mata di tempat yang bernama "*Matajang*". Bersamaan itu pula muncullah seseorang yang mengenakan pakaian serba putih (*pabbaju pute*) sedang duduk di atas batu, tetapi tidak diketahui siapa nama dan darimana asalnya. Tak seorangpun yang mengetahui dari mana asalnya orang misterius tersebut, dimana semua orang yang melihatnya mengira

²⁷ <http://bugislatten.blogspot.com/2011/04/asal-usul-kerajaan-bone.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2013; Anonim, 2013. *op. cit*, hlm. 31. Kejadian seperti ini pernah diceritakan pula dalam Pararaton (Kitab raja-raja) dan Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit.

kalau orang itu pasti datang dari kayangan, sehingga mereka menyebutnya *Tomanurung*²⁸ artinya orang yang turun dari langit.

Berita kemunculan *Tomanurung* tersebut cepat sekali menyebar di kalangan *wanua* di Tanah Bone, kemudian berbondong-bondonglah mereka untuk mendatangi orang yang berpakaian serba putih itu. Setelah sampai ditempat yang bernama *Matajang*, yang tadinya para *matowa-matowa* yang bermusuhan tersebut menghentikan peperangannya, lalu mereka membuat kesepakatan untuk meminta kesediaan *Tomanurung* tinggal dan menjadi raja di Tanah Bone.

"Aja'na tallajang, artinya tidak usah lagi menghilang, engkaulah yang akan kami angkat menjadi raja kami di Wanua (Tanah Bone) ini"

Lalu dijawab oleh orang berpakaian serba putih tersebut: "Saya ini bukanlah *Tomanurung* seperti yang kalian sangkakan kepadaku, saya ini hanyalah hambanya *Tomanurung* itu, tetapi kalau memang benar-benar mau mengangkat *Tomanurung* itu menjadi rajamu, aku bersedia akan mengantarkan ke tempatnya"²⁹

Setelah para *matowa* itu mendengar perkataan dari orang yang awalnya disangka *Tomanurung*, sepakatlah mereka bersama-sama berangkat ke tempat *Tomanurung* yang sebenarnya di daerah *Matajang*. Setibanya di tempat itu, nampaklah oleh mereka

²⁸ <http://bugislaten.blogspot.com/2011/04/asal-usul-kerajaan-Bone.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2013: Anonim, 2013. *op. cit*, hlm. 30. Kepercayaan Bugis-Makassar pra datangnya Islam, menganggap bahwa *Tomanurung* adalah merupakan perwujudan Tuhan. Dalam masyarakat Bugis Bone menyebutnya *Dewata SeuwwaE*. adalah manusia yang turun dari langit, namun bukan sebagai manusia pertama (Adam). Namun seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, sulit rasanya untuk menerima argumen-argumen *to-riolo* (nenek moyang). Sejumlah asumsi yang dibangun oleh ahli sejarahpun tidak cukup memberikan pemahaman yang memadai kepada kita dikarenakan kurangnya bahan kajian. Satu hal penting yang disepakati oleh para budayawan adalah bahwa *ManurungE* merupakan manusia yang mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan masyarakat sekitarnya.

²⁹ Qahhar, Abdul. 2010. *op. cit*, hlm. 20; Daeng Patunru, dkk. 1989. *op.cit*, hlm. 13;

seseorang yang sedang duduk di atas batu datar berpakaian kuning keemasan (*massangiang ridie*), didampingi tiga orang yang sedang duduk didekatnya. Ketiga orang tersebut masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni; orang pertama memegang payung yang berwarna kuning keemasan (*teddung pulaweng*), lalu orang kedua mengipasnya dari bulu kipas yang berkilau. Selanjutnya, orang ketiga memegang *puan* tempat sirihnya (*salenrang*).

Setelah mereka melihat langsung penampilan orang yang mengenakan baju kuning tersebut beserta pengikutnya, akhirnya mereka yakin kalau orang inilah *Tomanurung* yang asli.³⁰ Kemudian rakyat Bone langsung bersujud sembah di hadapan *Tomanurung*, memohon agar beliau bersedia dan mau menjadi raja Bone.³¹

Berlangsunglah dialog antara rakyat Bone yang diwakili *Matowa* Ujung dengan *Tomanurung* yang isinya sebagai berikut:

"Iyana mai kilaowang riko lamarupe' maelokeng tamaseang tammaradde'na mai ri tanata, aja'na tallajang, tudangni mai na idi'na ripopuang, elo'mu elo'rikkeng, passuromu kuwa, na mau' na anammengna pattarommeng, rekkuwa muteai wi kiteai toi, sanrekko tudang menno mai naiko na poatakkeng, mudongiri temmatipakkeng".

Artinya dalam bahasa Indonesia lebih kurang sebagai berikut:

"Kami datang kepadamu, kiranya engkau mengasihani kami, agar menetaplah di daerah Bone dan engkau lah yang kami angkat menjadi raja untuk memimpin kami.

³⁰ Hamid, dkk. 2007. *op.cit*, hlm. 17. Sebagaimana diketahui bahwa *Tomanurung* berasal dari dewa tertinggi, sehingga *Tomanurung* datang bersama peralatannya berupa tombak, keris, salempang, panji dan sebagainya. Kemudian benda-benda tersebut diperlakukan sebagai alat-alat kerajaan (*attribute of the kingdom*) yang memberi khasiat dan wibawa kepada raja, oleh karena benda-benda tersebut secara simbolik adalah pemberian dewa dan mewakilinya. Alat-alat kerajaan (*arajang*) dipelihara dan dirawat oleh (kelompok) *bissu*, ahli mantera dalam berhubungan dengan penguasa alam semesta.

³¹ Daeng Patunru, dkk. 1989. *op.cit*, hlm. 12; Mattulada, 1998. *op. cit*, hlm. 41; Qahhar, Abdul. 2010. *op. cit*, hlm. 21.

Walaupun anak dan isteri kami, apabila engkau tidak menyetujuinya kamipun menurut kepadamu, asalkan engkau menjaga keselamatan kami dan harta benda kami".³²

Setelah mendengar ucapan tersebut, maka dijawablah "*Teddua nawa-nawago, temmabballecco'go?* (tidakkah engkau mendua hati, dan tidakkah engkau ingkar janji)". *Matowa* Ujung mewakili rakyat kembali menjawab "*Teddua nawa-nawakkeng, temmabballicco'kkeng*" (kami tidak mendua hati, kami tidak akan ingkar janji). Setelah selesai dialog tersebut, maka bersedialah *Tomanurung* untuk diangkat menjadi raja atas permintaan rakyat Bone. Hal tersebut diperkuat dengan janji seluruh rakyat Bone yang diucapkan dalam sumpah setia di hadapan calon rajanya yang bunyinya sebagai berikut:

"Angikko ki raukkaju, riaokomiri'riakkeng, mattappalireng. Elo'nu rikkeng, adammu kua, mattampakko kilao, millauko kiabbere. Mollikko kisawe, mauni anammeng, pattarommeng, rekkua muteaiwi; Kiteai toi sa. Iya kia ampirekkeng temmakare'. Dongirikkeng temmatippe, musalipurekkeng I Temmaddinge'kkeng, muampiri temmakare'kkeng.

Artinya

"Engkaulah angin dan kami daun kayu, kemana angin berhembus disitulah kami ikut. Kemauan dan kata-katamu yang jadi dan berlaku atas kami. Apabila engkau meminta kami berikan. Walaupun anak istri kami, jika tuanku tidak senang kamipun tidak menyenangnya. Asalkan engkau menjaga kami agar tentram, engkau berlaku adil dan melindungi, agar kami makmur dan sejahtera. Engkau selamati kami agar tidak kedinginan"

Dijawab oleh *Tomanurung*:

³² Ali, 1986. *op. cit* 2-3; Daeng Patunru, 1989. *op.cit*, hlm. 13

"Ujujungi uparibotto ulu ada-adamu toma'ega, upateri pakka-pakka ulaweng allebbireнна ada-adammu, ri wettu mabbulo sipeppamu, rima'elomu pancajika' arung"

Artinya

"Saya menjunjung tinggi di atas kepalaku, kata-katamu *hai* orang banyak. Saya panjatkan ke atas ranting-ranting emas kemuliaan kata-katamu. Pada saat kamu sekalian bersatu ingin menjadikan saya *arung* (raja).

Dari dialog yang diucapkan antara rakyat Bone dengan *Tomanurung*, maka dibuatlah kesepakatan bersama semacam kontrak sosial, dan di dalam *lontarak* disebut pula dengan "*ade' riassamaturusi*" atau "Ikrar Matajang". Ikrar inilah yang menjadi komitmen politik paling kuat bagi rakyat Bone dengan *Tomanurung* untuk dijadikan sebagai prinsip dasar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di kemudian hari.³³

Adapun prinsip dasar itu adalah *teokrasi*, *monarchi*, dan demokrasi. Pengertian *teokrasi* adalah mengandung prinsip dasar ketuhanan. Lalu pengertian *monarchi* adalah mengandung dasar kekuasaan pemerintahan, dan yang terakhir adalah demokrasi mengandung dasar musyawarah atau mufakat dalam menampung aspirasi rakyat yang diinginkan oleh rakyat. Ketiga prinsip dasar inilah yang diterapkan oleh *MatasilompoE*, ketika mulai memperkenalkan dasar-dasar pemerintahan yang akan dijalankan di Kerajaan Bone. Selanjutnya beliau menyatakan diri sebagai utusan Dewata yang ditugaskan untuk memimpin manusia dalam mengatasi kekacauan yang menimpa negeri ini.³⁴

³³ *Lontarak* sebagai sumber sejarah menyampaikan kepada kita, bahwa semua *Tomanurung* di Sulawesi Selatan menempuh pola yang sama, yakni mengadakan kontrak sosial dengan rakyat dan atas persepakatan rakyat ia diangkat menjadi raja. Hamid, dkk. 2007. *op. cit*, hlm. 17.

³⁴ Qahhar, Abdul. 2010. *Arung Palakka Datu Tungke'na Tana ugi'E. Sipakainge-Sipakatau-Sipakalebbi-Sipakatau*. Mengenal Sejarah Bone dan Pahlawannya, hlm, 23.

Dilantiklah *Tomanurung* menjadi raja (*mangkau*) di Bone, kemudian dipindahkan ke Bone untuk dibuatkan *salassa* (rumah). Oleh karena tempat dimana dibuatkan istana sebagai ibukota, disebut *kawerrang*.³⁵ Pada waktu pelantikan berlangsung, yang hadir adalah hampir seluruh penduduk *wanua* Tana Bone dalam suatu lapangan terbuka. Mereka semua ingin menyaksikan pelantikan *Tomanurung ri Matajang* sebagai raja Bone. Tetapi saat akan dilantik, tak seorangpun yang tahu nama yang sebenarnya, akhirnya sepakatlah mereka memberi gelar *MatasilompoE*. Gelar ini diberikan kepada raja Bone *Tomanurung ri Matajang*, berkat kemampuan dan kelebihan yang beliau miliki yaitu dapat mengetahui dengan tepat jumlah orang banyak yang berada di dalam dataran (*lompo*).³⁶

Baginda *Tomanurung ri Matajang* memperistrikan *Tomanurung ri Toro*. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah enam orang anak, yaitu; La Ummase, I Patanrawanua, I Bolonglela, I Tenri Ronrong, We Arattiga, yang terakhir We Tenrisolongeng.³⁷ Setelah resmi diangkat menjadi raja (*mangkau*), yang mula-mula dilakukan oleh *Tomanurung ri Matajang*, adalah:

1. Menetapkan hak-hak kepemilikan orang banyak (*mappolo leteng*= titian patah), dalam hal ganti mengganti antara kedua pihak tentang kepemilikan suatu barang, yang diakui oleh lebih dari satu orang kemudian ditetapkan menjadi milik

³⁵ Yaitu padi yang baru diketam di sawah lalu dihimpun dan diikat tangkai-tangkainya sehingga merupakan ikatan, seperti itulah yang dimaksud *kawerrang*.

³⁶ Daeng Patunru. 1989. *op.cit*, hlm. 18

³⁷ Rahim. 2011. *Nilai-Nilai Budaya Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 49. Diantara ke enam anaknya, La Ummase yang menjadi raja Bone ke II (1353-1424). Kalau adik perempuannya yang bernama I Patanrawanua diperistri oleh La Patikkeng, arung di Palakka. Sebenarnya antara La Ummase dengan La Patikkeng saling bermusuhan. Mereka pernah berperang selama kurang lebih tiga bulan lamanya. Antara mereka tidak ada yang mau kalah, sehingga berakhir dengan gencatan senjata. Padahal waktu itu, I Patanrawanua sedang hamil tua.

orang yang memegang barang itu dan tidak dibicarakan lagi. Selanjutnya maksud kedua adalah jika seorang ahli waris, lebih dulu meninggal dari orang tuanya, maka ahli waris tersebut tidak berhak memperoleh warisan dari kedua orang tuanya.

2. Bentuk keputusan atau penggarisan yang harus ditaati disebut *mappolo bicara*. Maksudnya ialah keputusan yang sama harus disamakan dengan yang lain, demikian pula dengan sebuah kasus serupa harus diserupakan pula. Oleh Sebab hal ini sudah merupakan undang-undang peradilan.
3. Membentuk tatanan hidup yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang disebut *ade'*. Sebab dengan mematuhi *ade'* dimaksudkan untuk menerapkan ketaatan pada hukum yang berlaku, demi menjaga ketertiban sosial.³⁸

Selain menetapkan tiga kebijakan serta aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, Baginda menetapkan pula selemba panji sebagai lambang "*arung mangkau'* (raja Bone) untuk seluruh wilayah kekuasaannya yang diberi nama *Worongporonge* (berdasar warna biru, dengan kerumunan bintang-bintang berwarna keputih-putihan), kemudian ditetapkan sebagai bendera Kerajaan Bone.³⁹

Dalam melaksanakan pemerintahannya, Raja Bone *Matasi-lompoE* dibantu oleh ketujuh *matowa anang* (Ujung, Ta', Pongeng, Tanete Riattang, Tanete Riawang, Tibojong, dan Macege), dan seiring dengan perkembangannya ketujuh *matowa anang* tersebut berubah nama menjadi *matowa pitu*. Terciptanya kerjasama antara raja dengan *matowa pitu*, yaitu dibuatlah dasar-dasar aturan yang saling mengikat satu sama lain. Begitu pula posisi para *matowa* ini ditempatkan dalam penataan kekuasaan sebagai berikut:

³⁸ Kila, 2012. *Keteguhan Dalam Menegakkan Siri'* (Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, hlm. 19.

³⁹ Mattulada. 1998. *op. cit*, hlm. 45.

1. Posisi ketujuh *matowa anang* ditempatkan dalam satu majelis, dan yang bertindak sebagai ketuanya adalah *Arumpone*.
2. Persekutuan dari ketujuh *matoa* tersebut berbentuk konfederasi yang disebut *kawerang*
3. *Kawerang* ini kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang didalamnya terdapat ketujuh *matowa* tersebut dan bertindak sebagai dewan pemerintahan.
4. Para *matowa* tetap memegang pemerintahannya di dalam *wanuanya* masing-masing, tetapi tetap mengikuti aturan dari pimpinan *Kawerang*
5. *Matowa wanua* dapat menerima penggabungan negeri-negeri baru yang ingin bersedia bergabung dengan *kawerang*.⁴⁰

Selama empat pariyama lamanya, atau kurang lebih 32 tahun (1326-1358) memegang tampuk pemerintahan, beliau telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Bone dengan baik. Pada suatu hari dikumpulkanlah seluruh rakyatnya, lalu bertitahlah beliau kepada mereka; "*duduklah kalian, semoga tidak berkekurangan sesuatu apapun. Adalah anak kami La Ummase To-Lawa kami serahi tanggung jawab untuk meneruskan ikrar kita orang Bone*".

Setelah selesai mengucapkan titahnya, tiba-tiba meledaklah petir dan kilat sambung menyambung. Pada saat itulah Baginda beserta permaisurinya raib dari tempat duduknya. Begitu pula peralatan yang pernah menyertainya disaat kemunculannya yang pertama (payung emasnya, kipas yang berkilauan dan puan tempat sirih) raib pula bersamanya, dan tak seorangpun yang tahu dimana letaknya.

⁴⁰ Kila, 2012. *op.cit*, hlm. 20-21.

Geografi dan Demografi

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang posisinya sangat strategis, dan berada pada pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan. Secara geografis daerah ini terletak di pantai barat Teluk Bone, dan memiliki garis pantai cukup panjang, yang membujur dari arah utara ke selatan menelusuri Teluk Bone. Letaknya diperkirakan kurang lebih 174 kilometer dari arah timur kota Makassar. Memiliki luas sekitar 4.559 kilometer bujursangkar atau 7,3 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya yang terdiri dari persawahan 88.449 ha, tegalan atau ladang 120.524 ha, tambak atau empang 11.148 ha, perkebunan negara atau swasta 43.052,97 ha, hutan 145.073 ha, padang rumput dan lainnya seluas 10.503,48 ha. Secara administratif Kabupaten Bone mempunyai 27 kecamatan, 39 kelurahan, 333 desa.⁴¹

Afdeling Bone, termasuk di dalamnya Lamuru masuk ke dalam pemerintahan *Gubernemen Celebes*, dan daerah bawahannya. Secara astronomis terletak dalam posisi 4°13'-5°06' Lintang Selatan dan antara 119°40'-120° 26' Bujur Timur yang berada di tepi barat Teluk Bone. Daerah ini mempunyai batas-batas wilayah yaitu; di sebelah utara berbatasan dengan *Onderafdeling* Wajo dan Soppeng yang dipisahkan oleh Sungai WalanaE. Di sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan *Onderafdeling* Sinjai. Di sebelah baratnya dengan *Onderafdeling* Maros, yaitu Gattarang Natinggi (yang menjorok masuk ke dalam wilayah Gowa dahulu). Selanjutnya berbatasan dengan *Onderafdeling* Pangkajene dibagian Barat

⁴¹ <http://sejarahbone.blogspot.com/2012/02/gambaran-umum-kabupaten-bone.html>. Diakses pada tanggal 14 November 2013.

Daya, dan dibagian Selatan dengan *Onderafdeling* Barru (khusus *Landschap Swatantra* Tanete dan Soppeng).⁴²

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone, terdiri dari tanah datar, daerah perbukitan, rawa-rawa, serta daerah pegunungan. Kondisi tanahnya dapat dikatakan termasuk tanah yang subur, utamanya daerah-daerah yang berada di sekitar pegunungan. Kecuali daerah-daerah yang berada di bagian pesisir seperti Barebbo, Tanete Riattang, Mare, Tonra, dan Salomekko yang memiliki tanah yang datar serta berawa-rawa.⁴³

Wilayah pegunungan yang ada di Bone hampir tidak mempunyai gunung yang tinggi. Gunung-gunung yang ada di Bone, hanya berupa dua rangkaian pegunungan, yang memanjang dari arah selatan ke utara, serta ukurannya terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat di pegunungan paling barat yaitu antara Lamuru dan Tanete, yang celah-celahnya terdapat aliran sungai. Di dataran paling barat yaitu Lappa Riaja mempunyai lereng-lereng gunung yang curam, aliran air dari gunung tersebut mengalir ke hulu *Salo Walanae*. Di sebelah timur terdapat Pegunungan Ponre, yang mempunyai lereng-lereng yang rata, begitu pula halnya dengan lereng-lereng gunung yang terdapat di sebelah utara Ulaweng.⁴⁴

Adapun gunung yang berada di bagian barat Bone, yang memiliki ukuran tertinggi dengan mencapai ketinggian 1660 meter adalah *Bulu TarettaE*. Selanjutnya di sebelah timurnya terdapat

⁴² Arsip Bone, 1912. *Memorie Betreffende De Onderafdeeling Bone Met Bijlagen (Opgemaakt Ingevalge Schrijven Van Het Departemen Van Oorlog VII Afdeeling DD. 12 Agustus 1912 No. 765)*. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 138-139; Hafid, dkk. 2012. *Monumen Perjuangan dan Peninggalan Sejarah di Sulawesi Selatan*, hlm. 13-14.

⁴³ Mappangara, 1996. *op. cit.* hlm. 25-26. Sifat-sifat tanah di daerah ini, kurang subur untuk dijadikan sebagai persawahan. Disebabkan kondisi tanahnya sudah bercampur dengan batu yang berjenis *aluvial hidromorf glei* yang nilai humusnya rendah (*complex mediterranean* coklat kekuningan).

⁴⁴ Arsip Bone, 1912. *op. cit.* hlm. 139.

Bulu Ponre, tingginya sekitar 720 meter, *Bulu Bantaeng* 777 meter, dan *Bulu Tadalle* 700 meter. Terdapat pula beberapa pegunungan di bagian timur dan utara, yang sudah berubah menjadi daerah perbukitan seperti; *Bulu Pationgi* dan *Bulu Cinnong* masing-masing 234 meter. *Bulu Damara*, *Bulu Cina*, *Bulu Maroangin*, dan *Bulu Anadara*, masing masing 372 meter. *Bulu Sinri*, *Bulu Salokoe*, *Bulu Lanca* tingginya hanya mencapai 137 meter. *Bulu Mampu* dan *Bulu Lalatang*, *Bulu Sailong* dan terakhir *Bulu Sanrangan* tidak diketahui ukurannya.⁴⁵

Perbukitan serta pegunungan yang terdapat di wilayah ini, dapat dikatakan kurang subur. Disebabkan pembukaan ladang, dan pembakaran hutan yang terus menerus sehingga hutan menjadi gundul. Dampak dari penggundulan ini menyebabkan bukit-bukit serta gunung-gunung menjadi gersang, oleh karena terjadinya pengikisan humus tanah, dan benih-benih tanaman yang akan tumbuh menjadi mati. Kecuali di daerah sepanjang Sungai Walanae yang memiliki dataran yang subur, sehingga dinamakan daerah *Pabiring*. Begitu pula sekitar Cenrana sampai ke Pompanua di bagian sebelah barat, terdapat dataran yang sangat subur yang disebut *La Bataru*.

Terdapat pula dataran di daerah Bone, yaitu wilayah pesisir tepi pantai yang dangkal, dengan beberapa tingkat kemiringan, disertai gugusan batu karang serta endapan lumpur. Kondisi tersebut, mengakibatkan perahu-perahu yang berukuran besar tidak dapat berlabuh di pantai ini. Begitu pula wilayah pesisir tepi pantai teluk Bajoe, dan puncak Karang Campalagi. Daerah tersebut telah berubah menjadi sawah yang kebetulan berdampingan dengan laut. Sedangkan pesisir Ujung Pattiro, dan Ujung Palette telah menjadi sebuah pulau. Sementara sebelah timur dari daerah

⁴⁵ Arsip Bone, 1912. *op. cit*, hlm. 140-141.

pesisir tersebut, ditemukan hutan bakau serta air lumpur yang dangkal. Kalau terjadi air pasang, baik di Pelabuhan Bajoe maupun Sungai Walanae, dapat menjadi tempat berlabuh bagi perahu-perahu *palari*⁴⁶, terkecuali kapal-kapal *padewakkang* dari Mandar, sekalipun untuk seluruh wilayah pantai di Bone, perahu tersebut tidak dapat berlabuh.

Selanjutnya terdapat beberapa sungai di wilayah Bone Selatan maupun Bone Utara, seperti; Sungai Kaju, Sungai Pattiro, Sungai Barebo, Sungai Palakka, Sungai Jaling, Sungai Padaelo, dan Sungai WalanaE serta Sungai Cenrana. Dari semua sungai tersebut, hanya Sungai Walanae dan Sungai Cenrana yang mempunyai peranan yang penting. Oleh sebab, Sungai WalanaE merupakan sungai terbesar di Sulawesi Selatan yang airnya berasal dari Bolangi (puncak gunung Bantaeng), yang mengalir ke bagian dataran Lappariaja, yaitu BokongE, kemudian masuk ke wilayah *Onderafdeling* Bone Utara, terus ke *Onderafdeling* Soppeng, Wajo, serta Pompanua, dan bermuara di TawaroE.

Pada zaman dahulu sepanjang tahun, Sungai Walanae dilayari oleh perahu-perahu besar (*palari*), berlayar sampai ke TawaroE. Sedangkan perahu-perahu kecil (*pajala*), hanya dapat berlayar hingga ke Pompanua, sampai ke hulu dekat Kampiri (Wajo). Sungai Walanae yang terletak di Lappa Riaja, mempunyai lebar sekitar 75–100 meter. Pada saat permukaan air sungai surut, orang dapat menyeberang di sungai ini dengan berjalan kaki. Tetapi jika musim penghujan tiba air sungai menjadi naik, sehingga harus menggunakan perahu, yang kapasitasnya tidak boleh melebihi dari pada daya tampung perahu.

⁴⁶ Arsip Bone, 1912. *ibid*, hlm. 144. Tempat berlabuhnya perahu *Palari*, yaitu Kaju, Pattiro Benteng, La Ewa, Caleppang (BajoE), Panyula, Waetuwo, Lompo, Kajuara, Lamuru, De CappiE (anak sungai WalanaE), Cakkawaroe dan La Botto.

Daerah Bone termasuk daerah yang beriklim tropis, dengan kelembaban udara bertemperatur antara 26°C sampai dengan 43°C. Mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan Maret sampai dengan bulan Juni hujannya tidak merata, tetapi curah hujannya sangat lebat. Selanjutnya pada bulan Juli sampai November curah hujannya sudah berkurang. Keadaan ini menjadi patokan, baik bagi para petani untuk bercocok tanam maupun bagi para nelayan untuk turun melaut.⁴⁷

Sebagai daerah yang termasuk ke dalam daerah tiga dimensi yaitu; pantai, daratan dan pegunungan. Daerah pertaniannya meliputi 455.600 ha, sehingga Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga beras untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang disebut dengan *Bosowa Sipilu* singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, 9 di antaranya adalah masuk daerah pantai seperti Kecamatan Cenrana, Tellu SiantingE, Awangpone, Tanette Riattang Timur, SibuluE, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara. Dengan demikian, menjadikan sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Bone yang terbesar adalah petani dan nelayan.

Jumlah penduduk Kerajaan Bone pada tahun 1920 dan 1930 tidak banyak diketahui dengan pasti. Data yang ditemukan pada tahun 1920, menunjukkan jumlah penduduk hanya sebanyak 45.153 orang. Yang dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 29.968 jiwa, sedang jenis kelamin perempuan sebanyak 15.185 jiwa. Kemudian pada tahun 1930 jumlah penduduk Afdeling Bone yang meliputi Bone, Soppeng dan Wajo hanya sebanyak 346.000 jiwa, dengan jumlah rincian

⁴⁷ Mappangara. 1996. *op. cit*, hlm. 28-29.

berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 169.000 jiwa, sedang perempuan sebanyak 177.000 jiwa.⁴⁸

Sedangkan data yang dicatat berdasarkan kelompok suku, yaitu dari jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 1920 dan 1930, ialah dari etnis Bugis terdiri dari 345.262 orang Bugis, orang eropa 84 orang, orang cina 313 orang, dan suku lainnya sebanyak 482 orang. Sehingga dapat disimpulkan kalau kepadatan penduduknya kurang lebih 160 orang perkilometer bujur sangkar, sedang Bone Selatan sebanyak kurang lebih 40 orang perkilometer bujur sangkar.⁴⁹

KEADAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BONE

Sistem Kekerabatan

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan kehidupan suatu masyarakat diperlukan adanya berbagai pranata sosial yang dipergunakan untuk mengatur mereka. Sistem kekerabatan dan stratifikasi sosial yang merupakan dua bentuk pranata sosial yang digunakan di dalam mengatur kehidupan, ternyata memiliki kedudukan yang cukup penting. Keduanya dapat memberikan pelbagai hal yang menyangkut latarbelakang pandangan hidup, watak, nilai-nilai dan sistem kehidupan sosial yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang demikian itu, didapatkan juga di dalam masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Dengan demikian kedua pranata sosial itu tidak dapat diabaikan di dalam usaha untuk memperoleh gambaran yang menyangkut kehidupan suatu masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mappangara. 1996. *op. cit*, hlm. 29-30.

⁵⁰ Gonggong. 1992. *op. cit*, hlm. 65.

Begitu pentingnya kedua pranata sosial itu, sehingga kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat manapun, tidak bisa dilepaskan kaitan dengan hal itu. Begitu juga dalam kehidupan sosial orang Bugis sebagai suatu persekutuan hidup dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam mengembangkan dirinya pada yang lainnya yang tersebar di seluruh Nusantara, mempergunakan beberapa istilah kekerabatan yang sering digunakan. Pada umumnya istilah kekerabatan yang sering digunakan dalam masyarakat Bugis, adalah *passiajingeng* yang berasal dari kata *siajing* yang artinya “kerabat” atau “keluarga” yang diberi kata *asse* yang berarti “erat”. Jadi *assiajing* adalah suatu bentuk ikatan kekerabatan yang erat. Bahkan *assiajingeng* ini dapat dibedakan atas dua bagian yaitu berdasarkan hubungan perkawinan atau *siteppang* dan hubungan berdasarkan keturunan *siwija siteppang* yang meliputi suami (*lakkai*), isteri (*baine*), mertua (*matua*), ipar (*ipa*). Begitu pula saudara sepupu, baik dari bapak maupun ibu mereka saling mengenal satu sama lainnya.⁵¹

Sebagaimana halnya dengan orang-orang Bugis seperti tersebut di atas, istilah kekerabatan orang Bone bersifat sistem kekerabatan bilateral. Sistem ini mengikuti atau memperhitungkan garis keturunan ibu maupun garis keturunan ayah. Dengan demikian, sistem kekerabatan orang Bugis Bone sangatlah luas sebab di samping menjadi keluarga pihak ibunya, ia pun menjadi keluarga pihak ayahnya.

Istilah-istilah kekebaratan bagi orang Bugis hampir sama dengan yang lainnya, kecuali sedikit perbedaan sebab dialek bahasa yang dipergunakan, dan di antara sebutan itu kadang terdapat dua sebutan istilah dengan satu pengertian. Ini terjadi pada dua tingkatan sosial yang berbeda. Contoh sebutan untuk

⁵¹ Hamid, dkk. 2002. *Sejarah Daerah Sinjai*. Laporan Penelitian, hlm.39.

ayah dan ibu, bagi golongan bangsawan sebutan untuk ayah dan ibu adalah *petta* dan *etta* atau sebutan *puang*. Sedangkan bagi masyarakat kebanyakan atau bukan bangsawan digunakan istilah *ambo* atau *ambe*, dan *indo* atau *emma*. Kakek atau nenek biasa digunakan sebutan *lato* dan *nene*, adik dan kakak adalah *anri* atau *andi* dan *daeng*.

Istilah-istilah kekerabatan orang Bone yang lebih luas adalah *asseajingeng* (famili), *siwija* (sekeluarga), dan biasa pula kita dengar istilah *tennia tau laing* (bukan orang lain). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan orang Bugis Bone sangat luas. Hubungan kekerabatan tersebut, biasanya terjadi, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Sejumlah orang mempunyai hubungan *asseajing*, *siwija*, atau *tania tau laing*, bukan saja karena memiliki nenek yang sama, tetapi juga sebab terjadinya perkawinan antara keluarga mereka.

Terjadinya perkawinan antar keluarga mereka, mengakibatkan kedua belah pihak saling mengenal, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Unsur kekerabatan yang terjadi setelah perkawinan ini, yang dikenal adalah *sillessureng* (saudara) yang dapat dibagi dua yaitu adik dan kakak dari kedua belah pihak, baik perempuan mau pun laki-laki. Saudara laki-laki ayah dan ibu disebut *amure* (om atau paman), sedang saudara perempuan dari ayah dan ibu disebut *indoure* (tante). Sedang anak dari saudara atau sepupu disebut *anaure* (kemanakan). Anak dari perkawinan antara saudara dari kedua pihak disebut sepupu satu kali (*sapposiseng*). Anak dari perkawinan antara sesama sepupu satu kali disebut sepupu dua kali (*sappokadua*), dan seterusnya hingga sepupu tiga kali (*sappokatellu*), serta ipar (*ipa*) dan mertua (*matua*).

Satu rumah tangga biasanya terdiri atas ayah dan ibu, serta anak-anak yang dilahirkan kemudian atau biasa disebut keluarga

inti dan mereka sekeluarga biasanya disebut *siakkalabinengeng* atau *sianak maranang*. Keluarga inti ini biasa ditambah dengan satu atau dua orang anggota keluarga lainnya, biasa dari pihak suami dan pihak istri. Kadang mertua atau ipar, bahkan juga menantu. Penanggungjawab dalam rumah pada umumnya adalah suami (ayah) dan bertindak sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, sedang isteri atau ibu bertanggungjawab atas kesejahteraan dan pendidikan anak-anaknya di rumah. Dengan demikian, tidak ada perbedaan secara prinsip atas kedudukan antara ayah dan ibu, yang berbeda hanyalah peranan yang harus dilaksanakan. Dalam sistem pewarisan menurut adat, termasuk pewarisan atas tahta kerajaan, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di Kerajaan Bone terdapat sejumlah wanita yang pernah menjabat sebagai ratu (raja), nanti setelah agama Islam masuk dan berkembang, maka hak pewarisan (terutama harta benda) dibagi berdasarkan hukum waris agama Islam.

Berkaitan dengan nama-nama wanita yang pernah menjadi ratu (raja) di Kerajaan Bone yang mempunyai prinsip tegas dan kuat yang tidak kalah dengan laki-laki adalah; We Banrigau Makkalempie Daeng Marowa Ratu Bone ke-4 (1470-1510); We Tenri Tuppu Matinroe ri Sidenreng Ratu Bone ke-10 (1602-1611); Batari Toja Sultan Sainab Sakiyatudding (1714-1715) Ratu Bone ke-17 dan 21 (1714-1715 dan 1724-1749); We Maniratu Arung Data Matinroe ri Kessi Ratu Bone ke-25 (1823-1835); dan Pancaitana Besse Kajuara Ratu Bone ke-28 (1857-1860), inilah yang akan menjadi fokus dalam kajian ini.

We Maniratu Arung Data menjadi ratu (raja) Bone ke-25 menggantikan saudaranya yang bernama La Mappasessu Toappatunru Matinroe ri Laleng Bata. Pada tahun 1824, namanya sudah

dimaklumkan dalam khutbah Jumat yaitu We Maniratu Sultanah Saleha Rabiyyatuddin. Pada masa berkuasanya Belanda di Sulawesi Selatan, We Maniratu Arung Data tidak mau bekerjasama dengan Belanda meskipun beliau berulang kali diajak. Belanda mengajak Ratu Bone ini untuk memperbaharui Perjanjian Bungaya 1669 sebagaimana yang pernah diperjanjikan antara Petta Torisompae dengan Belanda bahwa kedua-duanya bersaudara dalam peperangan.⁵² Ajakan Belanda untuk kerjasama ditolak dengan keras oleh Ratu Bone ini sehingga Belanda akhirnya memaklumkan perang dengan Bone, perang ini kemudian dikenal dengan nama *Rumpa'na Bone Mammulangnge* (Perang Bone yang pertama 1824-1825).

Stratifikasi Sosial Masyarakat

Gaya hidup dan kehidupan orang Bone dewasa ini adalah merupakan suatu lukisan dari pola pikir yang terlihat dalam tingkah laku secara teratur. Konsep pola kelakuan orang Bugis Bone di dalam kehidupan bermasyarakat, adalah perwujudan yang tercermin dalam aspek sistem budaya mereka. Tumbuh dan berkembang dari ide dan konsep kelakuan sebagai satu kesatuan gejala dalam sistem budaya masyarakat. Dan salah satu aspek sistem budaya yang menjelmakan hubungan sosial adalah sistem sosial pembuluan⁵³ yang membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Hal itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan lapisan sosial.

Pelapisan sosial masyarakat pada umumnya dijadikan sebagai pengabsahan atas kedudukan seseorang di dalam masyarakat, atau dengan kata lain bahwa lapisan sosial dipakai sebagai alat untuk

⁵² Lontarak Akkarungeng Bone, hlm.154-155.

⁵³ Rahman, 1988. *Puang dan Daeng: Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Disertasi, Universitas Hasanuddin, hlm.119.

membandingkan diri seseorang dengan yang lainnya yang ada di sekitarnya. Atau lapisan sosial dipandang bermakna penting dalam kehidupan masyarakat pada zamannya sebab dapat membedakan status derajat atau kadar darah seseorang. Pandangan seperti ini ada di dalam alam pikiran orang Bugis secara umum dan masyarakat Bone secara khusus. Masyarakat menganggap bahwa konsep darah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Di dalam kehidupan masyarakat Bugis di daerah Bone, lapisan sosial masyarakat hingga kini masih bisa dikenali tingkatannya maupun peranannya, bahkan sebagian dari masyarakat pendukung tingkatan sosial ini masih memegang teguh keberadaan dan statusnya. Hal itu terutama dapat dilihat ketika diadakan suatu pesta atau perayaan secara resmi maupun tidak resmi, maka kedudukan orang dalam acara itu disesuaikan dengan tingkatan dan kedudukannya atau jabatannya.

Konsep darah bagi masyarakat dapat tercipta melalui suatu perkawinan antar lapisan sosial yang akan melahirkan jenjang baru. Melalui ikatan itu akan tercipta berbagai pertautan baru yang menciptakan berbagai pranata. Perhitungan kadar darah atau lapisan sosial, tetap dianggap mempunyai berbagai arti penting dan dapat berperan di dalam masyarakat. Lapisan sosial ini, di dalam kehidupan masyarakat Bugis Bone masih tetap dipertahankan, terutama pada lapisan tertinggi (bangsawan). Lapisan ini kembali eksis pada era otoda dimana kelompok bangsawan⁵⁴ seakan-

⁵⁴ Sejak masa kerajaan di Bone, kelompok bangsawan selalu menguasai bidang-bidang pemerintahan (raja) dan sampai sekarang pun kelompok ini masih menjadi penguasa pada level-level tertinggi di Kabupaten Bone. Dan bahkan pada masa otoda ini pun, kelompok bangsawan masih menguasai pemerintahan sehingga kelompok non bangsawan masih sangat sulit untuk mengungguli kelompok bangsawan untuk menduduki jabatan tertinggi di daerah ini. Kenyataan itu dapat ditelusuri bahwa yang selalu menjadi penguasa tertinggi (bupati) di daerah ini adalah mayoritas kelompok bangsawan. Oleh sebab itulah sehingga ada kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa sangat sulit untuk menjadi penguasa (bupati) di daerah ini kalau bukan berasal dari keturunan *Tomanurung*.

akan menemukan kembali jalan hidupnya, yaitu sebagai lapisan penguasa seperti pada masa kerajaan dulu.

Secara detail, masalah stratifikasi sosial masyarakat di Sulawesi Selatan telah digambarkan oleh Friedericy bahwa secara umum tingkatan sosial itu hanya ada dua yaitu kelompok bangsawan dan kelompok orang kebanyakan (orang merdeka atau *tomaradeka*). Sedangkan kelompok budak atau *ata* atau hamba sahaya hanya merupakan lapisan sekunder atau lapisan tambahan yang terjadi sebab kalah perang, melanggar aturan adat dan menjual diri. Dalam sistem sosial masyarakat Sulawesi Selatan, lapisan masyarakat itu menunjukkan status yang erat kaitannya dengan kepemilikan tanah (lahan). *Arung* atau bangsawan keturunan *Tomanurung* ditempatkan pada status mulia, dihormati dan ditaati dalam batas-batas tertentu (bersyarat). Meskipun ia dihormati dan dimuliakan, tetapi kepadanya tidak diberikan hak untuk memiliki tanah (lahan), sebab bagaimana pun juga ia tetap sebagai pendatang (*Tomanurung*) yang berada di luar lingkungan kelompok Persekutuan Kaum *Anang* sebagai pemilik sah tanah atau lahan.⁵⁵

Pembagian kasta atau tingkatan sosial seperti yang disebutkan oleh Friedericy, dalam masyarakat Sulawesi Selatan (khusus Bugis dan Makassar) adalah merupakan faktor penting yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan relegius dari masyarakat Bugis dan Makassar. Beliau menyatakan bahwa memelihara dan mempertahankan stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah satu syarat untuk menjadikan sebuah kerajaan atau daerah untuk lebih maju dan menjadi besar. Selain itu, bahwa kemakmuran sebuah kerajaan atau negeri adalah tergantung dari adanya empat perkara, yaitu; *ade* (kebiasaan dari para pendahulu),

⁵⁵ Mattulada, 1998. *op. cit.* hlm. 27-28.

rapang (undang-undang atau peraturan), *bicara* (peradilan), *wari* (adanya kasta-kasta dalam masyarakat).⁵⁶

Strata ini mulai muncul pada masa *Tomanurung*, maka dapat dipastikan bahwa strata sosial atau pelapisan sosial masyarakat di Bone, juga mulai dikenal ketika *Tomanurung* MatasilompoE muncul di Matajang. Sebenarnya stratifikasi sosial seperti yang telah diungkapkan oleh Friedericy, hampir sama dengan yang terdapat di Bone. Stratifikasi sosial masyarakat Bone yang telah ditulis dalam berbagai kajian hampir sama,⁵⁷ yaitu: 1) *Anakarung* atau anak raja-raja (golongan bangsawan) dan inilah yang biasa disebut sebagai keturunan langsung dari *Tomanurung*. Golongan ini dibedakan atas *anak pattola* (inilah yang berhak atas tahta kerajaan), *anak arung ri bolang* yaitu anak bangsawan yang tingkatannya berada di bawah *arung matase* (anak pattola), *anak sipue* yaitu anak bangsawan yang berdarah campuran sebab ibunya berasal dari lapisan *tomaradeka* dan *anak cera'* adalah golongan bangsawan yang sudah bercampur dengan lapisan budak (ibunya). 2) *Tomaradeka*; golongan ini adalah golongan orang merdeka atau orang bebas. Golongan ini dibedakan atas dua, yaitu; *todeceng* (orang baik-baik) dan *tosama* (orang kebanyakan). 3) *Ata* atau budak atau hamba sahaya. Golongan ini dibedakan juga atas dua, yaitu; *ata mana* dan *ata mabuang*. *Ata mana* yaitu hamba atau budak yang diwariskan secara turun temurun atau biasa disebut *ata puppu*. Sedangkan *ata mabuang* adalah *ata* atau hamba sahaya atau budak sebab melakukan kesalahan besar yang melanggar adat sehingga

⁵⁶ Daeng Patunru. 1969. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm.139.

⁵⁷ Emanuel, L.A. 1948. *Memorie van Overgave (MVO), Asistent Resident van Bone*. Periode 25 Oktober 1945-20 April 1948. Ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (2006), hlm. 173. Dalam memori tersebut ada disebutkan tentang strata sosial masyarakat Bone secara garis besar adalah; bangsawan yang dibedakan atas dua yaitu bangsawan kerajaan dan bangsawan negeri; golongan agama; golongan menengah atau *todeceng*; dan rakyat.

kebebasannya dicabut. Termasuk dalam kategori *ata mabuung* adalah karena perang yaitu kalah dalam suatu perang (*ata rielli*).

Meskipun *ata* atau budak muncul kemudian, namun pada perkembangan berikutnya, kelompok ini sangat berperan dalam kehidupan kemasyarakatan terutama dari kelompok bangsawan dan orang kaya. Hampir semua pekerjaan yang berat dibebankan kepada golongan ini sehingga dapat dikatakan golongan ini tidak pernah mempunyai waktu untuk melakukan pengembangan diri demi masa depannya. Sebab semua yang dikerjakan adalah untuk kepentingan tuannya tanpa memikirkan dirinya dan keluarganya. Kehidupan mereka pada umumnya sangat memprihatinkan, terkecuali yang mendapat kepercayaan dari tuannya.

Kondisi itulah yang menyebabkan sehingga banyak pihak, terutama yang anti perbudakan untuk melakukan upaya pembebasan. Di wilayah pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, muncul anti perbudakan yang berupaya untuk menghapuskan kelompok itu. Akhirnya Undang-Undang anti perbudakan di seluruh Hindia Belanda dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1859. Dengan Undang-Undang ini, maka secara resmi perbudakan dihapuskan di seluruh Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1860. Namun pelaksanaannya bervariasi sesuai dengan kondisi setempat, tidak selalu berjalan lancar. Bagi kota-kota tertentu, kemungkinan penghapusan lebih mudah dilaksanakan karena kontrol yang lebih baik dan kesadaran penduduk yang lebih besar.⁵⁸

Sebenarnya penghapusan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda seperti tersebut di atas, telah dilakukan oleh pihak Kerajaan Bone jauh sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan raja Bone La Maddaremmeng (1631-1644). Kebijakan Raja Bone ini

⁵⁸ Tosibo.2002. *Historiografi Perbudakan; Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Magelang: Indonesiatara, hlm. 150.

sangat mengejutkan seluruh kaum bangsawan dan orang-orang yang memiliki budak atau *ata* sebab beliau mengeluarkan perintah tentang larangan perbudakan atau budak harus dimerdekakan. Larangan perbudakan itu dikecualikan budak untuk budak warisan. Pembebasan budak ini dilatar belakangi oleh ajaran agama Islam yang pada waktu sudah dianut oleh raja Bone. Beliau sangat terkenal sebagai seorang raja yang sangat ketat dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam.

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

Pada akhir abad ke-18, kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, Kerajaan Soppeng, dijadikan sebagai barometer tentang situasi perpolitikan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Ada kerajaan-kerajaan yang dijadikan oleh pemerintah Belanda sebagai wilayah yang dilindungi yang disebutnya sebagai sekutu. Ada juga negeri atau kerajaan yang berpemerintahan dan dapat dibagi dua yaitu; daerah-daerah yang dikuasai langsung dan daerah-daerah yang tidak dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa ini, kehidupan masyarakat mengalami goncangan-goncangan psikologis sebab menghadapi kekuasaan negeri yang berada dalam masa peralihan, dan lebih banyak menunjukkan keengganan untuk melepaskan apa yang selama ini menjadi milik atau kekuasaannya. Kalangan bangsawan merasakan banyak kehilangan fasilitas, sebab tidak lagi memperoleh hak-hak istimewa dari raja-raja setempat. Itulah sebabnya banyak di antara bangsawan itu membuat keonaran dalam masyarakat. Mereka banyak mengorganisir berbagai macam perjudian, dan dari perjudian itu lalu dipungut upeti untuk kepentingan pribadi masing-masing penyelenggara kegiatan tersebut.

Selain itu, terbentuk pula kelompok-kelompok kaum pembangkang yang dipimpin oleh para bekas *punggawa* (pemimpin pasukan) dan melanjutkan perlawanannya. Bentuk perlawanan yang dilakukan adalah pengacauan atau perampokan, baik terhadap Belanda dan pengikut-pengikutnya, maupun kepada penduduk bumi putera sendiri. Itulah sebabnya sering terjadi pembunuhan walau hanya persoalan sepele.⁵⁹Kondisi itu terjadi hampir di seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sehingga pada awal abad ke-19 hingga abad pertengahan atau masa pemerintahan Hindia Belanda kondisinya tidak menentu. Salah satu tokoh pembangkang yang sempat tercatat di Kerajaan Bone adalah *Arung Kayu*.

Sebelum masa pemerintahan We Maning Ratu Arung Data di Bone, beberapa peristiwa politik telah terjadi yang mendahuluinya. Di antaranya; adalah pengalihan kekuasaan terhadap Sulawesi Selatan dari tangan Belanda ke Inggris tidak dapat diterima oleh pihak Kerajaan Bone. Alasan penolakan pihak Bone sebab menganggap hal itu tidak lumrah karena tidak dilakukan melalui suatu pertempuran. Selain itu, Kerajaan Bone menganggap bahwa penyerahan itu bertentangan dengan isi Perjanjian Bungaya 1667 yang telah ditandatangani pascaperang Makassar. Penguasa baru ini (baca Inggris) belum khawatir atas sikap yang diperlihatkan oleh Kerajaan Bone itu, sebab ia mempunyai kekuatan yang memadai untuk menghadapi Bone.

Penyerahan kekuasaan Sulawesi Selatan, untuk daerah Makassar dan daerah takluknya dilakukan oleh Gubernur VOC kepada pemerintah Inggris pada tanggal 6 Maret 1812. Setelah penyerahan itu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pegawai pemerintah setempat untuk tunduk kepada kekuasaan

⁵⁹ Mattulada, 1998. *op. cit*, hlm. 319-320.

Inggris dan kepada pejabat Inggris yang ditempatkan pada EIC di Makassar.⁶⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pengambilan sumpah ini dilakukan di dalam Benteng Ford Rotterdam (sekarang Benteng Ujung Pandang). Lebih lanjut disebutkan bahwa, pemerintah Inggris juga mengeluarkan perintah larangan terhadap perdagangan budak pada tanggal 18 November 1812, serta larangan ekspor budak dalam wilayah Makassar dan daerah takluknya pada tanggal 6 Januari 1813.

Pada saat itu, yang berkuasa di Kerajaan Bone adalah Toappatunru Arung Palakka (1812-1823). Beliau memang sangat beralasan untuk menolak keberadaan Inggris sebagai penguasa di Sulawesi Selatan yang diterima begitu saja dari tangan VOC tanpa suatu kerja keras. Apalagi salah satu alasan penolakan raja Bone itu yang didasarkan pada isi Perjanjian Bungaya 1667 yang dianggap bertentangan yaitu pasal 6 yang berisi antara lain bahwa orang-orang Inggris harus diusir dari Celebes. Selain itu, karena beberapa hak prerogatif yang telah menjadi kebiasaan ketika Arung Palakka berkuasa dulu, juga akan dihilangkan oleh Inggris, sementara raja Bone masih tetap menghendaki hal itu.

Persoalan-persoalan itulah yang menyebabkan Kerajaan Bone semakin melakukan pembangkangan terhadap pemerintah Inggris. Sementara itu, Inggris tentu saja semakin resah akan kenyataan itu. Meskipun pada awalnya Inggris tidak khawatir, namun dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bone semakin terang-terangan melakukan pembangkangan dengan melakukan blokade perdagangan. Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah Inggris yang mencoba untuk menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai satu pelabuhan besar dengan sistem perdagangan bebasnya. Juga sebab adanya campur tangan di dalam tubuh Kerajaan Gowa, menjadikan suasana daerah ini semakin tidak menentu.

⁶⁰ Mappangara. 1996. *op. cit.* hlm.89-90.

Campur tangan yang dimaksudkan adalah beralihnya benda *kalompoang*⁶¹ Kerajaan Gowa yang bernama *Sudanga* ke tangan raja Bone. Benda tersebut merupakan alat legitimasi kekuasaan bagi setiap raja, siapa yang memiliki benda tersebut, maka dialah yang dianggap sebagai raja, meskipun yang memegangnya adalah raja dari kerajaan lain. Ketika benda tersebut berada di tangan raja Bone Toappatunru Arung Palakka 1812-1823, (sebelumnya berada di tangan La Tenritappu) maka sebagian besar rakyat Gowa beralih kepercayaan kepada raja Bone sebagai raja mereka, terutama yang berada di daerah pedalaman. Sebagian lagi rakyat Gowa masih tetap percaya kepada Kerajaan Gowa. Kondisi inilah yang menyebabkan sehingga posisi Kerajaan Gowa lemah dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan.

Kondisi yang demikian itulah yang sangat menggagu roda pemerintahan Inggris di Sulawesi Selatan, termasuk perselisihan-perselisihan yang terjadi di sekitar wilayah kekuasaannya sangat mempengaruhi soal keamanan, *eksport* dan *import*. Suasana demikian menunjukkan adanya kepincangan kekuasaan antara Bone dengan Gowa. Itulah sebabnya kemudian pemerintah Inggris mendesak raja Bone untuk mengembalikan *kalompoang* kepada pihak Kerajaan Gowa paling lama pukul 12 malam setelah ultimatum dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1814.⁶² Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh pihak Kerajaan Bone. Selanjutnya Pemerintah Inggris lalu mengeluarkan satu pernyataan terbuka yang berisi 11 poin perbuatan tidak sah yang dituduhkan kepada raja Bone.

⁶¹ Benda *Kalompoang Sudanga* milik Kerajaan Gowa itu diserahkan oleh pengikut-pengikut dari I Sangkilang yang pernah merebut benda tersebut, kemudian menyerahkan kepada Arung Mampu (mantan raja Gowa ke-27). Arung Mampu merasa tidak berhak atas benda tersebut, lalu menyerahkannya kepada Raja Bone, La Tenritappu (1775-1812) sebab beliau menganggap bahwa La Tenritappu lebih berhak atas benda tersebut sebab beliau adalah cucu Sultan Ismail, raja Gowa ke-20.

⁶² Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit*, hlm. 175.

Sebagai akibat dari penolakan raja Bone terhadap ultimatum itu, maka Pemerintah Inggris menyatakan perang terhadapnya. Dan pada tanggal 7 Juni 1814, sebelum fajar menyingsing tentara Inggris menyerang perkampungan orang-orang Bugis di Bontoala, dan tempat kedudukan raja Bone. Raja Bone tidak dapat menahan serangan tentara Inggris yang telah mendapat bantuan dari pasukan Gowa. Pemukiman raja Bone di Bontoala habis dibakar, sehingga raja Bone bersama pengikutnya terpaksa menyelamatkan diri dan benda *kalompoang* dikembalikan kepada Kerajaan Gowa.⁶³

Pasca kekalahan Kerajaan Bone dari Inggris, ia kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengurangi pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Bone dengan cara mengembalikan wibawa Kerajaan Gowa terlebih dahulu. Pengembalian wibawa itu dilakukan dengan cara mengangkat raja Gowa yang baru yaitu I Mappatunru Karaeng Lembangparang sebagai raja Gowa ke-30 (1816-1825). Dengan pengangkatan itu wibawa Kerajaan Gowa sudah pulih kembali, dan ini berarti rakyat Kerajaan Gowa yang sebelumnya terpecah dua akibat perang Batara Gowa I Sangkilang dan *kalompoang* kerajaan berada di tangan raja Bone, kembali bersatu. Oleh sebab itu, kondisi politik di Kerajaan Gowa tenang untuk sementara waktu.

Sementara itu, Kerajaan Sidenreng dengan rajanya yang bernama La Wawo mendapat keuntungan atas persahabatan dan bantuannya terhadap pemerintah Inggris. Sebab pasca kekalahan Kerajaan Bone dari Inggris, Raja Sidenreng, La Wawo diberikan kepercayaan untuk mengelola Pelabuhan Parepare yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Bone. Kepercayaan itu dapat dipahami sebab Kerajaan Sidenreng merupakan sekutu setia dari pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan sebelum penaklukan Kerajaan Bone. Dalam perang ini, Kerajaan Sidenreng terlibat

⁶³ Daeng Patunru, dkk. 1969. *op. cit.* hlm. 91

langsung dalam peperangan itu bersama beberapa kerajaan lainnya sehingga Bone dapat dikalahkan.

Selain Pelabuhan Parepare yang diambilalih oleh Inggris pasca kekalahan Kerajaan Bone, juga beberapa daerah kekuasaannya yang terdapat di bagian utara Makassar, juga diserang dan diduduki. Lahan-lahan pertanian yang terdapat di daerah itu, yang sejak lama dikuasai oleh Kerajaan Bone, juga dijual oleh pemerintah Inggris di muka umum. Sebagian di antaranya diberikan kepada orang-orang Eropa dan orang-orang Makassar yang telah berjasa kepada Inggris di Sulawesi Selatan sebagai pinjam pakai.

Meskipun Kerajaan Bone telah dikalahkan oleh Inggris yang dibantu oleh sekutunya, namun perlawanan di daerah Sulawesi Selatan belum berhenti terutama yang dilakukan oleh sekutu Kerajaan Bone. Oleh sebab itu, hanya dua tahun berselang setelah kekalahan Kerajaan Bone oleh Inggris, maka kekuasaannya atas Sulawesi Selatan mulai redup dan terancam diambil alih kembali. Hal ini disebabkan bahwa Inggris yang ada di Sulawesi Selatan hanya bergerak di bidang perdagangan dan bukan politik sehingga tenaga professional yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah teritorialnya tidak memadai.

Itulah sebabnya sehingga sebelum Inggris berhasil memperkuat kedudukannya atas Sulawesi Selatan, maka Inggris dengan terpaksa harus mengembalikan wilayah kekuasaannya kembali kepada pihak Belanda. Pengembalian wilayah ini mengakibatkan Inggris harus meninggalkan seluruh wilayah yang diperolehnya, kecuali Bengkulu. Pengambilalihan wilayah kekuasaan Inggris itu dilakukan pada tanggal 7 Oktober 1816. Kembalinya Belanda di Sulawesi Selatan diyakini akan diterima secara politik oleh kerajaan sekutu tua dari kerajaan-kerajaan lokal. Keyakinan itu nantinya tidak terbukti sebab kerajaan lokal, terutama Kerajaan Bone tetap tidak menerima Belanda seperti halnya Inggris dulu.[]

**LATAR BELAKANG KELUARGA
DAN PERLAWANAN
WE MANIRATU ARUNG DATA**



Perlawanan Bone terhadap Belanda, tampaknya bukanlah hal yang baru tampak ketika Belanda berusaha memperluas wilayah dan memperkuat kedudukan kekuasaannya di daerah Sulawesi Selatan pada abad ke-19. Jauh sebelumnya, yaitu menjelang berakhirnya kekuasaan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada penghujung abad ke-18, telah terjadi tindak perlawanan atau konflik antara kedua belah pihak. Benih-benih konflik itu kembali bergelora ketika pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan kedudukan VOC berusaha memulihkan kembali kedudukan kekuasaannya dan mendesak Kerajaan Bone untuk menandatangani Kontrak Bungaya yang diperbaharui 1824. Pembaharuan kontrak inilah yang memicu terjadi konflik terbuka berupa perang antara Bone dengan Belanda. Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang itu, maka dalam pembahasan bab ini terlebih dahulu difokuskan pada uraian mengenai latar belakang keluarga We Maniratu Arung Data, sekilas hubungan Bone dengan Belanda dan Inggris, sikap Bone terhadap kembalinya Belanda, pembaharuan Kontrak Bungaya, dan persiapan dalam menyongsong perang.

Lingkungan Keluarga

Ketika La Tenritappu Toappaliweng memegang jabatan sebagai raja Bone (*arumpone*) selama kurang lebih satu tahun, ia kembali dikarunia seorang anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak kedua dari pasangan suami istri Raja Bone La Tenritappu Toappaliweng (1775-1812) dengan permaisurinya (*arung makkunrai*) We Padauleng atau We Tenripada Arung Timurung, dilahirkan di Lalebbata–Watampone pada 14 Oktober 1776. Anak perempuan itu kemudian diberi nama We Maniratu. Berdasarkan *Surek* atau *Lontarak Bilang* (Catatan Harian) La Tenritappu Toappaliweng, antara lain disebutkan bahwa, “14 Oktobere 1776, purai 10 garagatae’ najaji anakna puanna Batara Tungke–makkunrai anakna-Alhamdu Lillah” (artinya pada 14 Oktober 1776, sesudah pukul 10 malam-lahirilah anak *Puanna Batara Tungke* -perempuan anaknya-Alhamdu Lillah). Lebih lanjut disebutkan bahwa, “Upakuruk sumangek-i Puanna Batara Tungke seddi je’mma-anakna uwe’re’ng inungeng butung–karawik ulaweng” (artinya saya bangkitkan semangat *Puanna Batara Tungke* karena diberinya seorang anak, saya beri gelas minum *butung-karawik* emas). Selanjutnya pada 23 Desember 1776, La Tenritappu Toappaliweng kembali menulis catatan, bahwa “Utudattudang ri Salassae’ mitai We Maniratu” (Saya duduk-duduk di Salassae’ melihat atau menemui We Maniratu).⁶⁴

Berdasarkan *Lontarak Akkarungeng Bone*, antara lain disebutkan bahwa, La Tenritappu Toappaliweng adalah anak dari We Hamidah Arung Takalarak yang juga dikenal dengan gelar *Petta Matowae* dengan suaminya La Mappapenning Daeng

⁶⁴ *Surek Bilang* (Catatan Harian) La Tenritappu Toappaliweng, dalam Lamallongeng, Asmat Riady, 2012. Nilai Kejuangan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV (1823-1835) Melawan Belanda. Makalah pada Seminar “Penggalian Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV, di Watampone, 5 November 2012.

Makkuling Arung Berru. We Hamidah Arung Takalarak adalah anak La Temmassonge Toappaweling Raja Bone XXII Matinroe ri Malimongeng (1749–1775) dengan isterinya We Mommo Sitti Aisyah yaitu cucu Syekh Yusuf (Tuanta Salamaka ri Gowa). Sedangkan La Temmassonge Toappaweling adalah anak dari Raja Bone La Patau Matanna Tikka Matinroe' ri Nagauleng (1696– 1714) dengan isterinya We Sundari Datu Baringeng (Soppeng).⁶⁵

La Tenritappu Toappaliweng kawin dengan sepupu satu kalinya yang bernama We Padauleng atau We Tenripada, anak dari saudara laki-laki We Hamidah Arung Takalarak, yaitu La Baloso Toakkaottong Ponggawa Bone dengan isterinya Arung Lempang. Dari perkawinan tersebut, melahirkan 13 orang anak, yaitu (1) Batara Tungke ArungTimurung, (2) We Maniratu Arung Data, (3) La Mappasessu Toappatunru Arung Palakka, (4) La Mappaseling Arung Pannyili, (5) La Tenri Sukki Arung Kajuara, (6) We Kalaru Arung Pallengoreng, (7) La Tenribali Arung Ta', (8) La Mappaewa Arung Lompu, (9) LaPemma Rukka Arung Karella, (10) La Temmu Page ArungParoto, (11) La Pattuppu Batu Arung Tonra, (12) La PawawoiArung Timurung, dan (13) I Mamuncaragi.⁶⁶

Urutan putra-putri Raja Bone La Tenritappau Toappaliweng tersebut, juga disebutkan dalam *Surek* atau *Lontarak Bilang* La Tenritappu Toappaliweng, bahwa Batara Tungke ArungTimurung adalah anak pertama La Tenritappu Toappaliweng dengan isterinya We Padauleng atau We Tenripada, yang lahir pada 12 April 1775. Kemudian We Maniratu Arung Data adalah anak kedua yang lahir pada 14 Oktober 1776. Sementara La Mappasessu Toappatunru

⁶⁵ *Lontarak Akkarungeng Bone*, hlm. 138. Koleksi Andi Maryam, Staf Peneliti dan Penerjemah Naskah *Lontarak* pada Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

⁶⁶ Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 4; *Lontarak Akkarungeng Bone*, *op. cit.*, hlm. 138-139.

Arung Palakka adalah anak ketiga yang lahir pada 12 Mei 1791⁶⁷ Sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa perkawinan antara La Tenritappu dengan We Padauleng melahirkan anak: (1) La Mappasessu Toappatunru, (2) We Manneng Arung Data, (3) Batara Tungke Arung Timurung, (4) La Pawawoi Arung Sumaling, (5) La Mappaseling Arung Panyili, (6) La Tenri Sukki Arung Kajuara, (7) We Kalaru Arung Pallengoreng, (8) Mamuncaragi, (9) La Tenri Bali Arung Ta', (10) La Mappawewang Arung Lompu Anreguru Anakarung Bone, (11) La Paremma Rukka Arung Karella, (12) La Temmu Page Arung Paroto Ponggawa Bone, dan (13) La Mattuppu Batu Arung Tonra.⁶⁸

Setelah melalui upacara adat sebagaimana lazimnya dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang masih memegang teguh pada tradisi dan budaya yang terpelihara dengan baik, putri dari pasangan suami Raja Bone La Tenritappu dengan We Padauleng tersebut, diberi nama We Maniratu Arung Data. Dalam *Surek* atau *Lontarak Bilang* (catatan harian) La Tenritappu, antara lain disebutkan bahwa pada saat *riulok sulolona* (acara tradisional atas kelahiran seorang anak), We Maniratu dihadiahkan *akkarungeng* (wilayah kekuasaan), yaitu daerah Data, sehingga sejak itu namanya berubah menjadi We Maniratu Arung Data.⁶⁹ Oleh karena anak tersebut merupakan karunia dari Tuham Yang Maha Kuasa, maka kedua orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya serta lingkungan masyarakatnya, senantiasa mendoakan dan

⁶⁷ *Surek Bilang* (Catatan Harian) La Tenritappu Toappaliweng, dalam Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 4.

⁶⁸ Hamid, Abu, dkk., 2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, hlm. 220.

⁶⁹ Berdasarkan informasi dari sejumlah tokoh masyarakat, bahwa daerah Data atau tempat itu berada dalam wilayah Lalebbata (Ibukota Kerajaan Bone). Namun ada juga yang berpendapat bahwa Data berada di bagian selatan Kerajaan Bone, tepatnya dalam wilayah Kecamatan Mare (sekarang). *Surek Bilang* (Catatan Harian) La Tenritappu Toappaliweng, dalam Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 3.

menumpukkan harapan kepadanya agar kelak menjadi manusia yang berguna. Bukan hanya menjadi seorang manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi juga terpuji tingkah lakunya dan menjadi pemimpin yang disegani serta dihormati oleh masyarakat.

Meskipun demikian, dari berbagai karya tulis atau catatan tentang nama putri Raja Bone La Tenritappu tersebut, tampaknya terhadap perbedaan antara satu dengan yang lainnya, misalnya: (1) Abd. Razak Daeng Patunru, dkk., 1989, dalam *Sejarah Bone* yang diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, menuliskan nama raja Bone ke-25 (1823-1835) adalah "I Benni Arung Data Matinroe ri Kessi"⁷⁰ (2) Dalam *Lontarak Akkarungeng Bone* yang diterbitkan dengan biaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 1985, tertulis nama raja Bone (*arumpone*) ke-25, adalah "We Manneng Arung Data".⁷¹ (3) Dalam buku *Bone Selayang Pandang* yang ditulis oleh Andi Muhammad Ali pada 1986, menyebutkan nama raja Bone (*arumpone*) ke-25 adalah "I Mani Arung Data". (4) Dalam buku *Arus Perjuangan di Sulawesi Selatan*, yang ditulis oleh Sarita Pawiloi pada 1989, menyebutkan nama raja Bone ke-25, adalah "I Maning Arung Data". (5) Dalam *Naskah Sejarah Bone* yang ditulis oleh Andi Palloge Petta Nabba, menyebutkan nama raja Bone ke-25 adalah "I Maniratu Arung Data" digelar Sultanah Rajituddin Matinroe' ri Kessi. (6) Dalam buku *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* yang

⁷⁰ Menurut Asmat Riady Lamallongeng, bahwa berdasarkan berbagai sumber dari tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa nama I Benni Arung Data, ditemukan pada catatan-catatan Belanda yang berusaha untuk menguasai Bone pada masa pemerintahan Raja Bone-XXV tersebut. Kalau keterangan ini benar, maka kemungkinan nama I Benni Arung Data hanyalah mengikuti ucapan Belanda yang tidak terlalu pasih dalam menyebut We Maniratu Arung Data. Tentang hal ini, mungkin perlu untuk dilakukan penggalian dan penelusuran yang lebih mendalam (*ibid.*, hlm. 2-3).

⁷¹ Nama yang sama ini juga disebutkan dalam buku *Sejarah Bone* yang ditulis oleh Abu Hamid, dkk., pada tahun 2007, yang menyebutkan "We Manneng Arung Data".

ditulis oleh Mattulada pada 1998, menyebutkan nama raja Bone ini "Arumpone I Banning Arung Data, Sultana Saleha Rabiattuddin Matinroe ri Kessi".⁷²

Selain itu, terdapat pula sejumlah makalah yang menguraikan nama Raja Bone Arung Data tersebut, misalnya dalam makalah Edward L. Poelinggomang yang disampaikan pada Seminar Penggalan Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV di Watampone pada 5 November 2012, disebutkan "I Manieng Arung Data". Sementara Suriadi Mappangara, dalam makalah yang disampaikan pada seminar yang sama tersebut, menuliskan nama raja Bone ini dengan "I Manneng Arung Data". Terlepas dari perbedaan nama raja Bone tersebut, dalam pembahasan selanjutnya hanya dipakai nama We Maniratu Arung Data, sebagaimana yang disebutkan dalam *Surek Bilang* (catatan harian) Raja Bone La Tenritappu Toappaliweng Matinroe ri Rompegading (1775–1812) yang tidak lain adalah ayah kandung Arung Data. Di samping itu, juga karena dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone pada 5 November 2012, nama Raja Bone Arung Data Matinroe ri Kessi yang disepakati adalah We Maniratu.

Berdasarkan asal usul keluarga dan kedua orang tuanya sebagaimana yang telah diuraikan, We Maniratu Arung Data merupakan bangsawan tinggi *anak pattola* (pewaris tahta atau putri mahkota) atas sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Ia bukan hanya berhak diangkat menjadi raja di Kerajaan Bone

⁷² Nama yang sama ini juga disebutkan dalam Tesis Suriadi Mappangara tentang *Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone–Belanda 1816–1860)* yang ditulis pada tahun 1996, yaitu "I Banning Arung Data, Sultana Saleha Rabiattuddin". Namun dalam tulis berikutnya justru Suriadi Mappangara, menuliskan nama Raja Bone ini dengan "I Manneng Arung Data" (Mappangara, Suriadi, 2012. I Manneng Arung Data, Ratu Yang Menolak Kehadiran Belanda. Makalah pada Seminar Penggalan Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV, Watampone, 5 November 2012).

dan Kerajaan Gowa, tetapi juga di Kerajaan Sanrobone (Takalar), Barru, dan Soppeng. Oleh karena itu, sejak masa kanak-kanak We Maniratu Arung Data selalu ditempah oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabat yang terdekat yang berada dalam siklus kehidupannya. Adapun yang menjadi penekanan dalam pembinaan mental terhadap We Maniratu Arung Data, adalah menyangkut tingkah laku yang terpuji dalam pergaulan sosial di masyarakat. Termasuk dalam hal yang menyangkut etika dan moral manusia dalam kehidupan masyarakat. Sebab, penilaian masyarakat terhadap seseorang, baik yang menyangkut masalah moral dan etika maupun yang menyangkut masalah kehidupan religius, merupakan patokan untuk memperoleh simpati atau dukungan dari masyarakat secara keseluruhan.⁷³

Masalah kepemimpinan juga merupakan pembinaan utama dari orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya. Ini dapat dipahami kalau We Maniratu Arung Data ditempah oleh keluarganya sedemikian rupa, agar kelak di masyarakat dapat menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, melekat di hati rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena We Maniratu Arung Data adalah seorang putri dan cucu dari raja Bone yang berstatus sebagai *anak pattola* atau *anak arung matase* (putra mahkota) di Bone, sehingga sewajarnya kalau ditempah menjadi seorang pemimpin yang mengayomi masyarakat atau rakyat yang akan dipimpinnya. Dalam konsep kepemimpinan Bugis, seperti yang banyak tercatat dalam tradisi *lontarak*, seseorang pemimpin (meskipun bukan pemimpin puncak) mutlak kepemimpinannya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat.⁷⁴ Dalam hal ini terkandung makna

⁷³ We Maniratu Arung Data yang pada masa hidupnya memiliki banyak aktivitas yang berorientasi kepada kemaslahatan negeri dan bangsanya dalam menghadapi penjajah Belanda (Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 4-5).

⁷⁴ Farid, A. Zainal Abidin, 1973. *Beberapa Ungkapan Dalam Lontarak Tentang Kepemimpinan dan Pemerintahan*. (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, hlm. 6-24).

bahwa seseorang pemimpin harus dapat menerima pandangan atau keinginan dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin tidak menutup diri dalam kehidupan masyarakat dan pemimpin pun harus dapat memelihara dialog dengan rakyatnya. Tugas melindungi atau mengayomi kehidupan rakyat atau masyarakat, adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin.

Selain itu, masalah *siri`* dan *pesse* yang merupakan konsep budaya dasar bagi masyarakat Bugis-Makassar, juga selalu menjadi penekanan dalam pembinaan mental terhadap We Maniratu Arung Data yang dilakukan oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya. Budaya *siri`* dan *pesse*, jika diartikan secara harfiah maka bermakna rasa malu dan pedih atau perasaan yang sedih yang mengandung unsur solidaritas terhadap orang lain. Bukan hanya itu, karena budaya *siri`* dan *pesse* juga mengandung kehormatan, harga diri atau martabat dan kesediaan berkorban atau mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk membantu kehidupan orang lain yang terkena musibah atau bencana. Seseorang yang telah mengamalkan budaya *siri`* dan *pesse* merupakan syarat mutlak sebagai seorang manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, mereka yang tidak menegakkan *siri`* dan *pesse* dipandang rendah martabatnya.⁷⁵

Semua pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya, sejak masa kanak-kanak telah tertanam dengan baik dalam diri We Maniratu Arung Data. Ia telah ditempa dengan norma-norma sosial dalam kehidupan keluarganya dan telah dimatangkan oleh kondisi kehidupan

⁷⁵ Abdullah, Hamid, 1991. *Andi Pangerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Andi Mappasissi dan Andi Muh. Ali serta Andi Amir Sessu, *Wawancara* di Watampone pada tanggal 20 dan 21 serta 22 Januari 1997.

masyarakat sekitarnya. Jika disimak sifat-sifat We Maniratu Arung Data dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerendahan hatinya dalam pergaulan sosial di masyarakat, berlaku adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Keberaniannya yang melebihi sebagian laki-laki, dan suka memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Sikapnya yang pantang menyerah dalam membela dan memperahankan kehormatan bangsa dan tanah airnya, semua itu merupakan rahmat dari Tuhan. Sebab walaupun bagaimana karakter yang asli yang dimiliki seseorang, ikut pula membentuk kepribadiannya di masyarakat. Itulah sebabnya, tidak secara otomatis seorang anak manusia langsung dapat mewarisi sifat-sifat orang tuanya yang berbudi luhur. Adakalanya terjadi penyimpangan yang bersifat kontradiktif. Namun bagi We Maniratu Arung Data, di samping memperoleh pembinaan mental yang intensif dari orang tuanya dan anggota kerabatnya, juga sifat-sifat asli yang dimilikinya sejak lahir mendukung hal tersebut.⁷⁶

Kehidupan We Maniratu Arung Data yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan adalah kehidupannya pada masa kanak-kanak. Sebab, ketika itu terjadi konflik antara Kerajaan Bone dengan Kompeni (VOC) yang berawal ketika Batara Gowa Amas Madinah ditangkap dan diasingkan oleh Kompeni ke Sylon. Atas tindakan itu, La Tenritappu sebagai keluarga dekat dari Batara Gowa, mengajukan keberatan dan mendesak kepada Kompeni di Makassar, supaya Batara Gowa dikembalikan ke Gowa. Di samping itu, La Tenritappu berusaha pula mempengaruhi Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu, agar mendesak Kompeni supaya

⁷⁶ Lontarak Akkarungeng Bone, *op. cit.*, hlm. 154; Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 8; Petta Nabba, 2006. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir)*. Makassar: Yayasan Al Muallim, hlm. 182.

membebaskan Batara Gowa Amas Madinah dari pengasingan.⁷⁷

Tuntutan raja Bone dan raja Gowa terhadap Kompeni itu mengalami kegagalan. Bahkan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu mengundurkan diri dari pemerintahan Kerajaan Gowa. Ia kemudian digantikan oleh Temmasongeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin. Raja Bone La Tenritappu tidak senang terhadap pengangkatan Sultan Zainuddin sebagai raja Gowa. Oleh karena itu, ketika I Sangkilang⁷⁸ melancarkan perlawanan secara terbuka terhadap Kompeni dan Kerajaan Gowa, La Tenritappu memberikan bantuan secara tidak langsung kepada I Sangkilang dan pasukannya.

⁷⁷ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 218. Paeni, Mukhlis, dkk., 2002, *Batara Gowa, Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 123.

⁷⁸ Gerakan I Sangkilang muncul pada tahun 1776, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Batara Gowa yang dahulu pernah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Sailon, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Batara Gowa I Sangkilang. Ia berhasil memperoleh pengikut-pengikut yang banyak. Ketika Kompeni (VOC) mengetahui gerakan I Sangkilang, segera memerintahkan Brugman untuk menangkapnya hidup atau mati. Akan tetapi I Sangkilang bersama kurang lebih 300 pengikutnya, ternyata lebih dahulu menyerang Brugman dan pasukannya, sehingga terjadilah pertempuran yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak. Sejak itu pertempuran antara I Sangkilang dengan pihak Belanda senantiasa terjadi. Gerakan I Sangkilang makin hari semakin bertambah jumlah pengikutnya. Bahkan ia berhasil memperoleh banyak dukungan dari beberapa pembesar Kerajaan Gowa dan bangsawan-bangsawan terkemuka, antara lain mantan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu, Karaeng Kanjilo, Karaeng Sapanang, Karaeng Ballasari (ibu dari Batara Gowa Amas Madina), dan Arung Palakka (nenek dari Amas Madina). Oleh karena itu, ketika I Sangkilang bersama laskarnya menyerbu Ibukota Kerajaan Gowa pada tahun 1777, mereka tidak menjumpai perlawanan yang berarti. Rakyat Gowa lalu menurunkan Raja Gowa Sultan Zainuddin dari tahtanya dan mengangkat I Sangkilang menjadi Sultan Kerajaan Gowa. Sejak itu semua benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa jatuh ke tangannya, sehingga kekuasaan dan pengaruhnya semakin bertambah besar, karena menurut pandangan rakyat siapa yang memegang *kalompoang* Gowa dialah raja yang sah di Kerajaan Gowa. Beberapa kali Sultan Zainuddin bersama pasukan Belanda mencoba menyerang dan mengusir Batara Gowa I Sangkilang dari Ibukota Kerajaan Gowa, tetapi tidak berhasil. Baru setelah memperoleh bala bantuan yang kuat dari Jawa, pihak Belanda berhasil merebut dan menduduki Ibukota Kerajaan Gowa dari tangan I Sangkilang pada 1778. I Sangkilang bersama pengikut-pengikutnya mengundurkan diri ke pegunungan dan membawa benda-benda *kalompoang* Gowa. Pada tahun 1785 Batara Gowa I Sangkilang wafat di pegunungan karena diracun orang. Benda-benda *kalompoang* Gowa diserahkan oleh pengikut-pengikutnya kepada mantan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu, yang kemudian diserahkan lagi kepada Raja Bone La Tenritappu (Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983, *op. cit.*, hlm. 85-88); PaEni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 127.

I Sangkilan akhirnya berhasil menduduki tahta Kerajaan Gowa dan benda-benda *kalampoang* kerajaan, termasuk di antaranya *Sudanga* jatuh ke tangannya. Ketika I Sangkilan wafat pada tahun 1785, benda-benda *kalampoang* kerajaan tersebut, diserahkan oleh pengikut-pengikutnya kepada mantan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu. Selanjutnya, Arung Mampu menyerahkan *kalampoang* itu kepada Raja Bone La Tenritappu.⁷⁹

Sehubungan dengan itu, Gubernur Belanda di Makassar, Reijke, menyampaikan beberapa kali protes kepada Raja Bone La Tenritappu tentang campur tangannya dalam persoalan-persoalan Kerajaan Gowa serta mendesak mengembalikan benda-benda *kalampoang* Kerajaan Gowa, tetapi tidak berhasil. Raja Bone La Tenritappu berpendapat bahwa Arung Mampu lebih berhak menduduki tahta Kerajaan Gowa daripada Sultan Zainuddin. Bahkan menurut raja Bone, bahwa selain dari Arung Mampu, Batara Gowa Amas Madinah, ia pun juga mempunyai hak atas tahta Kerajaan Gowa. Itulah sebabnya pemerintah Belanda di Batavia mengambil keputusan untuk melakukan ancaman dengan kekuatan senjata terhadap raja Bone, supaya bersedia menyerahkan benda-benda *kalampoang* Kerajaan Gowa dan berhenti mengambil tindakan-tindakan yang bersifat permusuhan terhadap Kompeni Belanda.⁸⁰

Untuk mewujudkan keputusan itu, sebuah armada yang berkekuatan satu divisi tentara dikerahkan oleh Kompeni ke perairan Bone. Armada itu tidak melakukan pendaratan dan penyerangan, hanya mondar-mandir di Teluk Bone sebagai

⁷⁹ Mattulada, 1998, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, hlm. 304; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983, *op. cit.*, hlm. 88-90.

⁸⁰ Paeni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 153; Daeng Patunru, Abd Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 220.

ancaman. Pihak Kompeni menganggap bahwa ancaman itu adalah cukup untuk memaksa raja Bone memenuhi tuntutan Kompeni. Akan tetapi anggapan itu ternyata keliru karena raja Bone tidak gentar sedikit pun terhadap ancaman itu. Setelah kurang lebih tujuh bulan lamanya, akhirnya mereka kembali ke Makassar dengan tidak memperoleh hasil. Hal itu menunjukkan semakin merosotnya kekuatan Kompeni, terutama dalam pandangan raja-raja di Sulawesi Selatan.⁸¹ Dengan demikian, tidak dapat disangkal jika situasi politik yang dialami oleh Kerajaan Bone juga turut mempengaruhi kehidupan keluarga We Maniratu Arung Data dan sikap permusuhan terhadap Belanda turut membentuk kepribadiannya.

Pembinaan mental terhadap We Maniratu Arung Data yang dilakukan orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya berlangsung terus hingga ia memasuki usia remaja. Romantika perjalanan hidup dan kehidupan Arung Data, sejak masa kanak-kanak telah menempahnya menjadi seorang manusia yang mengenal dan memahami lingkungan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun Arung Data hidup dan ditempa di dalam lingkungan kaum bangsawan atau tembok feodalisme, tetapi tidak menyerapnya sebagai seorang manusia yang bersifat dingin terhadap dunia luar atau kehidupan lingkungan masyarakatnya. Bahkan dimasa-masa selanjutnya, ia telah memperlihatkan tingkah laku yang terpuji di masyarakat, dan reputasi sosial yang mengagumkan, serta prinsip perjuangannya dalam melepaskan bangsanya dari cengkaman kaum penjajah kolonial.

Berkat pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tuanya, dan anggota kerabatnya, termasuk kelompok pemangku adat, sejak

⁸¹ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 306; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 220-221.

usia muda (kanak-kanak) terhadap We Maniratu telah tertanam dengan baik, sehingga memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, ketika Raja Bone La Tenritappu wafat pada 1812, dan digantikan oleh putranya yang bernama La Mappasessu Toappatunru sebagai raja Bone, We Maniratu Arung Data diangkat menjadi pimpinan laskar wanita Kerajaan Bone. Laskar wanita ini diperlengkapi dengan senjata *lawida* (alat tenun yang runcing). Di samping itu, semakin ditingkatkan pula jumlah pasukan laki-laki yang ditempatkan di berbagai titik pertahanan. Lalu dengan jiwa kesatria We Maniratu Arung Data bersama laskar wanitanya beberapa kali terjun langsung ke medan perang untuk menghadapi musuh.⁸²

Karier We Maniratu Arung Data mencapai puncaknya ketika Raja Bone La Mappasessu Toappatunru wafat pada 1823, karena atas mufakat dari anggota dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone, We Maniratu Arung Data diangkat menjadi raja Bone menggantikan saudaranya yaitu Raja Bone Toappatunru Matinroe ri Ajabbenteng (1812–1823). Oleh karena itu, We Maniratu Arung Data merupakan salah satu dari enam raja perempuan yang pernah memerintah di Kerajaan Bone, yaitu; (1) Raja Bone We Benrigau Makkalempie Mallajange ri Cina (1496–1516), (2) Raja Bone We Tenri Pattuppu Matinroe ri Sidenreng (1602–1611), (3) Raja Bone Batari Toja Daeng Talaga Matinroe ri Tippulue (1714– 1715) kemudian terpilih lagi menjadi raja Bone ke-21 (1724–1749), (4) Raja Bone We Maniratu Arung Data Matinroe ri Kessi (1823–1835), (5) Raja Bone Pancaittana Besse Kajuara Matinroe ri Majennang (1857–1860) dan (6) Raja Bone Fatimah Banri Arung Timurung Matinroe ri Bolampare'na (1871–1895).⁸³

⁸² Hamid, Abu, dkk., 2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, hlm. 227; Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 8.

⁸³ Lamallongeng, 2012, *op. cit.*, hlm. 2; Ali, Andi Muh., 1986. *Bone Selayang Pandang*:

SEKILAS HUBUNGAN BONE DENGAN VOC

Kedudukan dan kekuasaan Kompeni atau VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) di Sulawesi Selatan semakin mengalami kemerosotan pada paruh kedua abad ke-18. Hal itu tidak terlepas dari pergolakan politik yang terjadi di Eropa dan gerakan perlawanan di wilayah koloni VOC, termasuk di Sulawesi Selatan. Kenyataan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Raja Bone La Tenritappu untuk memperluas kembali wilayah kekuasaan dan pengaruh Bone di daerah ini, terutama negeri-negeri yang pernah dikuasai oleh Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka. Sebab, semenjak wafatnya Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka, negeri-negeri di sebelah selatan yang biasa disebut Provinsi Bagian Selatan (*Zuider Provincie*) telah diambil dari kekuasaan Bone. Tindakan Kompeni itu dianggap oleh Raja Bone La Tenritappu bersama rakyatnya sebagai perbuatan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Raja Bone La Tenritappu berusaha merebut kembali dari kekuasaan Belanda. Dalam upaya itu, La Tenritappu akhirnya berhasil menguasai kembali negeri-negeri yang telah dikuasai Belanda, seperti Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.⁸⁴

Kemudian, La Tenritappu melakukan pula perluasan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah di sebelah utara Makassar yang disebut Provinsi Bagian Utara (*Noorder Provincie*), seperti Maros dan Pangkajene. Daerah-daerah itu diperintah langsung oleh Kompeni berdasarkan Perjanjian Bungaya (1667). Selain itu, Raja Bone La Tenritappu juga mempergunakan tempat kediamannya di Bontoala, sebagai pangkalan untuk mengambil bagian dalam pemungutan pajak atas pemasukan barang-barang dagangan di

Watampone, Damai; Petta Nabba, Andi Palloge, 2007, *op. cit.*, hlm. 67-194; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

⁸⁴ Daeng Patunru, dkk. 1989, *op. cit.*, hlm. 221; Kadir, dkk. 1978. *op. cit.* hlm. 77; Mattulada. 1998, *op. cit.*, hlm. 306-307.

pelabuhan Makassar. Bahkan La Tenritappu melarang para petani di Maros dan Pangkajene membayar pajak *vertiening* (pajak 10 persen dari hasil padi tiap tahun) kepada Kompeni. Oleh karena pada waktu itu sudah banyak orang Bone di bawah pimpinan para bangsawan yang tinggal dan membuka usaha-usaha yang luas di Maros, Pangkajene, Labakkang, dan Segeri, sehingga Kompeni mengalami kesulitan atau tidak dapat menarik pajak di daerah-daerah tersebut.⁸⁵

Sementara sumber lain menyebutkan bahwa kemerosotan Kompeni di Sulawesi Selatan pada penghujung abad ke-18, tidak terlepas dari pergolakan politik yang terjadi di Eropa dan gerakan perlawanan di wilayah koloni VOC, seperti Gerakan Karaeng Bontolangkasa dan La Maddukkelleng, serta Gerakan Batara Gowa di Sulawesi Selatan. Gerakan perlawanan yang disebut terakhir ini meletus pada 1776, di bawah pimpinan seorang tokoh yang menyatakan diri sebagai Batara Gowa, raja Gowa yang meninggalkan tahta dan mengembara ke tempat lain secara diam-diam pada tahun 1766.⁸⁶ Pemimpin gerakan ini, disebut Batara Gowa I Sangkilang, yang giat menentang VOC dan

⁸⁵ Oleh karena itu, pemerintah Belanda di Makassar beberapa kali mengajukan protes kepada pemerintah Kerajaan Bone, atas sikap dan tindakan-tindakannya tersebut. Namun pemerintah Kerajaan Bone tidak menghiraukannya. Pertentangan antara Kerajaan Bone dengan pihak Belanda berlanjut terus hingga masuknya kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan pada tahun 1812. Mattulada. 1998. *op. cit.*, hlm. 306; Daeng Patunru, dkk. 1989, *op. cit.*, hlm. 221.

⁸⁶ Batara Gowa adalah gelar yang diberikan kepada Amas Madina pada bulan Juni 1758, setelah sekitar lima tahun dinobatkannya menjadi raja Gowa (21 Desember 1753). Raja ini merupakan tokoh yang diharapkan oleh para pembesar dan bangsawan kerajaan dapat memulihkan kembali kekuasaan Kerajaan Gowa, namun ditekan oleh Kompeni Belanda. Oleh karena itu, dia meninggalkan istana secara diam-diam. Tersiar kabar bahwa dia meninggalkan kerajaan untuk mencari bantuan Inggris. Hal ini mendorong Kompeni bergiat memburuhnya. Kompeni kemudian mengatakan bahwa tokoh ini berhasil ditangkap dan kemudian diasingkan ke Sailing pada 1767, dan dia diberitakan meninggal di tempat pembuangannya pada 1795. Tidemen, J. 1908. "Batara Gowa op Zuid-Celebes", dalam *BKI*, No. 64, hlm. 350-390; PaEni, dkk., 2002. *Batara Gowa Mesianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 88-134.

merebut tahta Kerajaan Gowa. Dalam gerakan perlawanannya menentang Kompeni, I Sangkilang berhasil merebut pos VOC di Maros pada Mei 1777. Namun laskar Bone yang dikirim ke Maros, yang dipimpin oleh Punggawa Datu Baringeng dengan mudah mengambil alih daerah itu tanpa pertempuran yang berarti pada 21 Mei 1777. Bahkan pihak Bone kemudian bergiat memperluas kekuasaannya di daerah itu dan tidak bersedia mengembalikan kepada VOC. Padahal wilayah Maros dan sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan VOC yang sangat potensial. Sebab bukan hanya sebagian besar produk beras yang diekspor Kompeni ke Maluku berasal dari wilayah ini, tetapi juga sebagian besar budak didatangkan dari daerah tersebut. Oleh karena itu, setelah Maros dikuasai Bone, pendapatan kompeni serta perdagangan beras dan budak merosot.⁸⁷

Setelah menduduki Maros dan daerah sekitarnya, Bone kemudian semakin mengembangkan pelabuhan Parepare yang selama ini dikuasainya. Pelabuhan ini dikembangkan menjadi salah satu bandar niaga produk dari daerah bagian utara Makassar hingga Mandar dalam perdagangan dengan pusat perdagangan di bagian barat, seperti Banjarmasin, Riau, Palembang, dan Johor. Sementara itu, kendati pihak VOC berhasil memadamkan Gerakan Batara Gowa pada Juli 1778, namun mereka tidak dapat segera merebut kembali wilayah yang diduduki Bone. Hal ini berkaitan dengan pecahnya perang Inggris-Belanda (1780-1784), yang mempengaruhi kedudukan Kompeni. Setelah perang itu berakhir, VOC mulai berusaha merebut kembali bekas koloninya yang lepas dan bergiat memperluas kekuasaannya di Semenanjung Malaka untuk membendung Inggris agar tidak memasuki dunia perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Namun usaha itu

⁸⁷ Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 44-45; PaEni, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 137-141.

tidak berhasil memperbaiki kedudukan kekuasaan, dan ekonomi VOC yang semakin merosot. Bahkan kondisi keuangan Kompeni dinyatakan berada dalam keadaan yang menyedihkan pada 1787.⁸⁸

Kerajaan Bone telah melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lainnya di daerah ini, sebelum kehadiran pemerintah Inggris. Kerajaan Bone tidak melakukan penaklukan terhadap Kerajaan Gowa, tetapi dalam banyak hal Kerajaan Bone mencampuri urusan internal Kerajaan Gowa. Ketika I Sangkilang yang pernah merebut *kalompoang*, yang wafat tahun 1785, maka oleh pengikutnya *kalompoang* yang secara tradisional digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan bagi seorang raja yang bertahta di Kerajaan Gowa, kemudian *kalompoang* diserahkan kepada Arung Mampu, mantan raja Gowa ke 27. Namun Arung mampu sudah tidak bersedia menjadi raja Gowa untuk kedua kalinya, selanjutnya ia menyerahkan *kalompoang* itu kepada Raja Bone La Tenritappu (1755-1812). Menurut Arung Mampu, La Tenritappu lebih berhak menjadi raja Gowa, karena dia adalah cucu Sultan Ismail, raja Gowa ke 20. Pengambil alihan *kalompoang* Kerajaan Gowa ke tangan raja Bone membuat ketaatan rakyat Gowa terbagi dua. Sebagian berpihak kepada Kerajaan Bone, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman, sebagian lagi tetap setia kepada Kerajaan Gowa. Keadaan ini melemahkan posisi Kerajaan Gowa dipercaturan politik di Sulawesi selatan.⁸⁹

⁸⁸ Korte Kroniek, dalam *Regeering Almanak* (1898), hlm. 587; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 169 dan 207.

⁸⁹ Pada tanggal 6 Juni 1814, Inggris mendesak raja Bone untuk menyerahkan *kalompoang* yang berada di tangan raja Bone, namun tidak dipenuhinya. Oleh karena tuntutan itu tidak dipenuhi oleh raja Bone, maka pada tanggal 7 Juni 1814, Inggris menyerang perkampungan orang Bugis di Bontoala, tempat kedudukan raja Bone. Raja Bone akhirnya harus mengakui keunggulan Inggris yang telah mendapat bantuan dari Kerajaan Gowa. Mappangara. 2012. *op. cit.*, hlm. 2.

Ketika pecah pergolakan politik di Eropa, seperti Revolusi Perancis 1789, ternyata berdampak pada pengaruh kekuasaan Perancis di daratan Eropa dan wilayah koloni mereka, termasuk menduduki Negeri Belanda. Ambisi Perancis itu mendorong Inggris tampil melancarkan usaha untuk mematahkannya, baik di daratan Eropa maupun di wilayah koloninya, termasuk koloni Kompeni. Pada 1795, Inggris berhasil merebut Malaka dan Maluku. Perkembangan politik itu, bukan hanya menyebabkan banyak kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan melepaskan diri dari kekuasaan *VOC*, terutama Bone dan sekutu-sekutunya. Akan tetapi juga menyebabkan pihak *VOC* tidak berusaha merebut kembali koloninya yang diduduki Bone. Bahkan sebaliknya, justru Bone bergiat memperluas kekuasaannya di wilayah *VOC*, seperti di Provinsi Bagian Selatan (*Zuider Provincie*). Pada 1797, atas kerjasama Inggris dengan Bone berhasil menghancurkan pos-pos pertahanan Kompeni di Bantaeng dan Bulukumba.⁹⁰

Pergolakan politik itu, juga terjadi di koloni lainnya, seperti di Riau, Palembang dan Mataram yang berdampak biaya tinggi, sehingga kedudukan kekuasaan dan kondisi keuangan *VOC* semakin merosot. Selain itu, juga karena tindak korupsi, perdagangan gelap, dan penyelundupan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat *VOC*, sehingga Kompeni mengalami kerugian besar dan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Akibatnya, *VOC* dinyatakan bangkrut dan harus menyerahkan wilayah koloninya kepada pemerintah Belanda pada Desember 1799.⁹¹ Serah terima itu menandai berakhirnya kekuasaan *VOC*, dan sekaligus mengawali babakan baru sejarah pemerintahan Belanda di Kepulauan Nusantara.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 170-171; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 45.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 169-170; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 46-53.

Penyerahan koloni VOC kepada pemerintah Belanda pada penghujung abad ke-18, merupakan awal kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara. Koloni VOC yang diserahkan kepada pemerintah Belanda itu hanya meliputi Jawa, Sumatra, Banjarmasin (Kalimantan), dan Makassar karena koloni lainnya berada di bawah kekuasaan Inggris.⁹² Setelah serah terima itu, pemerintah Belanda bergiat mengadakan perjanjian damai dengan Inggris untuk memperoleh kembali koloninya. Inggris kemudian bersedia mengembalikan semua koloni Belanda yang didudukinya kecuali Seilon pada 1802, dengan syarat Belanda bersedia membuka wilayahnya bagi perdagangan bebas. Namun upaya itu tidak segera terealisasi karena pergolakan politik di Eropa dan Belanda yang diduduki oleh Perancis kembali berperang dengan Inggris. Perang itu pecah karena adanya *continentaal stelsel* (stelsel kontinental) yang dicetuskan oleh Napoleon Bonaparte untuk mengisolasi Inggris di daratan Eropa.⁹³

Perancis yang menduduki Belanda ketika itu, juga bermaksud menguasai koloni Belanda sehingga dibentuklah Panitia Umum pada 1806. Panitia Umum yang terdiri dari C. Th. Elout dan C.H. van Grasveld, bertugas menangani koloni Belanda yang disebut *Bataafsche Indië Republiek* (Republik Batavia India). Panitia itu kemudian mengangkat Herman W. Daendels sebagai gubernur jenderal yang baru pada 1808, menggantikan Albertus H. Wiese. Serah terima berlangsung pada 14 Januari 1808. Perluasan wilayah

⁹² Inggris berhasil menguasai sebagian besar koloni VOC pada tahun 1795, yaitu antara lain Tanjung Harapan, Malabar, Koromondel, Begal, Seilon, Malaka, dan Maluku. Poelinggomang. 2002. *op. cit.* hlm. Bahkan atas jalinan kerja-sama yang baik antara Inggris dengan pelaut dan pedagang Bugis (Sulawesi Selatan), Bone berhasil menduduki dan merebut pos-pos VOC di Bantaeng dan Bulukumba pada tahun 1797. Sementara wilayah koloni VOC lainnya di Sulawesi Selatan seperti *Noorder Provincie* (Propinsi Bagian Utara) dan *Zuider Provincie* (Propinsi Bagian Selatan) sebagian juga diduduki oleh Bone. PaEni, dkk., 2002. *op. cit.* hlm. 167-168.

⁹³ Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 54.

kekuasaan Perancis tersebut, juga mendorong Inggris untuk menduduki kembali koloni Belanda. Maluku berhasil diduduki pada 1810 dan setelah itu armada Inggris di bawah pimpinan Lord Minto, memblokade dan menyerang Batavia sehingga Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, yang baru saja menggantikan Daendels (1811), mengungsi ke Semarang. Serangan Inggris itu menyebabkan Janssens terpaksa menandatangani sebuah kapitulasi di Semarang pada 18 September 1811. Kapitulasi tersebut berisi penyerahan tanpa syarat semua koloni Belanda kepada Inggris.⁹⁴

KEBIJAKAN INGGRIS TERHADAP BONE

Wilayah koloni yang diserahterimakan hanya meliputi koloni yang berada di Jawa, Sumatera, Banjarmasin, dan Makassar, karena wilayah koloni lainnya berada di bawah pengawasan Inggris. Setelah serah terima itu, Belanda terus mengupayakan jalan untuk melakukan perjanjian perdamaian dengan Inggris guna memperoleh kembali wilayah koloninya. Usaha itu berhasil dicapai tahun 1812, Inggris bersedia mengembalikan semua koloni, sementara penyerahan kekuasaan Sulawesi Selatan dari tangan Belanda ke Inggris tidak diterima oleh Kerajaan Bone. Selain karena penyerahan itu tidak disertai dengan pertempuran, juga bertentangan dengan isi perjanjian Bungaya. Secara khusus pada pasal 6 berisi antara lain bahwa orang-orang Inggris harus diusir dari *Celebes* (Sulawesi). Sikap menentang yang ditunjukkan Kerajaan Bone ini cukup menguatirkan pemerintah Inggris di Makassar, oleh sebab itu yang bertugas sebagai *Resident* di Makassar, Richard Philips (1812-1814) mengingatkan kepada Raja Bone ke 23 La Mappasessu Toapatunru Arung Palakka yang memerintah (1812-1823). Menurut Richard Philips pernah terjaln

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

hubungan persahabatan antara Bone dan Inggris pada tahun 1793. Hubungan persahabatan dengan kedua belah pihak nampak nyata, ketika pada tahun 1797 Inggris membantu Bone memblokir pantai Selatan Makassar, tetapi karena gagal menduduki Makassar maka setelah itu Inggris meninggalkan daerah ini.⁹⁵

Sehari setelah penyerahan kekuasaan, Richard Philips mengeluarkan pernyataan yang berisi: Makassar terbuka bagi semua pedagang dari koloni bangsa Eropa yang berada di bagian timur Tanjung Pengharapan. Hukum dan kebiasaan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan di Makassar tetap dipertahankan dan pemerintah Inggris akan berusaha memajukan kesejahteraan penduduk. Tanggal 18 November Pemerintah Inggris juga melarang perdagangan budak, Richard Philips menyatakan melarang impor dan ekspor budak dalam wilayah Makassar dan daerah taklukannya.⁹⁶

⁹⁵ Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Inggris untuk wilayah Makassar tidak diterima baik oleh Raja Bone La Tenritappu, Raja Suppa Sultan Adam, dan Raja Tanete La Patau. Sehingga ketiga raja lokal ini tidak bersedia hadir pada acara serah terima kekuasaan yang diadakan di Makassar tanggal 6 Maret 1812. Pengalihan kekuasaan ini dipandang oleh para penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebagai suatu tindakan pelanggaran pada Perjanjian Bungaya (1667) yang dipaparkan pada pasal 6 dan pasal 7. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah kerajaan, khususnya Kerajaan Bone menolak kehadiran Inggris, walaupun sebelumnya telah terjadi hubungan kerjasama. Serah terima dilakukan antara Letnan Kolonel Johan Caesar van Wikkerman kepada Richard Philips. Poelinggomang. 2012. *op. cit*, hlm. 2-3. Serah terima kekuasaan terhadap wilayah Makassar dan daerah taklukannya dari tangan Belanda ke Inggris dijadikan kesempatan bagi Gowa, Soppeng dan Sidenreng untuk menjalin persahabatan dengan pemerintah negara asing. Konflik internal yang terjadi di Kerajaan Gowa pada akhir abad XVIII sebagai akibat campur tangan Kerajaan Bone dalam urusan internal Kerajaan Gowa, menjadikan kerajaan ini kurang berdaya menyelesaikan masalahnya. Lain pula yang dihadapi Kerajaan Soppeng, yang bersahabat dan banyak membantu Kerajaan Bone. Kerajaan Bone dan Soppeng sejak Arung Palakka yang dinobatkan menjadi datu Soppeng. Sejak itu kalau perlu raja Bone merangkap datu Soppeng, kemudian keduanya memiliki hubungan pertalian kekerabatan. Keadaan ini terus berlangsung terus sampai Inggris mengambil alih kekuasaan daerah ini. Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit*, hlm. 184. Serah terima ini juga dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pegawai pemerintah setempat untuk tunduk pada kekuasaan Inggris dan kepada pejabat Inggris yang ditempatkan di Makassar. Hamid, dkk. 2007. *op. cit*, hlm. 261-263.

⁹⁶ *ibid*

Usaha Richard Philips menjinakkan Toapatunru Arung Palakka tidak berhasil, Toapatunru Arung Palakka mengajukan beberapa tuntutan sebagai syarat Kerajaan Bone bersedia menerima kehadiran Pemerintah Inggris di daerah ini. Tuntutan yang diajukan Toapatunru Arung Palakka antara lain:

1. Bone menuntut supaya raja-raja Sulawesi Selatan yang hendak menemui Resident atau pembesar Inggris di Makassar harus diantar oleh raja Bone
2. Kerajaan Bone tidak bersedia membayar pajak persepuluhan seperti yang pernah dipungut Belanda yang kemudian yang ingin dilanjutkan oleh Inggris
3. Bone tidak bersedia mengembalikan *kalompoang* (pusaka Kerajaan Gowa) yang kini berada di tangan raja Bone kepada Kerajaan Gowa
4. Bone menghendaki mengakui Arung Mampu sebagai raja Gowa
5. Bone tidak mengakui hak yang dipertuan Inggris di wilayah Maros, Bantaeng, dan Bulukumba
6. Raja Bone menuntut kedudukan sebagai wakil pemerintah Inggris di daerah ini, sebagaimana yang pernah diberlakukan pada zaman VOC.⁹⁷

⁹⁷ Syarat yang diajukan oleh raja Bone ditolak oleh van der Capellen, karena keistimewaan hanya dimiliki oleh Arung Palakka dan keistimewaan itu tidak bisa diwariskan. Untuk Bone setara dengan kerajaan-kerajaan taklukan lainnya yang harus menerima Perjanjian Bungaya yang diperbaharui. Menanggapi suasana politik ketika itu terjadi dua kelompok pro kontra terhadap Perjanjian Bungaya yang diperbaharui seperti usulan Gubernur Jenderal van der Capellen. Petta Naba. 2012. Latar Belakang Keterlibatan Raja Bone XXV Dalam Perang Bone: Makalah Seminar Kearsipan dengan Tema Penggalan Nilai-nilai Kepahlawanan I Manne Ratu Arung Data Raja Bone ke 25, Tanggal 5 November 2012, di Kabupaten Bone, hlm. 8; Hamid, dkk. 2007. *op. cit.* hlm. 263. Selain itu penolakan Kerajaan Bone terhadap kehadiran Inggris juga diwujudkan dengan menyerang penguasa-penguasa lokal di wilayah *Nooder Province* (wilayah bagian utara). Tindakan Bone mengundang kemarahan Inggris karena daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaannya.

Pemerintah Inggris tidak memenuhi tuntutan raja Bone, karena Kerajaan Bone tidak membantu Inggris dalam mengambil alih kekuasaan di daerah ini dan Inggris merasa tidak perlu memberi hak-hak istimewa kepada Kerajaan Bone. Berbeda saat Perang Makassar (1666-1669) berlangsung, Bone banyak membantu VOC dalam menaklukkan Kerajaan Gowa. Pada saat itu VOC merasa perlu memberi hak-hak istimewa kepada Bone, seperti setiap raja di Sulawesi Selatan yang menemui pembesar VOC di Makassar harus diantar oleh raja Bone. Sulit juga bagi Inggris untuk memenuhi tuntutan Bone mengenai hak penguasaan terhadap wilayah Maros, Bantaeng, dan Bulukumba. Wilayah ini terletak pada garis singgung Laut Flores di sebelah selatan, dan Teluk Bone di sebelah timur, yang sangat rawan bagi perdagangan gelap.⁹⁸

Apabila terjadi konflik antara Kerajaan Bone dan Inggris, dapat dipastikan Bone akan menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Teluk Bone untuk berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di pantai timur Sulawesi. Dengan demikian pedagang-pedagang Bugis Makassar yang berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Bone, dipaksa oleh raja Bone untuk menghindari Pelabuhan Makassar. Raja Bone akan mendorong mereka untuk menggunakan pelabuhan yang ada di sekitar Bantaeng, yang ada di sepanjang pesisir Teluk Bone. Dari sini, pedagang-pedagang Bugis-Makassar dapat melakukan pelayaran niaga ke arah barat. Tindakan Kerajaan Bone yang menggiring pedagang-pedagang Bugis-Makassar yang berada di bawah pengaruh kekuasaannya untuk menghindari Pelabuhan Makassar, sangat merugikan pemerintah Inggris, yang mencoba menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas. Karena pedagang-pedagang asing yang diharapkan meng-

⁹⁸ Abd Latief. 1997. *Yang Menentang dan Bersahabat Inggris di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 144.

unjungi Makassar, akan dihalang-halangi oleh pedagang-pedagang Bugis-Makassar. Tambahan pula, suasana tidak aman di daerah ini akan membuat pedagang-pedagang asing lebih senang mengadakan transaksi dagang dengan pedagang-pedagang Bugis-Makassar. Sebelum serah terima kekuasaan terhadap daerah ini dari tangan Belanda ke Inggris, semua wilayah kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan sudah berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Bone.⁹⁹

Sebelum kehadiran Pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan, Kerajaan Bone telah mengadakan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lainnya, namun Kerajaan Bone tidak menaklukan Kerajaan Gowa, tetapi dalam beberapa hal Bone mencampuri urusan internal Kerajaan Gowa. Apalagi pada saat *kalompoang* Kerajaan Gowa beralih tangan dan berada di Kerajaan Bone.¹⁰⁰ Beralihnya kesetiaan sebagian rakyat Gowa kepada raja Bone, menyebabkan pejabat Raja Gowa Karaeng Pangkajene sulit menyelesaikan dengan baik masalah internal Kerajaan Gowa. Demikian pula masalah-masalah politik yang berhubungan dengan kerajaan lain. Karaeng Pangkajene diangkat oleh Belanda sebagai pejabat raja Gowa tanpa persetujuan *Bate Salapang* (dewan Kerajaan Gowa).¹⁰¹

Usaha mengembalikan *kalompoang* ke Kerajaan Gowa penting artinya, *kalompoang* ini berupa *sudanga* (*Kelewang*) selaku regalia

⁹⁹ Mappangara. 1996. *op. cit.* hlm. 163; A.A. Cense dan H. J. Heeren. 1972. *Pelayaran dan Pengaruh Kebudayaan Makassar Bugis di Pantai Utara Australia* (terjemahan). Jakarta: Bhratara, hlm. 2. Dengan adanya kebijakan Kerajaan Bone dengan melarang pedagang Bugis-Makassar, hal ini berdampak merugikan pemerintah Inggris, yang menginginkan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas. Selama pemerintahan Inggris di daerah ini, setiap tahun Pelabuhan Makassar dikunjungi tidak lebih dari dua Jung Cina. Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit.* hlm. 179.

¹⁰⁰ Keadaan ini melemahkan posisi Kerajaan Gowa dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan. Poelinggomang. 2004, dkk. *op. cit.* hlm. 173; Emanuel, L. A. *Memorie van Overgave, van den afterdenden Asisten Resident van Bone*, Periode: 25 Oktober 1945-20 April 1948 (koleksi pribadi A. Zainal Abidin Farid, hlm. 28).

¹⁰¹ Poelinggomang, dkk. 004. *op. cit.* hlm. 173.

Kerajaan Gowa terpenting dianggap paling sakti. selain untuk menyelesaikan konflik antara kelompok di kalangan pejabat tinggi. Kerajaan Gowa juga untuk mengalihkan kembali kesetiaan rakyat Gowa di pedalaman dari raja Bone ke pejabat raja Gowa, sangat diharapkan akan tercipta ketertiban dan perdamaian di kerajaan ini. Hal ini penting bagi Inggris, karena kegiatan perdagangan bebas ingin dijalankan hanya dapat berjalan baik jika keadaan politik di daerah ini dapat dikendalikan. Bulan Desember 1813 Richard Philips, memerintahkan Karaeng Pangkajene dan pasukannya dibantu pasukan Sidenreng, dan Soppeng melakukan penyerangan terhadap rakyat Gowa di pedalaman yang tetap mengakui raja Bone sebagai raja mereka yang sah. Keputusan Richard Philips melakukan operasi militer ke daerah pedalaman, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Disebabkan pasukan Kerajaan Bone yang membantu rakyat Gowa di pedalaman, dapat memukul mundur pihak penyerang. Menghadapi kenyataan yang demikian, maka Richard Philips berkeinginan menyelesaikan masalah *kalompoang* ini secepat mungkin. Kemudian segera berusaha meyakinkan pemerintah Inggris di Batavia, bahwa bantuan pasukan Inggris sebaiknya segera dikirim ke Makassar untuk menghadapi Kerajaan Bone yang semakin sulit diajak berunding.¹⁰²

Awal kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan, Inggris belum dapat berbuat banyak, disebabkan karena tindakan-tindakan Bone yang menguasai Maros, Bantaeng, Bulukumba,¹⁰³ Sikap Kerajaan

¹⁰² Mattulada. 1998. *op. cit*, hlm. 325. Perlunya kestabilan politik, sehingga mempengaruhi kegiatan pelayaran dan perdagangan. Oleh karena itu pemerintah Inggris mengusahakan persoalan *kalompoang* secepatnya dapat diselesaikan, mengingat terjadi perpecahan di Kerajaan Gowa dengan tidak adanya *kalompoang* di Kerajaan Gowa.

¹⁰³ Khusus untuk wilayah Maros dan sekitarnya, Kerajaan Bone membangun kerjasama dengan Kerajaan Tanete dan Kerajaan Suppa untuk mempertahankan wilayah itu dari serangan Inggris dan sekutu-sekutunya. Kerajaan Tanete yang berbatasan langsung dengan Maros menerima baik ajakan kerjasama itu, sedangkan Kerajaan Suppa menyatakan kesediaannya membantu Kerajaan Bone, selain karena datu Suppa (Sultan Adam) adalah ipar raja Bone (Toapatunru Arung Palakka) dan juga mengharapkan bantuan Bone untuk

Bone dan sekutu-sekutunya yang senantiasa menentang Pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan menyebabkan timbulnya konflik diantara kedua belah pihak di wilayah Maros, Bantaeng, dan Bulukumba. Meskipun Inggris mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan bersahabat, tetapi akhir kekuasaannya di daerah ini Inggris tidak dapat menghapus kekuasaan Kerajaan Bone. Pemerintah Inggris di Makassar tidak memperhatikan perkembangan Bone, karena tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk melakukan peperangan. Akhirnya apa yang diinginkan Pemerintah Inggris di Makassar tercapai, permintaan bantuan pasukan dikabulkan oleh pemerintah Inggris di Batavia pada tanggal 2 Juni 1814. Bantuan pasukan yang berkekuatan 900 orang yang terdiri dari pasukan Inggris dan pasukan asal Madura, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Nightingale tiba di Makassar. Nightingale melakukan tindakan mengenai pendudukan Bone terhadap wilayah *Oostder Provincie*. Tindakannya adalah mengirim utusan ke Ujung Loe, dan berusaha sedapat mungkin merebut Benteng Bulukumba, dan tujuannya tidak menjadikan Ujung Loe sebagai daerah operasi, melainkan sebagai daerah pangkalan keamanan saja.¹⁰⁴

Tanggal 6 Juni 1814 Mayor Jenderal Nightingale mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada raja Bone, bahwa raja Bone diberikan kesempatan sampai pukul 12.00 malam untuk berpikir dan mengakui perbuatan-perbuatannya yang tidak sah selama

mempertahankan Pelabuhan Bacukiki, pelabuhan yang terletak di sebelah selatan Pelabuhan Parepare. Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit.* hlm 184-185.

¹⁰⁴ Karena kuatnya pasukan Bone dan sekutu-sekutunya dan luasnya pengaruh kekuasaan Bone, tampaknya kurang mampu diimbangi oleh alat-alat persenjataan yang dimiliki oleh Inggris. Memahami hal ini Inggris berusaha mendekati Arung Ponre, salah seorang raja lokal yang bersahabat dengan raja Bone. Tujuannya adalah mengajak Arung Ponre untuk bersekutu dan menciptakan disintegrasi di antara kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan Bone, namun ajakan ini ditolak oleh Arung Ponre. Sebagai tanda penolakannya tanggal 25 Juni 1814 Arung Ponre yang mendapat bantuan dari Bone menyatakan perang terhadap Bantaeng. Koleksi ANRI: Bundel Makassar No. 265/1

ini. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh raja Bone, pemerintah Inggris kemudian mengeluarkan satu pernyataan terbuka yang berisi beberapa perbuatan yang tidak sah yang telah dilakukan oleh raja Bone, yaitu:

1. Perkampungan Bugis yang diperoleh raja Bone sebagai pinjam pakai telah dipersenjatai dan dapat diperkuat dengan kubu-kubu pertahanan yang luas
2. Raja Bone telah mengakui dan memperlakukan Arung Mampu sebagai raja Gowa yang sah, hal mana bertentangan dengan sumpahnya sewaktu baginda telah diangkat menjadi raja Bone atas persetujuan Belanda
3. Raja Bone telah menyerahkan benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa kepada Arung Mampu bekas raja Gowa, atau menyimpannya untuk diri sendiri
4. Raja Bone membantu orang-orang Gowa beroposisi terhadap pemerintah yang sah di Gowa
5. Raja Bone mengambil dan menguasai daerah Tallo yang dahulu milik VOC dan sekarang milik Inggris dan mengangkat seorang raja di sana
6. Memberikan keleluasaan kepada orang-orang bawahannya untuk menjalankan hak atas sawah-sawah yang bukan miliknya yang terletak dalam daerah kekuasaan Inggris dengan mempergunakan kekuatan senjata
7. Memberikan keleluasaan kepada orang-orang Bone menghalang-halangi dengan cara kekerasan penagihan pajak *vertienen* (pajak persepuluhan), sehingga Resident Philips hamper terkena maut
8. Menghasut rakyat di tanah-tanah yang masuk daerah kekuasaan Inggris, yaitu Makassar, Bantaeng, Bulukumba, dan Maros, sehingga terjadi pembunuhan atas diri seseorang

- juru bahasa di Maros dan percobaan pembunuhan atas diri Resident Philips
9. Tuntutan raja Bone supaya baginda mendapat suatu kedudukan di samping *Resident* di dalam urusan pemerintahan
 10. Menghalang-halangi perdagangan di Makassar, baik dari darat maupun dari laut.
 11. Tuntutan raja Bone, bahwa tidak diperkenankan seorang anggota sekutu atau utusan untuk menghadapi *Resident* jika tidak diantar oleh raja Bone atau wakilnya, ditolak oleh *Resident* dan komandan tentara Inggris.¹⁰⁵

Raja Bone tidak menghiraukan beberapa daftar tuntutan itu, akibatnya tanggal 7 Juni 1814 sebelum fajar menyingsing, tiga buah barisan tentara Inggris menyerang perkampungan orang-orang Bugis di Bontoala. Raja Bone akhirnya mengakui keunggulan Inggris yang telah mendapat bantuan dari raja Gowa, Soppeng, dan Sidenreng.¹⁰⁶ Istana raja Bone di Bontoala dibakar habis, sehingga raja Bone bersama pengikutnya terpaksa mengungsi dari Bontoala, tanpa membawa serta *kalompoang* Kerajaan Gowa, yang kemudian diambil alih oleh *datu* (raja), Soppeng tetapi tidak menyerahkan *kalompoang* itu kepada Arung Mampu

¹⁰⁵ Menurut anggapan raja Bone dan raja-raja bawahannya di Sulawesi Selatan, sebagian besar tuduhan itu tidak beralasan. Pada dasarnya mereka hanya mengenal Arumpone Toapatunru Arung Palakka sebagai pertuanan tunggal. Kedatangan Inggris dipandang sebagai perampasan yang sewenang-wenang terhadap hak milik orang Sulawesi Selatan. Mattulada. 1998. *op. cit.* hlm. 327-328.

¹⁰⁶ Pompe, A. 1863. *Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen*, (Kampel: B. L. van Dam, hlm. 301. Kerajaan Soppeng, adalah kerajaan yang bersahabat dan banyak membantu Kerajaan Bone ketika Perang Makassar berlangsung. Tetapi setelah itu tidak hanya menjadi wilayah pengaruh Kerajaan Bone, bahkan sejak Arung Palakka menjadi datu Soppeng tahun 1676, sejak saat itu datu Soppeng harus memiliki pertalian kekerabatan dengan raja Bone. Kalau perlu raja Bone merangkap datu Soppeng, keadaan ini berlangsung terus sampai Inggris mengambil alih kekuasaan daerah ini dari tangan Belanda. Dengan alasan-alasan ini mengapa kedua kerajaan ini membangun persahabatan dan senantiasa membantu Inggris di Makassar dalam menghadapi kerajaan-kerajaan yang menentang kehadiran Inggris di Sulawesi Selatan.

untuk diserahkan sendiri kepada pemerintah Inggris di Makassar, pemerintah Inggris selanjutnya mendesak *Bate Salapang* untuk memilih dan menobatkan seorang raja baru. Akhirnya dengan menggunakan *kalompoang*, Inggris menobatkan Mappatunru Karaeng Lembang Parang (putra Raja Tallo/Mangkubumi Gowa) mejadi raja Gowa. Pelantikan raja Gowa dengan menggunakan *kalompoang* membuat wibawa dan kekuasaan Kerajaan Gowa kembali. Rakyat Gowa yang sempat terpecah dua, karena keterlibatan raja Bone dalam konflik internal di Kerajaan Gowa, menyebabkan rakyat Gowa yang tadinya berpihak kepada raja Bone kini mengalihkan kesetiaannya kepada pemegang *kalompoang*, yaitu raja Gowa yang baru dinobatkan.¹⁰⁷

Setelah Inggris merebut Benteng Bulukumba pada pertengahan Juni 1814, raja-raja setempat mulai bersilang pendapat mengenai kehadiran Inggris di daerah ini. Karaeng Gantarang dan Karaeng Ujung Loe menyatakan setia kepada Bone, khusus Karaeng Bulukumba senantiasa mengadakan hubungan dengan bangsawan-bangsawan Bone yang berkedudukan di Kajang. Perhatian serius yang diberikan pemerintah Inggris terhadap kerawanan situasi politik di Bulukumba, menunjukkan bahwa raja-raja setempat beserta sekutunya khususnya Bone dan Wajo yang menentang pemerintah Inggris. Kedua belah pihak Inggris dan raja-raja lokal yang menentang saling berusaha menguasai daerah ini. Bone

¹⁰⁷ Setelah pemulihan itu, maka usaha penentuan raja Gowa yang definitif dilakukan, raja Gowa yang terpilih adalah I Mappatunru Karaeng Lembangparang. Kepada raja Gowa yang baru inilah, pemerintah Inggris menyerahkan *kalompoang*. Kerajaan Gowa terpecah menjadi dua golongan, yaitu: golongan penduduk rakyat Gowa pegunungan, yang memihak kepada Arung Mampu, Sultan Mallisujawa dan Arumpone. Dan golongan penduduk rakyat Gowa pesisir, yang memihak kepada Raja Gowa, Sultan Zainuddin Karaeng Katangka dan memihak kepada pemerintah Inggris. Entah karena kepercayaan rakyat Gowa kepada kesaktian *kalompoang*, maka setelah mereka mengetahui kembalinya *kalompoang* dan berada dalam tangan *sombaya ri Gowa*, maka pertentangan antar rakyat pesisir dengan rakyat pegunungan dapat diakhiri dengan damai oleh I Mappatunru Karaeng Lembangparang. Mattulada. 1998. *op. cit*, hlm. 328.

yang telah dipaksa oleh Inggris untuk melepaskan kekuasaan terhadap Pelabuhan Parepare, berusaha membangun persahabatan dengan raja-raja lokal yang lain. Terutama pada *arung matoa* Wajo dan raja-raja setempat di Bulukumba, tujuannya adalah untuk menguasai pelabuhan Bulukumba. Karena jika demikian Bone dan sekutu-sekutunya akan aman menggunakan Pelabuhan Mangarabombang, Pallime, Bajoe, Siwa, dan pelabuhan lain yang terletak di Teluk Bone.¹⁰⁸

Sasaran utama, adalah untuk memperoleh dan menggunakan pelabuhan yang ringan pajak dan bea lainnya menjadi dasar kuat bagi Wajo membantu Bone mempertahankan Bulukumba. Di lain pihak Inggris berusaha menduduki Bulukumba dengan maksud mengamankan daerah itu, khususnya pelabuhan. Inggris yang telah menyatakan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas berkeinginan agar para pelayar niaga, baik asing maupun lokal tidak terkecuali pelayar niaga Bugis-Makassar, dapat menggunakan Pelabuhan Makassar dan datang ke Makassar untuk berdagang. Kebijakan Inggris yang demikian itu justru menimbulkan perlawanan dari Kerajaan Bone dan sekutunya. Jangankan pelayar niaga Bugis-Makassar, pelayar niaga asingpun, khususnya Cina, banyak menghindari Pelabuhan Makassar. Mereka menganggap pelabuhan ini tidak cukup aman, sebagai akibat pergolakan politik di daerah ini.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Berbeda dengan wilayah *Nooder Provincie* secara geografis sangat dekat dengan Makassar, *Oostder Provincie* cukup jauh ke arah timur. Selain Bone dan sekutunya masih menguasai daerah itu sampai ke garis pantai Teluk Bone. Gambaran Richard Philips mengenai kemungkinan di wilayah *Oostder Provincie* akan bersekutu di bawah perlindungan Bone, tidak hanya menunjukkan bahwa wilayah ini cukup rawan secara politik dan militer, tetapi juga merupakan suatu gambaran yang jelas bahwa meskipun ada beberapa raja setempat yang bersekutu dengan Inggris belum merupakan jaminan, apakah Inggris dapat mengontrol keamanan dan ketertiban di daerah itu. Poelinggomang, dkk. 2004, hlm. 189-193.

¹⁰⁹ Meskipun Inggris telah menyatakan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas, tetapi tetap saja sepi dari pengunjung para pelayar niaga, baik pelayar asing maupun lokal. Poelinggomang. 1991. *Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan*

Petinggi Inggris tidak hanya memperkuat pertahanan di wilayah *Nooder Provincie* dan sedapat mungkin mengusir pasukan Bone, Tanete, Suppa yang kini bukan hanya berkedudukan di wilayah itu, tetapi mereka atas nama raja Bone yang memobilisasi rakyat untuk menggarap lahan pertanian. Tindakan ini bukan hanya itu, tetapi rakyat setempat dipaksa membayar pajak persepuluhan tanpa sepengetahuan pemerintah Inggris. Demikian juga daerah Tallo yang berbatasan dengan Makassar di sebelah utara, mulai diduduki oleh pasukan Bone. Belum sempat Letnan Jackson membersihkan wilayah *Nooder Provincie* dari pengaruh Bone, tiba-tiba Richard Philips menerima surat dari raja Soppeng yang melaporkan mengenai rencana raja Bone menyerang Soppeng dalam waktu dekat. Untuk melindungi sekutu Inggris, maka diutus Jackson beserta pasukannya menyusup guna memberi bantuan kepada Soppeng. Bersamaan dengan ini Richard Philips mengeluarkan pengumuman, bahwa rakyat Bone yang bermukim di wilayah kekuasaan Inggris agar meninggalkan tempat tinggalnya jika tetap setia kepada raja Bone. Sikap bermusuhan yang ditunjukkan oleh Bone, membuat pemerintah Inggris menyusun rencana selanjutnya untuk menyerang dari tiga arah. Inggris mengajak tiga kerajaan yang bersekutu dengan Inggris agar bersedia ikut dalam rencana ini. Gowa diharapkan menyerang dari arah selatan, Soppeng dari arah barat, dan Sidenreng dari arah utara, sedangkan pasukan Inggris akan disebar atau diinfiltrasikan ke dalam ketiga kekuatan itu.¹¹⁰

Makassar Pada Abad ke 19. Amsterdam: Disertasi, hlm. 113.

¹¹⁰ *Resident* Makassar Richard Philips pada rapat tanggal 12 Juli 1814 membatalkan menyerang Bone, tetapi setidaknya dapat dijadikan tolak ukur tingkat kesetiaan sekutu-sekutu Inggris di Sulawesi Selatan. Kesediaan raja Gowa, raja Sidenreng, raja Soppeng menghadiri rapat serta saran-saran mereka dalam rapat dijadikan alasan bagi Inggris bahwa kebijakan pemerintahannya di daerah ini dapat diterima oleh beberapa orang raja lokal yang setia berlindung pada kekuasaan Inggris.

Rencana ini sehubungan upaya pemerintah Inggris untuk mengganti Raja Bone Toapatunru Arung Palakka, adapun calon yang diinginkan oleh Inggris adalah Datu Pattiro, putra raja Soppeng. Oleh sebab itu diundang rapat raja Gowa, Soppeng, dan Sidenreng, akan tetapi menurut ketiga raja itu berpendapat bahwa pasukan Bone dan sekutunya masih terlalu kuat dan dikhawatirkan Wajo membantu Bone jika serangan militer ditujukan ke pusat kerajaan itu. Tanggal 14 Juli 1814 Richard Philips mengirim mata-mata ke Wajo, guna mempelajari sikap pemerintah dan rakyat Wajo sehubungan dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Mata-mata yang dikirim adalah seorang putra bangsawan Wajo, yang sudah lama tinggal di Makassar. Mata-mata ini sebagai seorang pedagang yang sukses melakukan perdagangan niaga melalui pelabuhan Makassar, dan telah terjamin keamanannya di bawah perlindungan pemerintah Inggris.¹¹¹

Oleh pemerintah Inggris, Kerajaan Wajo perlu diwaspadai karena banyak pelayar niaga Wajo yang tidak meramaikan pelabuhan Makassar. Mereka masih menggunakan pelabuhan yang berada di wilayah Teluk Bone, kadang-kadang ke arah barat melalui Sidenreng. Satu-satunya pelabuhan yang dikontrol oleh pemerintah Inggris adalah pelabuhan Makassar, sebenarnya Inggris menginginkan kerjasama dengan pelayar niaga Wajo. Pedagang-pedagang asal Kerajaan Wajo ini, merupakan pedagang-pedagang Bugis yang cekatan dan berpengalaman berniaga. Selain itu Inggris juga betul-betul perlu mempelajari laporan keberpihakan Kerajaan Wajo ke Bone, karena sejak Kerajaan Wajo keluar dari Persekutuan *Tellumpoccoe* (persekutuan tiga kerajaan, yaitu Bone, Soppeng, Wajo) pada tahun 1640. Sejak itu Kerajaan Wajo selalu memperlihatkan

¹¹¹ Koleksi ANRI: Bundel Makassar No. 265/1.

kesetiannya kepada Kerajaan Gowa, kesetiaan Kerajaan Wajo dapat terlihat dalam keberpihakan dalam perang Makassar.¹¹²

Kecurigaan Inggris terhadap Wajo ternyata tidak terbukti, sesuai laporan mata-mata Daeng Mamala menyimpulkan bahwa anggota dewan hadat Kerajaan Wajo tidak pernah mencapai kata sepakat tentang perkembangan politik yang sementara berlangsung. Namun laporan mata-mata itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya, karena Sidenreng yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Wajo menunjukkan kesetiannya kepada pemerintah Inggris. Dengan demikian, tidak gampang bagi Kerajaan Wajo untuk membangun hubungan kerjasama dengan Sidenreng yang telah berpihak kepada Inggris. Kalau hubungan kerjasama dengan Sidenreng terputus, maka tentu sulit bagi pedagang-pedagang Kerajaan Wajo untuk menggunakan pelabuhan Parepare yang telah disewakan Inggris kepada Sidenreng. Kalau Kerajaan Wajo tidak menyatakan kesetiannya kepada Inggris, maka pedagang-pedagang yang akan mengalami kesulitan untuk menggunakan pelabuhan Makassar. Satu-satunya jalan bagi pedagang Wajo adalah menggunakan pelabuhan yang ada di Teluk Bone, yang semuanya di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Bone.¹¹³

Adanya indikasi sikap menentang rakyat Wajo terhadap pemerintah Inggris, dan keberpihakan kepada Bone mulai

¹¹² Ada beberapa hal yang Wajo pertimbangkan sehingga tidak bisa bermusuhan dengan Gowa di antaranya, jalan perang tidak memungkinkan untuk menang. Jadi timbul pendapat bahwa dari pada kalah perang yang dapat menyebabkan Kerajaan Wajo menjadi palili (daerah taklukan) Kerajaan Gowa, lebih bijaksana ditempuh jalan diplomasi yang dapat menguntungkan Kerajaan Wajo. Selain itu dua orang bangsawan Wajo yang sangat berpengaruh, yaitu La Pabbia dan To Pabbia, telah memihak kepada Kerajaan Gowa. Poelinggomang. 2004. *op. cit*, hlm. 102. Beberapa wilayah atau negeri bawahan Kerajaan Wajo dicaplok dan diduduki oleh Kerajaan Bone, dan menekan kebebasan orang Wajo dalam berbagai lapangan kehidupan. Tekanan tekanan itu menyebabkan orang Wajo banyak meninggalkan negerinya, ke Makassar atau tempat lain menjadi pengusaha, pedagang yang cekatan dan berhasil menjadi saudagar kaya. Mattulada. 1998. *op. cit*, hlm. 289-290

¹¹³ Mappangara. 1996. *op. cit*, hlm. 163.

muncul kembali ke permukaan. Adanya surat yang ditulis oleh Arung Gandra Mamala dan ditujukan kepada pemerintah Inggris. Demikian juga raja Bone memerintahkan agar orang-orang Bone yang bermukim di Wajo tidak menyerahkan pajak kepada pemerintah Inggris. *Resident* Makassar menilai gaya penulisan surat itu memperlihatkan sikap bermusuhan bahkan surat itu tidak dibungkus amplop. Pemerintah Inggris semakin sulit menghadapi pasukan Kerajaan Bone, karena tidak hanya mendapat bantuan dari Suppa dan Tanete, tetapi juga juga dari tiga kerajaan tetangga, yaitu Alitta, Sawitto, dan Rappang. Keadaan ini semakin diperburuk dengan banyak pasukan Inggris yang menderita sakit. Untuk menanggulangi sementara pemerintah Inggris di Makassar menempuh kebijakan menempatkan pasien-pasien yang tidak tertampung di rumah sakit di rumah orang Cina yang ada dalam kota. Keadaan kesehatan pasukan Inggris yang semakin memburuk dan keadaan ini dimanfaatkan oleh Tanete untuk menduduki Segeri. Pasukan Inggris dan sekutunya belum dapat dan beberapa kerajaan kecil belum berdaya menghadapi Kerajaan Bone, sehingga praktis Inggris hanya bisa bertahan di benteng pertahanan di Maros. Pada bulan Oktober Richard Philips, *Resident* Makassar meninggal dunia, untuk mengisi jabatan, pemerintah Inggris menunjuk Kapten Wood.¹¹⁴

Akhir tahun 1814 masa jabatan Kapten Wood, Tanete mencoba memperluas daerahnya, bukan hanya Segeri, Pangkajene, tetapi berusaha menduduki Maros. Raja Tanete La Patau yang mendapat bantuan dari Kerajaan Bone tidak dapat menembus pertahanan Inggris di Maros, di mana pasukan Inggris mendapat bantuan dari

¹¹⁴ Di Benteng Rotterdam orang yang sakit mencapai 70 orang Eropa, 215 pribumi, dan tiga minggu terakhir diperkirakan bertambah 70 orang lagi. Penanganan sementara pasien ditampung di rumah sakit orang Cina yang ada dalam Kota Makassar. Koleksi ANRI: Bundel Makassar No. 265/1.

pasukan Gowa, Polombangkeng, dan pasukan asal Jawa.¹¹⁵ Pada pertempuran kali ini tidak ada sumber mengemukakan bahwa Sidenreng sebagai sekutu Inggris membantu sekutunya. Mungkin dihalangi di Parepare oleh pasukan Suppa beserta sekutunya, Alitta, Sawitto, dan Rappang.¹¹⁶ Walaupun pasukan Sidenreng bermaksud melewati arah selatan, maka terlebih dahulu harus menembus pertahanan Kerajaan Bone, Soppeng yang bermaksud membantu Inggris. Justru mendapat perlawanan sengit dan dipukul mundur oleh pasukan Bone.¹¹⁷

Kerajaan Bone selalu memperlihatkan Tindakan-tindakan perlawanan yang ditunjukkan, sehingga memaksa *Resident* Makassar, Kapten Wood mengambil kebijakan untuk mengusir semua orang Bone yang bermukim di Makassar, kecuali bagi mereka yang menyatakan kesetiaan kepada pemerintah Inggris. Ketentuan ini berlaku sampai 31 Desember 1814. Mungkin pemerintah Inggris di Makassar menempuh kebijakan ini karena raja Bone, Toapatunru Arung Palakka sulit diajak berunding. Selama bulan Mei 1815 Kapten Wood berada di Batavia, karena itu Letnan Gubernur Jawa dan sekitarnya, Sir Thomas Stamford Raffles, mempercayakan kepada Letnan Jackson untuk sementara menjabat *Resident* Makassar. Namun awal Juni 1815 Kapten Wood tiba kembali di Makassar dan menjabat kembali sebagai *Resident* Makassar, bersamaan dengan itu Kerajaan Bone menyerang

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Rasyid. 1985. *Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan Dari Abad XIV-XIX*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, hlm. 173.

¹¹⁷ Abduh, dkk. *op. cit.* hlm. 46-47. Pada masa pemerintahan Kapten Wood dianggap banyak mengalami kesalahan, berbagai masalah yang ada ditambah lagi beban dana harus diserahkan ke Batavia. Mengenai dana sebesar 6395,65 rupe yang harus diserahkan ke kas pemerintah Inggris di Batavia, lihat surat Caeles Lopey kepada Kapten Wood, tertanggal 21 Agustus 1815 serta mengenai pencurian dan perampokan di Makassar. Koleksi ANRI: Bundel Makassar No. 267.

Kerajaan Soppeng. Inggris berusaha membantu sekutunya, akan tetapi jalan darat menuju Soppeng tampaknya terhalang oleh pasukan Tanete dan Bone. Terpaksa Inggris yang ketika itu berada di bawah pimpinan Letnan Jackson berlayar dari Makassar dan berlabuh di Parepare. Dengan maksud bergerak dari Parepare yang akan berjalan darat menuju Soppeng, tetapi dihalang-halangi oleh pasukan Suppa. Pertempuran tidak dapat dihindari, tetapi pasukan Suppa yang mendapat bantuan dari Alitta, Sawitto, dan Rappang terlalu kuat. Akhirnya pasukan Inggris terpaksa mengundurkan diri dan tidak pernah sampai ke Soppeng, dalam pertempuran ini Letnan Jackson tewas.¹¹⁸

Pemerintah Inggris banyak mengalami kesalahan dalam setiap pertempuran pada masa Kapten Wood, meskipun kerajaan-kerajaan sekutu senantiasa membantu, tetapi amat kurang alat persenjataan, masalah kesehatan pasukan, ditambah beban dana yang harus diserahkan ke Batavia. Menyebabkan pemerintah Inggris di Makassar tidak dapat berbuat banyak. Selain itu banyak juga terjadi pencurian dan perampokan yang didalangi oleh raja-raja lokal yang menentang pemerintah Inggris. Kapten Wood belum berhasil menyelesaikan sikap menentang Kerajaan Soppeng, Suppa, dan Tanete. Pada bulan Oktober 1815 terpaksa harus meninggalkan Makassar, karena telah tiba Mayor D.M. Dalton (1815-1816) untuk menggantikannya sebagai *Resident* Makassar.¹¹⁹ Setelah menjabat jadi *Resident* ia langsung memerintahkan pasukannya beserta pasukan Gowa untuk menyerang pertahanan Tanete di Kalibone dan Sangkara, dua daerah di pinggiran utara Maros. Namun pasukan Inggris dan Gowa tidak dapat menembus pertahanan Tanete yang mendapat bantuan dari pasukan Kerajaan

¹¹⁸ Rasyid. 1985. *op. cit.* hlm. 175-176.

¹¹⁹ *ibid*

Sejak Januari sampai Agustus 1816, Dalton kembali mengerahkan pasukannya beserta sekutunya untuk menggempur pasukan Kerajaan Bone dan Tanete, dan berusaha menyusup ke Makassar dan berusaha menguasai Tallo. Usaha keras yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang diinginkan, alat persenjataan yang tidak memungkinkan dan semakin kuatnya kekuatan musuh, memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke kota Makassar. Bersamaan dengan itu tanggal 25 September 1816 Makassar dan daerah ditaklukkan harus diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda, Inggris ternyata tidak mudah menegakkan supremasinya di Sulawesi Selatan. Selama pemerintah Inggris, ternyata belum mampu mengimbangi kekuatan kerajaan-kerajaan yang menentangnya seperti Kerajaan Bone, Tanete, Suppa, Wajo dan beberapa kerajaan kecil lain. Sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan Inggris dapat dipersempit oleh kerajaan-kerajaan yang menentang, Maros, Bantaeng, Bulukumba adalah tiga wilayah kekuatan Inggris yang berhasil direbut oleh Kerajaan Bone dan sekutunya. Sementara itu Kerajaan Gowa, Soppeng, dan Sidenreng tidak dapat memberi bantuan sepenuhnya.¹²¹

¹²⁰ Ketidakberdayaan pemerintah Inggris menaklukkan raja-raja lokal yang menentang, mengakibatkan hilangnya beberapa sumber ekonomi yang masih dapat dikelola bagi Inggris. Satu-satunya sumber ekonomi yang masih dapat dikelola oleh Inggris adalah penerapan beberapa jenis pajak dalam kota Makassar. Abduh. 1985. *op. cit*, hlm. 47

¹²¹ Pemerintah Inggris ternyata sulit memahami tingkat kesetiaan kerajaan-kerajaan bersekutu, seperti yang dilaporkan *Resident* Makassar, Richard Philips kepada Letnan Gubernur Jawa dan sekitarnya, Sir Thomas Stamford Raffles. Bahwa banyak laporan dari bawahannya yang saling bertentangan, misalnya pada waktu tertentu ada laporan bahwa Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo akan melancarkan serangan terhadap Kerajaan Soppeng. Tetapi pada kesempatan lain diperoleh laporan bahwa raja Bone, raja Gowa, dan raja Soppeng, masing-masing beserta pengiringnya berjalan bersama-sama dari satu desa ke desa lainnya tanpa melakukan persinggahan di tempat tertentu. Rasyid. 1985. *op. cit*, hlm. 203.

PEMULIHAN KEDUDUKAN KEKUASAAN BELANDA

Kekuasaan Inggris berlangsung singkat, hal ini berkaitan dengan kepentingan politik Inggris di Eropa. Untuk melapangkan hubungan Inggris dengan Eropa daratan, pihak Inggris mencanangkan pembentukan negara baru yang dikenal dengan nama Belgia, dengan mengambil sebagian wilayah Belanda dan Perancis. Sehubungan dengan itu pemerintah berjanji akan mengembalikan itu, dan terealisasi pada 19 Agustus 1816. Pemerintah Inggris diwakili oleh Raffles menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Komisaris Jenderal yang terdiri dari Cornelis Theodorus Elout, Godert Alexander Gerald Philips Baron van der Capellen, dan Arnold Adrian Buyskes setelah penyerahan itu, vander Cepellen dilantik menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah pelantikan itu. Gubernur Jenderal mengutus Petrus Theodorus Chasse, mantan gubernur Makassar dan daerah bawahannya. Sebagai komisaris untuk menerima bekas wilayahnya dari gubernur D.M. Dalton (1815-1816), upacara penyerahan berlangsung 25 September 1816.¹²²

Setelah peralihan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke Pemerintah Hindia Belanda, selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda kembali hendak membangun kekuasaan. Pemerintah Hindia Belanda semakin bergiat mengemban politik VOC untuk menempatkan diri sebagai pelindung dan perantara kerajaan-kerajaan. Perundingan antara Inggris dengan Belanda dalam Traktat London 1824, Inggris mengakui kekuasaan dan pengaruh atas pulau-pulau yang berada di sebelah timur semenanjung Malaka, sementara Belanda harus menyerahkan wilayah yang diduduki di negeri Melayu. Traktat ini merupakan awal pengaturan wilayah kepulauan Indonesia di sebelah barat antara Belanda dan Inggris,

¹²² Poelinggomang, 2012. *op. cit*, hlm. 3.

pemerintah Hindia Belanda kemudian menata sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kehadiran kembali pemerintah Belanda dipandang merupakan perpanjangan dari kekuasaan Kompeni (VOC), mendapat reaksi penolakan dari sejumlah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Seperti Kerajaan Gowa dan Bone. Kerajaan Gowa merasa berhutang budi kepada Inggris yang telah berhasil mengambil kembali ornament terpenting dari raja Bone, yaitu *Sudanga* (kelewang peninggalan Lakipadada), yang menjadi alat legitimasi kekuasaan raja. Beralihnya ornament itu ke tangan raja Bone berkaitan dengan peristiwa Batara Gowa I Sangkilang yang berusaha merebut tahta Kerajaan Gowa. Oleh karena itu pemerintah Kerajaan Gowa kecewa pada pemerintah Inggris ketika menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Belanda.¹²³ Karaeng Data menentang penobatan Mappatunru Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Rauf (1816-1825) menjadi raja Gowa. Hal ini berakibat pihak penguasa bersikap lunak terhadap kehadiran dan bahkan kemudian terpaksa menerima bantuan Belanda untuk memerangi Gerakan Karaeng Data.¹²⁴

Sikap penguasa di Sulawesi Selatan itu mendorong pemerintah Hindia Belanda bergiat untuk dapat memulihkan kedudukan kekuasaannya. Untuk maksud itu dibentuk sebuah dewan pada bulan Februari 1824. Dewan ini terdiri dari Joan Hendrik Tobias (utusan pemerintah pusat di Batavia) dan Jan David van

¹²³ Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit.* hlm. 217. Selain menyelesaikan persoalan dengan Kerajaan Gowa, pihak pemerintah Belanda juga menghadapi penolakan dari Kerajaan Bone, sikap ini berkaitan dengan tindakan politik pada periode Kompeni merebut provonsi bagian utara, ketika terjadi gerakan Batara Gowa I Sangkilang. Setelah itu giat memperluas pengaruh kekuasaan hingga ke wilayah Mallusetasi dan membuka bandar baru di parepare. Dalam hal ini diperkirakan bahwa Kerajaan Bone pasti akan melakukan tindakan balasan, sehingga dengan tegas menentang kehadiran Belanda. PaEni, dkk. 2002. *op. cit.* hlm. 174.

¹²⁴ *Ibid.*

Schelle (gubernur Makassar). Tugas awal dewan itu adalah meneliti keadaan politik di Sulawesi Selatan dan mempersiapkan kunjungan gubernur jenderal ke Makassar untuk memperbaiki hubungan politik dan ekonomi dengan penguasa-penguasa lokal di Pangkajene (Sidenreng). Penguasa lokal yang hadir pada pertemuan itu hanyalah raja dan pembesar Kerajaan Sidenreng, Wajo, dan Luwu. Sementara dari pihak pemerintah Belanda hadir Tobias yang didampingi oleh M. Francis sebagai pencatat pertemuan yang berlangsung di bulan Mei 1824.¹²⁵

Tuntutan Karaeng Data dipandang oleh pemerintah Belanda sebagai pernyataan tegas dalam menentang kehadiran Belanda. Oleh karena itu Gubernur Makassar langsung memerintahkan kepada Komandan Militer Kolonel La Fontaine bersama dua orang Kapten, 10 orang opsir, (9 orang Eropa dan 1 orang bumiputera) untuk bergabung dengan prajurit-prajurit Gowa menyerang kedudukan Karaeng Data di Beba. Strategi penyerangan diatur sebagai berikut: pasukan gabungan Belanda dan Gowa menyerang dari arah utara dipimpin oleh Kolonel La Fontaine, sementara pasukan Gowa yang bergabung dalam pasukan bantuan dari Bontolebang dan Polombangkeng menyerang dari arah barat.

Ketika pasukan Kolonel La Fontaine telah mengambil posisi penyerangan, tanpa sepengetahuan para opsir ia mengorganisir sejumlah prajurit untuk langsung ke Beba menemui Karaeng Data. Setelah menemuinya, ia memerintahkan kepada Karaeng Data agar mengikutinya keluar dari Beba. Meskipun dengan berat hati, Karaeng Data memenuhi permintaan La Fontaine dengan dikawal oleh para *cambang* (pengawal pribadi), para pembantunya yang dikenal dengan sebutan *pallapa barambang*, dan sejumlah tentara yang disebut *tubarani*. Semuanya berjumlah 200 orang. Ketika

¹²⁵ Poelinggomang, 2012. *op. cit*, hlm. 4.

rombongan Karaeng Data telah menghampiri pasukan La Fontaine, langsung dikepung dan Kolonel La Fontaine memerintahkan melucuti persenjataan Karaeng Data dan pengikutnya.¹²⁶

Berbagai hal yang harus dibenahi pemerintah Belanda, selain menyelesaikan persoalan kerajaan Gowa, pihak pemerintah Belanda juga menghadapi sikap penolakan kehadirannya dari pihak Kerajaan Bone. Sikap Pemerintah Bone ini tentu berkaitan juga dengan tindakan politiknya pada periode Kompeni merebut provinsi bagian utara ketika terjadi gerakan Batara Gowa I Sangkilang. Setelah itu giat memperluas pengaruh kekuasaan hingga ke wilayah Mallusetasi dan membuka bandar baru di Bacukiki yang disebut Parepare. Dalam hal ini diperkirakan bahwa Kerajaan Bone pasti akan melakukan tindakan balasan sehingga dengan tegas menentang kehadiran Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini berakibat usaha Belanda untuk dapat melaksanakan kekuasaan sesuai dengan perjanjian yang telah dicapai tahun 1667. belum terwujud sesuai yang diharapkan.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Belanda berlaku juga pada sejumlah wilayah bekas koloni Kompeni yang diserahkan. Kemudian pemerintah Belanda juga dihantui oleh perkembangan yang menunjukkan semakin banyak para pengembara dari Eropa yang melakukan perdagangan maritim sambil mencari daerah koloni bagi negerinya. Sebagai contoh Th. S. Raffles yang dengan kegiatannya ingin memperoleh Singapura dan menjadikan Bandar Inggris terpenting bagi perdagangan dengan Cina tahun 1819. Pengembangan Bandar atau kota pelabuhan asing yang baru

¹²⁶ Para pengawal pribadi Kareng Data (Cambang) yang terkenal antara lain: Cambang Manggarai, Cambang Bulu Tanah, Cambang Raulo, Cambang Bissoloro, Cambang Moncongong, Cambang Mangga, Cambang Mamesu, dan Cambang Rubia. Sementara para pembantunya (Pallapa barambang) yang terkenal antara lain: Gunturuna I da Depo, Kilana Sanro Nande, dan Bessi Soronna Garanci Daeng Malala. Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit*, hlm. 262; PaEni, dkk. 2002. *op. cit*, hlm. 176.

pada gilirannya memikat para pelaut dan pedagang bumiputera di wilayah koloni Belanda menjalin hubungan perdagangan dengan para pengembara dan pedagang maritim asing lainnya. Hal ini dipandang mengancam kedudukan kekuasaan Belanda. Kondisi itu memaksa langkah pertama yang diusahakan pemerintah Belanda adalah untuk mencapai kesepakatan dengan pihak Inggris menyangkut peraturan Traktat London tanggal 17 Mei 1824.¹²⁷

Traktat London 1824 antara lain berisi: Pihak Belanda mengakui kedudukan Inggris di Singapura, sementara pihak Inggris berjanji tidak akan mendirikan kantor dagang di pulau-pulau yang merupakan wilayah Johor dan juga tidak melakukan perjanjian dengan penguasa setempat (pasal 12). Belanda bersedia menyerahkan Malaka kepada Inggris (pasal 10) Sementara Inggris menyerahkan koloninya yang berada di Sumatera (pasal 9). Belitung dan daerah taklukkannya (pasal 11) dan mengakui monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan menutup wilayah itu bagi negara asing, tetapi membuka daerah itu bagi perdagangan penduduk pribumi (pasal 7). Pengaturan wilayah kekuasaan itu merupakan pasal-pasal yang mengikuti keputusan penting, yaitu masing-masing berjanji untuk membuka wilayah koloni bagi kegiatan perdagangan (pasal 1).¹²⁸

Usaha dalam melakukan perundingan itu terdorong oleh kenyataan bahwa koloni Belanda di kepulauan itu belum sepenuhnya dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda. Ber-

¹²⁷ Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit.*, hlm. 219

¹²⁸ Selain butir-butir kesepakatan yang telah diungkapkan itu dalam Traktat London itu juga memuat kesepakatan menyangkut pengaturan tarif impor dan ekspor untuk penduduk bumiputera. Dari daerah koloni tidak boleh dipungut lebih dari 10%, dan untuk pedagang asing dikenakan tarif tidak boleh lebih dari dua kali tarif bagi penduduk bumiputera (pasal 2) dan bersama-sama berjanji untuk giat memberantas bajak laut (pasal 5). Poelinggomang, dkk. 2004. *ibid*, hlm. 262; P. H. van der Kamp, *De Geschiedenis van het Londonschape Tractat van 17 Maret 1824* dalam BKI No. 56 1904, hlm. 1-244.

dasarkan Perjanjian Bungaya, secara *de jure* wilayah Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah wilayah pengaruh Belanda, yang disebut Makassar dan daerah taklukannya (*Makassar en Onderhoorigheden*). Namun demikian seluruh wilayah itu dapat terbagi dalam tiga kategori. Pertama adalah daerah yang berada dalam pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintah Belanda yang disebut *gouvernemets Landen*, yang meliputi distrik Makassar, distrik bagian utara (Maros dan Pankajene), distrik-distrik bagian selatan (Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar). Kategori kedua adalah daerah kekuasaan pemerintah yang tidak di bawah pemerintah langsung. Kedudukan kekuasaan dipinjamkan kepada pemerintah lokal, sesuai dengan tradisi kehidupan politik. Dalam hal ini wilayah itu sering disebut juga kerajaan pinjaman (*leen Vorstendon*). Kerajaan yang masuk kategori ini adalah Kaili, Parepare, Tanete, Tallo, Wajo, dan Laiwui. Kategori yang terakhir adalah kerajaan-kerajaan sekutu (*Bondgenootschappedelijke Landen*). Bagi pemerintah Kompeni maupun sesudahnya oleh Belanda, kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan yang menjadi wilayah protektorat, sesuai dengan Perjanjian Bungaya yang menetapkan pihak Kompeni menjadi pelindung dan perantara. Namun kerajaan-kerajaan itu memandang konsep itu menunjukkan kedudukan yang setara, karena negeri mereka bukan wilayah taklukkan dan pemerintahannya tetap mengikuti pola pemerintahan yang telah terbina sejak dulu. Hal ini sering menimbulkan pertentangan dan konflik dan antara pemerintah kerajaan-kerajaan lokal dengan pihak pemerintah Belanda. Kelompok kerajaan yang masuk kategori ini antara lain: Konfederasi Mandar, Toraja, Konfederasi Masenrempulu, Luwu, Konfederasi Ajatappareng, Bacukiki, Nepo, Batu Putih, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sanrobone,

Konfederasi Turatea, Buton, Sumbawa, dan Flores.¹²⁹

Apa yang telah dibangun oleh Belanda baik penataan dan pengaturan pemerintahan, tetap dipertahankan oleh pihak pemerintah Belanda. Pemerintah tidak berkeinginan untuk merubah tatanan yang ada mengingat kehadiran Belanda mendapat tanggapan penolakan. Bahkan diwarnai dengan beberapa gerakan perlawanan kerajaan-kerajaan lokal, sehingga usaha yang dilakukan adalah mempertahankan kedudukan kekuasaan dan belum ke arah perluasan kekuasaan. Namun dalam menghadapi perlawanan itu secara perlahan dan bertahap terjadi perubahan kelompok yang masuk dalam kategori ini. Sebagai contoh sikap perlawanan Kerajaan Bone sehingga pemerintah Hindia Belanda berhasil menaklukkan pada tahun 1860 dan menjadikan kerajaan pinjaman, sehingga statusnya sebagai kerajaan hilang dan terdaftar menjadi anggota kelompok kategori kedua.¹³⁰

PEMBAHARUAN KONTRAK BUNGAYA

Setelah peralihan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke pemerintah Hindia Belanda, kemudian pemerintah Belanda mulai menata kembali kedudukan kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Reaksi dari sejumlah kerajaan lokal, menunjukkan sikap penolakan terhadap kehadiran pemerintah Belanda di Makassar. Reaksi ini mengakibatkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda memandang perlu untuk datang ke Makassar, untuk berunding dengan raja-raja lokal. Sehubungan dengan itu, langkah pertama

¹²⁹ Kerajaan Bone masuk pada kategori ketiga, yaitu kerajaan pinjaman (*leen Vorstendon*). Kedudukan kekuasaan statusnya dipinjamkan kepada pemerintah lokal, sesuai dengan tradisi dan kehidupan politik. Sumber Arsip. 1973, hlm. 263.

¹³⁰ Status Bone sebagai kerajaan pinjaman, adalah daerah taklukan yang dipinjamkan pelaksanaan pemerintahannya kepada penguasa lokal oleh pemerintah Belanda. Poeling-gomang, dkk. 2004. *op. cit*, hlm. 220.

yang diambil adalah membentuk dewan komisi yang terdiri dari Kolonel Jan David van Schele (Gubernur Makassar) dan Mr. Johan Hendrick Tobias. Sebagai tugas komisi ini adalah menyelidiki dan memberikan laporan tentang keadaan Sulawesi Selatan, sekaligus merumuskan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Kini tidak ada lagi Arung Palakka La Tenritata, yang diakui sebagai mitra penakluk Sulawesi Selatan. Kematian Arung Palakka bagi Kompeni, berarti berakhirnya kesulitan untuk menjadi penguasa atau pertuanan di Sulawesi Selatan¹³¹

Gubernur Jenderal Hindia Belanda memutuskan mengirim undangan resmi kepada raja-raja kerajaan sekutu, untuk melakukan perundingan langsung dengan Gubernur Jenderal. Maka yang diutus ke Makassar tanggal 22 Februari 1824 adalah Tobias, dengan membawa undangan dan menyampaikan kepada mereka. Tugas ini dilakukan dengan seksama oleh Tobias dan berusaha mengajak mereka agar bersedia hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Jenderal. Selain itu juga komisi ini giat melakukan pertemuan pendahuluan dengan raja-raja sekutu di Pangkajenne Sidenreng pada bulan Mei 1824. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan mereka menyangkut perjanjian yang pernah dibuat setelah Perang Makassar, sekaligus membujuk mereka agar bersedia dan dapat hadir dalam pertemuan yang direncanakan di Makassar antara Gubernur Jenderal dengan raja-raja kerajaan sekutu. Hadir dalam pertemuan itu antara lain raja dan pembesar Kerajaan Sidenreng, Wajo, dan Luwu dan dari pihak Belanda diwakili oleh Tobias didampingi oleh sekretarisnya M. Francis.¹³²

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Selain datang sendiri ke Batavia, Tobias juga berulang kali mengirim surat ke Gubernur Jenderal van de Capallen.

Kerajaan sekutu mengajukan keluhan menyangkut larangan pelayaran niaga ke Maluku, pembatasan persyaratan perahu, dan kesulitan untuk memperoleh surat keterangan berlayar. Mereka menyatakan juga, bahwa hal itu telah mendorong mereka lebih banyak secara aktif menghancurkan kegiatan perdagangan Belanda dari pada menjalin hubungan niaga. Dalam hubungan ini Tobias atas nama pemerintah Belanda menyatakan bahwa akan membatalkan larangan dan persyaratan perahu yang mengunjungi Makassar, dan mempermudah pengurusan surat keterangan berlayar.¹³³

Usaha-usaha diplomasi oleh komisi yang dibentuk, Gubernur Jenderal Hindia Belanda berangkat ke Makassar pada tanggal 4 Juli 1824. Kehadirannya disambut oleh sejumlah raja dan pembesar kerajaan sekutu, kemudian pada malam harinya diselenggarakan pesta penyambutan. Tiga hari setelah itu datang raja Gowa beserta pembesar kerajaannya menghadap Gubernur Jenderal, membicarakan tentang perjanjian yang pernah dicapai oleh Kompeni, yaitu Perjanjian Bungaya. Setelah itu, datang utusan Raja Bone We Maniratu Arung Data yang dipimpin oleh Arung Lompu beserta anggota *Ade Pitu*. Pada kesempatan itu disampaikan pesan raja Bone antara lain: 1. Meminta agar Belanda mengakui kerajaannya sebagai kerajaan yang merdeka dan sekutu yang setara dengan Belanda. 2. Raja Bone dinyatakan menjadi ketua seluruh raja-raja sekutu di Sulawesi Selatan. 3. Setiap raja yang ingin menghadap pemerintah Belanda harus sepengetahuan dan seizin raja Bone. Tuntutan itu ditolak oleh Gubernur Jenderal dan untuk itu surat dikirim kepada raja Bone agar dalam waktu 15 hari sudah harus

¹³³ Jaminan yang diberikan itu tampak mendapat sambutan yang baik dari pihak kerajaan-kerajaan sekutu, sehingga menyatakan diri bersedia memenuhi undangan dari Gubernur Jenderal. Mappangara. 1996. *op. cit.* hlm. 106-107.

mengubah pendirian itu.¹³⁴

Keputusan ini juga dipandang sebagai suatu strategi untuk memperlunak pendirian Kerajaan Bone, karena kedua kerajaan tersebut merupakan kerajaan sekutu. Tampak Kerajaan Bone tetap pada pendiriannya, sehingga pada pertemuan yang diselenggarakan tanggal 30 Juli 1824 Bone tetap menolak untuk hadir. Kerajaan-kerajaan yang tidak mengirim utusannya pada perundingan itu termasuk Luwu, Soppeng, Suppa, Tanete, dan Mandar. Raja-raja yang hadir antara lain Gowa, Sidenreng, Buton, Sanrobone, Binamu, Bangkala, dan Laikang.¹³⁵ Pada pertemuan itu objek pembicaraan yang utama adalah mengungkapkan kembali perjanjian yang pernah dicapai, Perjanjian Bungaya. Dalam pembicaraan itu tercapai kesepakatan mengubah dan menyesuaikan butir-butir dalam perjanjian terdahulu, dan berhasil dicapai 22 pasal. Pembaharuan Perjanjian Bungaya itu kemudian disebut dengan Kontrak Bungaya di Ujung Pandang (*Bongaijasch Kontract te Oejoeng Pandang*) yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir pada tanggal 27 Agustus 1824.¹³⁶

Isi pokok yang dikandung dalam Kontrak Bungaya, yaitu: dicapainya kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian, per-

¹³⁴ Petta Naba. 1990. *op. cit.* hlm. 183-184. Dan untuk melemahkan kekuatan Kerajaan Bone, maka pemerintah Belanda van der Capellen memutuskan menaklukkan Tanete dan Suppa. Tuntutan itu ditolak oleh pemerintah Belanda, karena Kerajaan Bone mempunyai hak yang sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya.

¹³⁵ Berdasarkan hasil pertemuan awal, sehingga raja Bone menolak hadir pada pertemuan lanjutan untuk membicarakan rencana Pembaharuan Perjanjian Bungaya, yang berlangsung tanggal 30 Juli 1824. Bone menuntut agar dipandang setara, bukan antara protektor dengan protektorat. Dengan ketentuan ini Bone dapat tampil menjadi ketua atas seluruh penguasa lokal. Poelinggomang. 2012. *op. cit.* hlm. 7.

¹³⁶ Gubernur Jenderal Belanda mendapat surat dari raja Tanete (Agangnionjo) yang menyatakan dengan tegas menolak kehadiran Belanda demikian juga dengan Kerajaan Suppa. Kenyataan ini mendorong kepada pemerintah Belanda untuk mengirim segera ekspedisi menaklukkan Tanete dan Suppa. Keputusan ini juga dipandang sebagai strategi untuk memperlunak pendirian Kerajaan Bone. Karena kedua kerajaan itu adalah sekutu. Sumber Arsip. 1973. *op. cit.* hlm. 294.

sahabatan, dan persekutuan antara pemerintah Hindia Belanda dan raja-raja di Sulawesi (pasal 1); menempatkan pemerintah Belanda menjadi pemimpin utama dari persekutuan dan bertindak sebagai perantara, dan pelindung persekutuan (pasal 2); tidak ada yang dipandang superior di antara anggota persekutuan, karena setiap kerajaan dipandang merdeka dan berdaulat (pasal 3); raja Bone dan Gowa dipandang sebagai anggota tertua dari persekutuan (pasal 4); sahabat dan atau musuh Belanda menjadi juga sahabat dan atau musuh kerajaan-kerajaan sekutu (pasal 5). Dalam kontrak itu juga dimuat hal-hal yang berkaitan dengan peraturan batas wilayah (pasal 6); penyelesaian sengketa antara anggota persekutuan melalui dewan sekutu di Ujung Pandang (pasal 7) demikian juga dengan perselisihan kecil (pasal 8) raja-raja sekutu berjanji untuk tidak saling berperang (pasal 9) dan tindak kejahatan yang berat dengan ancaman hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas perintah raja dan dewan hadat kerajaan (pasal 10). Pada pasal terakhir (pasal 22), selain dinyatakan agar sesama raja dan juga kemudian selanjutnya dapat mentaati kesepakatan ini, juga memuat pernyataan kepada raja Bone bahwa apabila dalam waktu dua bulan tetap tidak bersedia menyetujui kontrak, maka akan kehilangan haknya sebagai anggota tertua dari persekutuan itu.¹³⁷

Pasal terakhir dari kontrak tersebut tercatat raja-raja yang hadir, kemudian ikut menandatangani kontrak itu, yaitu raja-raja dari Makassar (raja Gowa dan Tallo), Sidenreng, Tanete, Buton, Sanrobone, Binamu, Bangkala, Mandar, Barru, dan Suppa dipandang oleh pemerintah Belanda dipengaruhi oleh hasutan dari

¹³⁷ Daeng Patunru, dkk. 1989. *op. cit*, hlm. 239. Berhubung surat jawaban dari Arumpone itu, yang menolak datang untuk menghadiri pertemuan. Maka pada tanggal 30 Juli 1824, Gubernur Jenderal Belanda membuat perjanjian baru dengan raja-raja yang mau bekerjasama. Naskah lengkap pembaharuan Kontrak Bungaya dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan diambil dari sumber Arsip, dkk. 1973. *op. cit*, hlm. 294-297.

Kerajaan Bone. Itulah sebabnya hanya dicantumkan pernyataan yang merupakan ancaman terhadap kerajaan-kerajaan itu, dan tidak kepada kerajaan-kerajaan sekutu yang lain. Pihak pemerintah juga memandang bahwa kerajaan-kerajaan yang lain akan bersedia menandatangani kontrak, jika Kerajaan Bone dapat dipaksakan untuk mentaatinya.¹³⁸

Van der Capellen pada bulan September 1824, meninggalkan Makassar selesai mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Beberapa lama berselang keberangkatan van der Capellen, pasukan Bone melakukan ekspansi ke daerah milik pemerintah Belanda di Maros dan Pangkajene. Dua kerajaan ini memihak kepada Belanda sewaktu menyerang daerah Tanete, yang mana kedua daerah ini merupakan daerah penghasil beras utama di daerah ini. Penguasaan kedua daerah ini, memungkinkan untuk memaksa pemerintah Hindia Belanda membicarakan kembali hal ikhwal sehubungan dengan kedatangannya kembali di daerah ini. Penguasaan atas daerah ini dari strategis militer adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena daerah Maros merupakan pintu masuk ke wilayah Bone dari jalur barat. Sebagai lumbung padi di Sulawesi Selatan, penguasaan Maros dapat digunakan sebagai benteng. Dari segi geografis daerah Bone jika hendak diserang lewat selatan, jadi penguasaan atas Maros memang mutlak diperlukan.¹³⁹

Kembaliya pasukan Bone ini dapat menjelaskan, bahwa prajurit-prajurit Kerajaan Bone bukan sepenuhnya prajurit yang

¹³⁸ Sumber Arsip. 1973. *ibid*, hlm. 296. Sampai pada tahun 1838 hubungan Bone dengan Belanda dalam keadaan tak menentu. Pemerintah Hindia Belanda menuduh Kerajaan Bone sebagai juru bicara bagi kelompok-kelompok yang tidak ikut menandatangani Perjanjian Bungaya yang telah diperbaharui pada akhir tahun 1824.

¹³⁹ Sebelum van de Capellen meninggalkan Makassar, ia memerintahkan untuk menyerang Suppa dan Tanete. Penyerangan ini erat kaitannya atas penolakan kedua kerajaan kecil ini untuk ikut serta dalam memperbaharui Perjanjian Bungaya 1824.

dipersiapkan untuk berperang. Mereka merupakan pasukan cadangan atau amatir yang turut serta dalam perang, karena adanya perintah dari atasannya. Mereka hanya petani di daerah *palili* yang setiap waktu menyediakan tenaga untuk berperang, yang merupakan salah satu kewajiban di daerah *palili*. Rakyat di daerah *palili* juga amat memperhatikan di bidang pertanian, sekaligus mereka selalu siap sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk perang. Ini penting, karena persediaan makanan bagi kerajaan harus dijaga dengan baik, tanpa persediaan makanan segalanya dapat menjadi musnah, termasuk kelangsungan hidup mereka. Namun secara keseluruhan, pasukan Belanda di bawah pasukan Kolone Bischoof mengalami kegagalan dalam misinya untuk menghancurkan Kerajaan Bone. Kegagalan itu tidak saja disebabkan oleh cuaca yang tidak menguntungkan, tetapi juga karena strategi bidang militer.¹⁴⁰

Sebagai Komisi tertinggi pemerintah Hindia Belanda, Mr. J. M. Tobias mengambil inisiatif untuk datang sendiri ke Batavia, tujuannya melaporkan bagaimana sebenarnya situasi terakhir yang terjadi di Makassar. Tujuan utamanya ini dilakukan adalah untuk meyakinkan kepada pemerintah Hindia Belanda, bahwa sangat diperlukan untuk memberi pelajaran kepada Kerajaan Bone yang sudah bertindak terlalu jauh. Jika keadaan yang demikian tidak ditanggulangi secepat mungkin, maka Kerajaan Bone akan mengancam keberadaan pasukan pemerintah Hindia Belanda. Ancaman itu tidak hanya dari segi politik, tetapi juga

¹⁴⁰ Gerak gerik pasukan militer Belanda dengan mudah dapat dipantau oleh pasukan Kerajaan Bone yang menempatkan diri dalam tempat perlindungan yang kedudukannya lebih tinggi, dan dengan mudah dapat mengatur kapan menyerang dan kapan bersembunyi dari serangan musuh. Kegagalan pasukan di bawah pimpinan Bischoof, Ini sangat mengecewakan pimpinan tertinggi Belanda. Dalam Mattulada pasukan tambahan yang masih segar persenjataan baru yang telah dipersiapkan dengan matang. Tetapi rencana itu terhalang, karena datangnya musim hujan yang amat lebat, medan pertempuran melawan rintangan alam terlalu berat, sedangkan pasukan-pasukan Bone dan Tanete yang bertahan di kubu-kubu gunung batu di dataran tinggi Camba. Mattulada. 1998. *op. cit.* hlm. 340.

mengganggu perekonomian pemerintah, karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekitar kawasan Belanda memberikan dampak pada sistem perdagangan. Kemudian pasukan-pasukan Bone sering melakukan blokade-blokade bagi kapal-kapal yang akan mengunjungi pelabuhan Makassar. Jika pasukan pemerintah Hindia Belanda menunda-nunda untuk melancarkan satu serangan sesegera mungkin, ini berarti memberi waktu bagi Kerajaan Bone mempersiapkan diri. Apabila yang terakhir ini dilakukan, maka pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengambil waktu yang cukup lama untuk menaklukkan Bone.¹⁴¹

Setelah Agresi Belanda yang dilancarkan ke Bone, akhirnya menghasilkan keputusan politik yang berarti. Belanda tidak berhasil memaksakan kehendaknya, agar Bone dapat mematuhi isi dari Perjanjian Bungaya yang sudah diperbaharui pada tahun 1824. Kegagalan ini menjadikan hubungan Belanda dan Bone menjadi renggang. Setelah seluruh pasukan Belanda meninggalkan wilayah Kerajaan Bone, Raja Bone bersama pembesar-pembesarnya kembali ke Bone dan perlahan-lahan membangun Bone. Namun usaha ini sedikit terlambat, karena munculnya konflik di antara para bangsawan Kerajaan Bone. Terutama terhadap kebijakan yang terus ditempuh sehubungan dengan hadirnya Belanda di Kerajaan Bone.

Kehadiran Belanda, mengakibatkan adanya konflik antara golongan yang pro dan kontra. Nampak setelah agresi militer yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824-1825. Pada kenyataannya, Bone menolak menandatangani Perjanjian Bungaya yang telah diperbaharui. Sejak tahun 1825 timbul dua

¹⁴¹ Misi Tobias berhasil meyakinkan pimpinan pemerintahan pusat Hindia Belanda di Batavia. Maka untuk melaksanakan penaklukan itu ditunjuklah Jenderal van Geen memimpin ekspedisi perang I Belanda ke Sulawesi Selatan, untuk menaklukkan Kerajaan Bone. *ibid*, hlm. 341.

golongan pendapat yang berlawanan, yang dianut oleh pembesar Kerajaan Bone. Kedua golongan pendapat yang berlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Golongan pertama, pendirian Arumpone Sultana Saleha Rabiutuddin didukung oleh Arung Lompu dan *Punggawa* (panglima perang) Kerajaan Bone serta sebagian pembesar pemerintahan pusat Kerajaan Bone. Pendirian dari golongan ini sama sekali menolak adanya niat dan usaha perdamaian dengan pemerintah Hindia Belanda.
2. Golongan kedua, dipelopori oleh Mangkubumi Kerajaan Bone *Tomarilalang* La Mappangara Arung Sinri didukung oleh sejumlah pembesar Kerajaan Bone lainnya. Golongan ini bersikap moderat, mereka menerima usaha yang bersifat kompromi. Selain itu menerima perdamaian dan persekutuan dengan Belanda, dengan harapan Kerajaan Bone terhindar dari kehancuran yang dilanda peperangan.¹⁴²

Raja Bone We Maniratu Arung Data selalu mengambil sikap anti terhadap orang asing, khususnya Belanda. Meskipun ekspedisi yang besar dilancarkan pada tahun 1825 untuk menghukum Kerajaan Bone yang dianggap membangkang terhadap Perjanjian Bungaya yang diperbaharui. Namun hal itu tidak membuat adanya perubahan berarti pada hubungan Belanda dan Bone. Dendamnya Raja Bone We Maniratu Arung Data terhadap Belanda, dan menyuruh kepada anak buahnya untuk membunuh satu orang Belanda apabila menginjakkan kakinya di kerajaannya.¹⁴³

¹⁴² Jabatan *Tomarilalang* bukanlah jabatan yang diperoleh karena prestasi besar yang pernah dilakukan, tetapi berkaitan erat dengan pendahulu-pendahulunya. Jabatan ini hanya diduduki bagi mereka yang telah mempunyai keturunan yang memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu jabatan *Tomarilalang* tidak saja besar, tetapi juga berasal dari luar wilayah kekuasaannya. Poelinggomang, dkk. 2004. *op. cit*, hlm. 232.

¹⁴³ Daeng Patunru, dkk. 1989. *op. cit*, hlm. 253.

Keadaan ini membuat di dalam Kerajaan Bone terpecah belah, secara tradisional hubungan antar raja dengan *Tomarilalang* sangat dekat dan erat. Tidak saja oleh sejarahnya yang panjang, tetapi juga karena keduanya ingin menjalin kerjasama untuk membentuk suatu kekuatan. Kerjasama yang biasa dibangun lewat perkawinan, seperti halnya dengan *Tomarilalang* La Mappangara yang memiliki hubungan darah dengan raja Bone. Kerajaan Bone telah berhasil membangun satu bentuk kekuatan sejak hak-hak istimewa yang didapatkannya dari Belanda. Lewat perkawinan dan penaklukan-penaklukan, Kerajaan Bone kini tidak saja menjadi saingan Belanda, tetapi juga menjadi lawan yang tidak dapat diremehkan. Ikatan perkawinan yang dilakukan hampir seluruh kerajaan lokal telah menjadikan Kerajaan Bone menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar.

PASANG SURUT PERLAWANAN WE MANIRATU ARUNG DATA



Setelah menerima penyerahan kekuasaan atas wilayah Makassar dan Daerah Takluknya dari pihak Inggris pada 7 Oktober 1816,¹⁴⁴ pemerintah Belanda mulai menata kembali kedudukan kekuasaan kolonialnya di Sulawesi Selatan. Namun, upaya pemulihan kedudukan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena sejumlah kerajaan di daerah ini bukan hanya menolak dan menentang kehadirannya, tetapi beberapa di antaranya juga tidak bersedia bekerjasama dan memenuhi undangan pertemuan dengan Belanda. Bukan hanya itu karena Kerajaan Bone dan sekutunya (Kerajaan Tanete dan Suppa) juga tidak menerima dan menolak menandatangani Kontrak Bungaya yang diperbaharui pada 1824. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memutuskan untuk melancarkan serangan militer terhadap ketiga kerajaan tersebut.

Serangan militer itulah yang memicu terjadinya konflik terbuka berupa perang antara Bone dan sekutunya dengan Belanda.

¹⁴⁴ Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (TNI) Jilid II*, hlm. 174. Namun sumber lain menyebutkan bahwa serah terima itu berlangsung pada tanggal 25 September 1816 (Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), hlm. 56-57.

Namun pada penghujung perlawanan ketiga kerajaan itu, pasukan Belanda akhirnya keluar sebagai pemenang dan berhasil menaklukkan ketiga kerajaan yang menentang Belanda. Atas kekalahan itu, Tanete dan Suppa terpaksa harus menandatangani pembaharuan Kontrak Bungaya. Sementara Bone bukan hanya harus kehilangan kedudukannya sebagai mitra setara dan ketua persekutuan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, tetapi juga terpaksa melepaskan kekuasaannya atas sejumlah daerah di *Noorder Provincie* (Provinsi Bagian Utara) dan *Zuider Provincie* (Provinsi Bagian Selatan). Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang itu, maka dalam pembahasan bab ini difokuskan pada uraian tentang dinamika perlawanan We Maniratu Arung Data mulai dari awal hingga akhir, serta perubahan sosial pasca perlawanan.

Awal Perlawanan

Ketika pemerintah Belanda kembali berkuasa setelah lima tahun daerah ini dikuasai Inggris, timbul kesulitan baru yang dihadapi oleh Belanda karena sikap yang diperlihatkan oleh Kerajaan Bone dan sekutunya. Sikap yang demikian itu tampaknya tidak terlepas dari perkembangan keadaan politik di Sulawesi Selatan setelah Perang Makassar (1667-1669). Perang yang diakhiri dengan Perjanjian Bungaya itu, bukan hanya menjadi awal bagi kejayaan Bone dalam sejarah di Sulawesi Selatan, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Bone. Satu di antara sekian banyak keuntungan yang diperoleh kerajaan ini adalah konsensus yang menempatkan Bone sebagai perantara bagi kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini dalam berhubungan

dengan VOC¹⁴⁵ Oleh karena itu, Bone tumbuh menjadi satu-satunya kerajaan yang terkuat di jazirah selatan Sulawesi. Ketika Arung Palakka menjadi raja Bone (1672-1696), ia berusaha untuk memperluas wilayah dan pengaruh kekuasaannya. Selain melakukan penaklukan terhadap kerajaan lain yang dianggap sering membangkang, ia juga mengembangkan kekuasaannya melalui perkawinan politik, sehingga jaringan kekeluargaan Bone menjangkau hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan.¹⁴⁶ Itulah sebabnya ketika Bone berkonflik dengan Belanda, tidak sedikit dari kerajaan yang mempunyai jaringan kekeluargaan memihak dan memberikan bantuan kepada Bone.

Seiring dengan tanda-tanda keruntuhan VOC, Bone semakin memperluas wilayah dan pengaruh kekuasaannya, sehingga menjadi satu kerajaan yang sangat disegani di Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah kekuasaan VOC yang merupakan penghasil utama beras, baik di *Noorder Provincie* (Provinsi Bagian Utara) maupun di *Zuider Provincie* (Provinsi Bagian Selatan) berada di bawah pengaruh kekuasaan Bone dan Tanete.¹⁴⁷ Itulah sebabnya Bone dan sekutunya (terutama Tanete dan Suppa) menolak dan menentang kehadiran Belanda di Sulawesi Selatan. Sebab kehadiran kembali Belanda di daerah ini, bukan hanya mengancam eksistensi kerajaan-kerajaan itu, tetapi juga mengancam pengaruh dan kekuasaan mereka atas sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.

¹⁴⁵ Keuntungan lain yang diperoleh oleh Arung Palakka dan Kerajaan Bone adalah terbebasnya Kerajaan Bone dari cengkraman kekuasaan Kerajaan Gowa (Andaya, Leonard Y., 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Ininawa, hlm. 123; Poelinggomang L. Edward, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 116.

¹⁴⁶ Mappangara, Suriadi, 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone – Belanda 1816-1860*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarja Universitas Gadjah Mada, hlm. 2; Andaya, 2004, *op. cit.*, hlm. 375.

¹⁴⁷ Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press, hlm. 333; Kadir, Harun, dkk., 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 51-52.

Bahkan tidak sedikit kerajaan di daerah ini yang menyandarkan kewibawaan dan kekuatannya pada Bone.¹⁴⁸ Oleh karena itu, penolakan Bone dan sekutu atas kehadiran Belanda, antara lain karena mereka tidak rela pengaruh dan kedudukan kekuasaan atas sejumlah wilayah dan kerajaan di daerah ini beralih kepada Belanda.¹⁴⁹

Penolakan Bone dan sekutunya atas kehadiran Belanda, juga dilatari oleh kekecewaan terhadap Belanda yang telah menyerahkan kekuasaan tanpa perlawanan kepada Inggris atas wilayah Makassar dan Daerah Takluknya pada 1811. Padahal berdasarkan Perjanjian Bungaya (Pasal 6) bahwa Portugis dan Inggris harus diusir dari Makassar. Oleh karena itu, Bone dan sekutunya menganggap bahwa Belanda sudah tidak mematuhi Perjanjian Bungaya yang memperbolehkan Inggris berkuasa di daerah ini pada 1811-1816. Selain itu, juga karena keengganan Belanda untuk mengakui hak-hak istimewa Bone yang diperolehnya pada masa VOC. Hal inilah yang menyebabkan hubungan antara Bone dan sekutunya dengan Belanda menjadi tegang yang kemudian berujung pada timbulnya konflik antara kedua belah pihak. Pada awalnya Raja Bone We Maniratu Arung Data (1823-1835) bersikap lunak terhadap Belanda dengan harapan bahwa mereka dapat mengembalikan hak-hak istimewa Bone, yang selama Inggris berkuasa tidak diakui lagi. Namun harapan itu tidak kunjung datang, bahkan Belanda melanjutkan kebijakan yang telah diambil Inggris.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Kadir, dkk., *op. cit.*, hlm. 52; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁴⁹ Amir, Muhammad, dkk., 2012. *Konflik dan Perubahan Sosial, Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: De La Macca, hlm. 271.

¹⁵⁰ Hak-hak istimewa Kerajaan Bone itu antara lain, Bone merupakan mitra setara dengan Belanda, sebagai ketua persekutuan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan, dan semua kerajaan yang akan berhubungan dengan Belanda harus melalui perantaraan Bone (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 3).

Penolakan Belanda atas keinginan Bone itu, dibalas pula dengan penolakan Bone atas kehadiran Belanda kembali di Sulawesi Selatan. Konflik antara kedua belah pihak semakin meruncing ketika Belanda mengundang para penguasa kerajaan di Sulawesi Selatan, untuk membicarakan pembaharuan Kontrak Bungaya. Sebab, sejumlah penguasa kerajaan menolak dengan tegas undangan pertemuan itu, termasuk Tanete dan Suppa. Sementara Raja Bone We Maniratau Arung Data hanya mengirimkan utusan (La Mappaewa Arung Lompu dan anggota dewan adat) untuk menghormati kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen, dan menyampaikan tuntutan Bone bahwa semua penguasa kerajaan di Sulawesi Selatan yang akan berhubungan dengan Belanda di Makassar harus dengan perantaraan raja Bone. Van der Capellen menolak tuntutan itu dan memberi waktu 15 hari kepada raja Bone untuk berpikir dan mengubah sikapnya. Penolakan itu sangat mengecewakan Raja Bone We Maniratu Arung Data, sehingga dibalas pula dengan penolakan untuk menghadiri pertemuan lanjutan mengenai pembaharuan Kontrak Bungaya. Itulah sebabnya Van der Capellen memutuskan untuk menaklukkan Tanete dan Suppa, karena kedua kerajaan ini telah bekerjasama dengan Bone menentang Belanda. Tindakan tersebut juga dimaksudkan sebagai ancaman langsung kepada raja Bone, agar segera dapat mengubah sikap politiknya.¹⁵¹

Keputusan Belanda untuk melakukan penaklukan terhadap Tanete dan Suppa melalui serangan militer memicu terjadinya konflik berupa perang antara kedua belah pihak pada 1824.

¹⁵¹ Poelinggomang, Edward L., 2005. *Sejarah Tanete, Dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru*. Pemda Barru: Laporan Penelitian, hlm. 110; Petta Nabba, Andi Palloge, 2006. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Makassar: Yayasan Al – Muallim, hlm. 182; Daeng Patunru, Abdul Razak, 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 239.

Serangan Belanda di bawah pimpinan Kolonel H. van de Stuers terhadap Tanete pada pertengahan Juli 1824, mendapat perlawanan dari laskar Tanete di bawah pimpinan Raja Tanete La Patau. Namun pada penghujung perlawanan itu laskar Tanete mengalami kekalahan, sehingga La Patau terpaksa melarikan diri dan harus menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya Daeng Tanisanga. Atas kekalahan itu, Daeng Tanisanga terpaksa pula harus menandatangani pembaharuan Kontrak Bungaya dan menerima kedudukan kekuasaan sebagai raja pinjaman. Meskipun demikian, La Patau tetap berjuang dan senantiasa melakukan perlawanan, sehingga pemerintah Belanda berulang kali pula melakukan penyerangan terhadap kedudukan La Patau bersama pasukannya. Selain itu, ia juga tetap berusaha untuk memulihkan kembali kedudukan Tanete sebagai kerajaan yang merdeka, namun selalu mengalami kegagalan. Itulah sebabnya La Patau kemudian merubah sikapnya dan bersedia bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia pun diangkat menjadi raja pinjaman di Kerajaan Tanete.¹⁵²

Berbeda halnya dengan serangan Belanda di bawah pimpinan Letkol Buys untuk menaklukkan Suppa pada awal Agustus 1824, karena ternyata mengalami kegagalan. Sebab, Suppa yang mendapat dukungan dan bantuan dari sekutu-sekutunya, terutama kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng (kecuali Sidenreng) memberikan perlawanan sengit, sehingga pasukan Belanda bukan hanya tidak dapat menembus benteng pertahanan Suppa, tetapi juga mengalami banyak korban jiwa. Demikian pula serangan

¹⁵² Stuers, H. van de, 1854. *De Expeditie Tegen Tanette en Soepa in 1824*, dan *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Volume 59, hlm. 374-380; Asba, A. Rasyid, 2010. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis, Raja Tanete Lapatau Menentang Belanda*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 95-115; Abduh, Muhammad, 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, Hlm. 71-73.

Belanda berikutnya yang dipimpin oleh Kolonel H. van de Stuers pada pertengahan Agustus 1824, yang sebelumnya sukses menaklukkan Tanete, namun gagal menaklukkan Suppa.¹⁵³ Bahkan pasukan Belanda yang semula berjumlah 228 orang kemudian ditambah menjadi 384 orang (selain kelasi) yang dalam tujuh pertempuran, menderita 59 orang terbunuh dan 168 orang terluka semuanya dengan senjata api. Juga sebanyak 16 orang terbunuh dan 53 orang terluka dari pasukan marinir dan kelasi.¹⁵⁴

Atas kekalahan tersebut, pasukan Belanda memutuskan untuk mengubah taktik dan strategi penyerangan menjadi suatu blokade. Tugas ini dipercayakan kepada Kapten van Doornum bersama seorang perwira dan 100 orang serdadu artileri yang dilengkapi dengan 2 pucuk meriam, serta 2 orang *huzaar*. Juga sebuah kapal meriam ditempatkan sebagai pelindung dan dua buah kapal layar yang berfungsi untuk menjelajahi pantai di sepanjang antara Suppa dan Maros.¹⁵⁵ Pasukan Belanda lainnya dengan kapal perang

¹⁵³ Sumber Arsip, 1854. Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes, dalam *Tijdschrift vooe Nederlandsch Indie TNI*, Jilid II, hlm. 179. Salah satu pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan laskar Suppa terjadi pada 30 Agustus 1824, yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit di kedua belah pihak. Kerugian di pihak pasukan Belanda 22 orang terbunuh termasuk Letnan Sterk, 53 orang pasukan infanteri terluka termasuk Kapten Pohl, 17 orang marinir dan kelasi terluka, dan satu orang artileri terluka. Jumlah seluruhnya 22 orang terbunuh dan 71 terluka dari 306 orang serdadu Belanda (Stuers, 1854, *op. cit.*, hlm. 380-388). Sumber lain menyebutkan bahwa penyerbuan terhadap Suppa yang dilancarkan pada 30 Agustus 1824, oleh satu detasemen pasukan angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Letnan Fokker. Namun serangan Belanda inipun mengalami kegagalan karena pasukan Suppa tetap bertahan dengan gigihnya. Pada pertempuran ini pasukan Belanda menderita kerugian 22 orang serdadu tewas termasuk Letnan Strek, dan 71 orang luka berat termasuk Kapten Pahl (Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 69).

¹⁵⁴ Sementara kerugian dari bantuan pasukan sekutu Belanda terutama di pihak Sidenreng tidak diketahui. Demikian pula dari pihak Suppa dan sekutunya (Sawitto, Alitta, dan Rappang) tidak terdapat keterangan tentang jumlah korban secara pasti (Stuers, 1854, *op. cit.*, hlm. 388).

¹⁵⁵ Kapten van Doornum bersama pasukannya bertahan di Suppa sampai akhir September 1824. Namun ketika penyakit melanda pasukannya di daerah itu, mereka terpaksa menarik diri (Sumber Arsip, 1854, Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes, dalam *TNI, loc. cit.*). Sementara pasukan Sidenreng yang ingin memanfaatkan sikap sebelumnya ditarik ke Sedanga; lima desa dibakar dan ternaknya dirampas. Mereka menderita dua orang terbunuh dan 15 orang terluka (Stuers, *loc. cit.*).

Eurydice dan kapal angkut *Syrena* diperintahkan untuk kembali berlayar ke Makassar (perintah tanggal 1 September). Pada 5 September 1824 pasukan Belanda yang dipimpin oleh Stuers itu ditarik ke Makassar, tanpa memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Belanda.¹⁵⁶

Kegagalan Belanda menaklukkan Kerajaan Suppa hingga awal September 1824, mendorong Raja Bone We Maniratu Arung Data memerintahkan laskar Bone yang bertahan di Lamuru dan Camba kembali melancarkan serangan terhadap kedudukan pasukan Belanda di Segeri, Labakkang, Pangkajene, dan Maros. Daerah-daerah yang merupakan penghasil utama beras di Sulawesi Selatan ini berhasil direbut kembali dari pendudukan pasukan Belanda yang dikuasai setelah penaklukan Tanete. Penguasaan Bone atas sejumlah daerah itu memungkinkan untuk memaksa Belanda membicarakan kembali hubungan antara kedua belah pihak. Selain itu, penguasa atas daerah ini dari segi strategi militer adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebab, daerah ini merupakan pintu masuk wilayah Bone dari jalur barat. Oleh karena itu, daerah ini dapat digunakan sebagai benteng, dan dari segi geografis daerah Bone jika sekiranya hendak diserang lewat selatan, maka penguasaan sejumlah daerah ini adalah mutlak diperlukan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Stuers, 1854, *loc. cit.*; Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 70. Kerajaan Suppa baru dapat ditaklukkan setelah pemerintah Belanda melancarkan serangan militer secara besar-besaran di bawah dipimpin Mayor Jenderal Van Geen pada akhir Juli 1825. Atas kekalahan itu, Suppa, Sawitto, Alitta, dan Rappeng terpaksa harus menandatangani pembaharuan Kontrak Bungaya pada tanggal 11 Agustus 1825 (Morris, D.F. van Braam, 1890. Nota van Toelichting op het Contract Gesloten met het Landschap Sawieto (Adjataparang) op den 30 Sten Oktober 1890, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde (TBG) Tahun 1893, Jilid XXXVI*, hlm. 228; Anonim, 1910. Nota van Toelichting bij de Korte Verklaring Geteekend en Beeedigd door den Adatoewang en de Hadatsleten van het Landschap Sawito op 27 sten Mei 1908, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde (TBG) Jilid LII*, hlm. 80).

¹⁵⁷ Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 223; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 113-114.

Pada 19 September 1824, sekitar 2000 - 3000 laskar Bone melancarkan serangan terhadap kubu pertahanan pasukan Belanda di Labbakkang. Atas serangan itu pasukan Belanda dibawah pimpinan Letnan Gilliam terpaksa meninggalkan pos pertahanannya di Labbakkang.¹⁵⁸ Selanjutnya, laskar Bone melancarkan serangan terhadap pos pertahanan pasukan Belanda di Pangkajene. Meskipun pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Grunewalte memberikan perlawanan atas serangan itu, namun mereka berhasil dikalahkan dan pos pertahanannya dapat dihancurkan oleh laskar Bone. Setelah itu, laskar Bone menyerang kubu pertahanan pasukan Belanda di sekitar Maros. Dalam penyerangan itu, laskar Bone terlebih dahulu menghancurkan pos-pos pertahanan Belanda yang lebih kecil dan berusaha menghindari induk pasukan Belanda yang lebih kuat.¹⁵⁹

Setelah berhasil menguasai pertahanan pasukan Belanda di Labbakkang, Pangkajene, dan daerah sekitarnya, laskar Bone menyerang kedudukan Belanda yang berada di Maros. Oleh karena penguasaan medan perang, serta jumlah pasukan yang lebih besar, serangan laskar Bone ini mendapat hasil yang sangat menggembirakan. Benteng Belanda "Valkenburg" yang berada di Maros diduduki, bahkan beberapa orang serdadu Belanda terbunuh, termasuk pimpinan pasukan Belanda. Jumlah korban yang tewas dalam pertempuran itu sebanyak 84 orang serdadu Belanda, 17 orang serdadu pribumi dan dua orang opsir, serta menyita dua pucuk senjata meriam. Jumlah laskar Bone yang tewas kurang lebih 800 orang.¹⁶⁰ Kekalahan ini sangat menyakitkan pihak

¹⁵⁸ Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *TNI, op. cit.*, hlm. 179-180. Mappangara, Suriadi, 2012. I Manneng Arung Data, Ratu Bone Yang Menolak Kehadiran Belanda. Makalah pada Seminar "Penggalian Nilai-nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV, di Watampone, pada 5 November 2012.

¹⁵⁹ Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 51.

¹⁶⁰ Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *TNI, op.*

Belanda. Tidak hanya karena jumlah korban yang jatuh cukup banyak, tetapi juga hal ini berkaitan dengan prestise Belanda sendiri. Ketika kekuasaan ingin ditegakkan dan diharapkan dapat menjadi sandaran hidup beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah ini, kekalahan dalam pertempuran itu terasa sangat menyedihkan. Pemerintah Belanda kemudian mengirimkan beberapa puluh pasukannya ke Pangkajene dan Maros untuk mempertahankan wilayah itu yang sangat terancam. Pos-pos pertahanan Belanda yang masih dapat dipertahankan diperkuat dengan tambahan serdadu sebanyak 253 orang.¹⁶¹

Dalam satu pertempuran yang terjadi di sekitar Bonto-Bonto pada 18 Oktober 1824, laskar Bone berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang dibantu dengan pasukan dari Kerajaan Gowa. Pertempuran ini berawal ketika laskar Bone di Bulu Sepon mengancam kedudukan pasukan Belanda, sehingga Kapten Le Clerg berangkat menyongsong mereka dengan kekuatan 218 orang pasukan, baik serdadu Belanda maupun pribumi, dan 4 pucuk meriam yang dibantu oleh pasukan Kerajaan Gowa. Laskar Bone yang melihat Kapten Le Clerg mendekat segera mundur ke Tammate dan melancarkan serangan terhadap pasukan Gowa yang menjadi sayap pasukan Belanda. Pada pertempuran itu, Kapten Le Clerg dan Letnan Weits terbunuh beserta ratusan pasukan Gowa.¹⁶²

Selain di bagian utara, keberadaan Belanda di wilayah selatan juga tidak luput dari serangan laskar Bone. Kedudukan Belanda

cit., hlm. 180; Perelaer, M.T.H., 1872, *De Bonische Expeditie; Krijgsgebeur of a Celebes in 1859 en 1860*. Leiden: Gualth Kolt, hlm. 80. Menurut Abdul Razak Daeng Patunru, bahwa jumlah yang mati dalam pertempuran itu sebanyak kurang lebih 100 orang (Daeng Patunru, Abdul Razak, 1989. Sejarah Bone. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 245).

¹⁶¹ Jumlah laskar Kerajaan Bone berjumlah kurang lebih 25.000 orang. Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 223-224; Mappangara, *op. cit.*, hlm. 114-115.

¹⁶² Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *TNI, loc. cit.*; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 115; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 224.

di Bantaeng dan Bulukumba mendapat giliran untuk diserang pada Oktober 1824. Dalam pertempuran itu, laskar Bone berhasil membunuh Letnan Simonius. Namun demikian, pertahanan Belanda di kedua wilayah itu yang dipimpin oleh Kapten Vroom tetap bertahan. Perlawanan gencar yang diprakarsai Kerajaan Bone itu, memaksa penguasa Belanda yang berada di Makassar, Kolonel Van Schelle mendesak pemerintah Belanda di Batavia, agar secepatnya mengirimkan bantuan pasukan dan persenjataan yang memadai untuk melakukan penyerangan terhadap Bone. Sebab kerajaan itu merupakan salah satu pusat perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan.¹⁶³

Permohonan bantuan itu mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Pasukan Belanda yang terdiri atas 400 serdadu Belanda di bawah pimpinan Kolonel Bischoof, termasuk 25 pasukan artileri dan 25 pasukan berkuda berangkat dari Batavia pada Oktober 1824, dan tiba di Makassar pada Nopember 1824. Usaha pertama yang dilakukan oleh Kolonel Bischoof bersama pasukannya adalah merebut kembali daerah-daerah yang terletak di bagian utara yang diduduki oleh laskar Bone. Daerah-daerah itu meliputi Maros, Pangkajene, dan Segeri. Perlawanan yang dihadapi oleh pasukan Belanda tidaklah sekeras yang diduga. Oleh karena Raja Bone We Maniratu Arung Data memerintahkan laskar Bone meninggalkan daerah-daerah itu dan kembali ke Bone untuk menanam padi karena musim tanam sudah tiba, sehingga pasukan Belanda dengan mudah berhasil merebut kembali daerah-daerah tersebut.¹⁶⁴

¹⁶³ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 52; Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *TNI, op. cit.*, hlm. 181; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*; Mappangara, 1995, *op. cit.*, hlm. 115-116.

¹⁶⁴ Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *TNI, loc. cit.*; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 116; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 224; Abduh, Muhammad, 1985, *loc. cit.*

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa laskar Bone tidak sepenuhnya adalah prajurit-prajurit yang dipersiapkan untuk berperang. Mereka merupakan pasukan cadangan, atau amatiran yang turut serta dalam perang karena adanya perintah dari atasannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka adalah petani-petani dari daerah-daerah *palili* yang setiap waktu harus menyediakan tenaga (orang) untuk ikut serta berperang, yang merupakan salah satu kewajiban bagi daerah-daerah *palili*. Selain itu, kembalinya laskar Bone juga menunjukkan bahwa persediaan makanan bagi kerajaan harus dijaga dengan baik. Sebab, tanpa persediaan makanan segalanya dapat terjadi musnah, termasuk kelangsungan hidup mereka sendiri.¹⁶⁵

Meskipun demikian pasukan Belanda di bawah pasukan Kolonel Bischoof, dapat dikatakan secara keseluruhan mengalami kegagalan dalam misinya untuk menghancurkan Bone. Kegagalan itu, tidak hanya disebabkan oleh cuaca yang tidak menguntungkan, tetapi juga dari strategi militer. Gerak-gerik pasukan militer Belanda ini dengan mudah dapat dipantau oleh laskar Bone yang menempatkan diri dalam tempat-tempat perlindungan yang kedudukannya cukup tinggi, sehingga dapat dengan mudah untuk mengatur kapan mereka melakukan penyerangan dan kapan harus bersembunyi dari sergapan musuh. Kegagalan pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Bischoof ini sangat mengecewakan pimpinan tertinggi pemerintah Belanda di Batavia.¹⁶⁶

PUNCAK PERLAWANAN

Untuk melaporkan perkembangan terakhir yang terjadi di Makassar dan daerah Sulawesi Selatan pada umumnya, komisararis

¹⁶⁵ Mappangara, 1996, *loc. cit.*; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*

¹⁶⁶ Poelinggomang, dkk., *op. cit.*, hlm. 224-225; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 117.

tertinggi Belanda di Makassar, Mr. J. M. Tobias kemudian mengambil inisiatif datang sendiri ke Batavia. Tujuan utamanya adalah untuk menyakinkan pemerintah Belanda bahwa sangatlah diperlukan suatu tindakan guna memberikan pelajaran kepada Bone yang dipimpin oleh We Maniratu Arung Data, yang sudah bertindak terlalu jauh. Jika keadaan yang demikian itu tidak ditanggulangi sesegera mungkin, maka Bone dapat mengancam keberadaan pasukan Belanda. Ancaman itu tidak hanya dalam arti politik, tetapi juga mengganggu perekonomian pemerintah karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekitar wilayah kekuasaan Belanda memberi dampak pada perdagangan. Bukan tidak mungkin, pelabuhan Makassar kelak dijaui oleh para pedagang. Terlebih karena Raja Bone We Maniratu memerintahkan kepada armada-armada Bone untuk melakukan blokade-blokade terhadap kapal-kapal yang hendak mengunjungi pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, apabila pemerintah Belanda menunda-nunda untuk melancarkan serangan sesegera mungkin, berarti memberi waktu bagi Bone mempersiapkan diri. Jika hal ini terjadi, maka pemerintah Belanda terpaksa membutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkan Bone.¹⁶⁷

Menanggapi laporan dan usulan dari Tobias tersebut, pimpinan tertinggi pemerintah Belanda di Batavia memutuskan untuk segera melakukan tindakan militer terhadap Bone. Untuk merealisasikan maksud itu, maka ditunjuklah Mayor Jenderal Van Geen memimpin ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan dalam rangka penaklukan terhadap Bone dan semua kerajaan yang masih berkuasa. Selain itu,

¹⁶⁷ Selain datang sendiri ke Batavia, Tobias juga berulang kali mengirim surat kepada Gubernur Jendral Van Der Capelle. Baca, surat-surat Tobias dalam Kemp, van der P. H., 1901. *Brieven Van en aan Mr. H.J. Van de Graaff 1816-1826, eenbijdrage tot de kennis der Oost-Indische Bestuurstoestanden Onder de Regeering van G.A.G.P. Baron Van Der Capellen*. Batavia: Albrecht & Co, Tweede deel, hlm. 225-233; Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 80-81; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 117-118.

pemerintah Belanda juga mengirimkan surat kepada Panembahan Sumenep agar membantu Belanda dengan menyiapkan pasukan-pasukan terpilihnya untuk ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Pasukan Belanda diperlengkapi dengan personil yang tidak sedikit jumlahnya dan juga dengan persenjataan yang lebih modern. Selain pasukan gerak cepat darat, ekspedisi ini juga diperlengkapi dengan pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Kapten Marinir Pietersen. Ekspedisi yang dipimpin oleh Van Geen ini terdiri atas pasukan infantri, kavaleri, dan arteleri.¹⁶⁸

Ekspedisi ini juga dilengkapi dengan staf operasionalnya yang terdiri atas: Ajudan Panglima (Letnan II De Wit), Kepala Staf (Mayor Gambier), Ajudan Staf (Kapten Everla), Zeni (Mayor Van Der Wijck), Ajudan Artileri (Letnan I Van Geen, anak dari Jenderal Van Geen), Artileri (Letnan I Hoiijel), dan *Huzaar* (pasukan berkuda) adalah Letnan II Helmich. Staf infanteri di bawah Komando Kolonel Bischoof, Kapten Mess (Ajudan), dan Letnan I Bouwman (Ajudan), sementara staf artileri di bawah komando Mayor Geijs van Pittius dibantu oleh Letnan II Bestelmeyer sebagai ajudan. Para perwira lainnya dalam ekspedisi militer ini dibagi dalam beberapa kesatuan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Reeser, yaitu De Leew, Wachs, Coehoorn van Hauwerda, Le Bron de Vaxela, dan De Bast semuanya mayor infantri.¹⁶⁹

Selain itu, ekspedisi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Geen tersebut juga dilengkapi dengan dinas ambulans, yang terdiri atas: Degenhard (mayor ahli bedah), Reumpol (perwira

¹⁶⁸ Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 225. Diketahui bahwa Panembahan Sumenep dua bulan kemudian terlibat dalam ekspedisi ini. Jumlah pasukan dari Pangeran Sumenep berjumlah 1500 orang (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 118).

¹⁶⁹ Standen, P.B., 1884, *Zuid-Celebes, Bijdragen tot de Krijgsgeschiedenis en Militaire Geographie van de Zuidelijke Landtong van het Eiland Celebes*. Utrecht: Kemink & Zoon, hlm. 188-189; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 119-120; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 226.

kesehatan kelas 2), Tijthoff (perwira kelas 3), Pief (perwira kelas 3), Cramer (apoteker kelas 2), Lament (apoteker kelas 3), dan Beudeker sebagai komisariss direktur ambulans kelas 1.¹⁷⁰ Ekspedisi militer secara besar-besaran ini terdiri atas 1300 orang serdadu Belanda dan 900 orang pribumi (dinas). Korps bantuan dari Panembahan Sumenep terdiri atas satu batalion infanteri 900 orang, satu batalion prajurit tombak 600 orang, dan satu satuan pemanah berjumlah 60 orang. Selain itu, ekspedisi ini juga diperkuat bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan sekutu atau sahabat dari Sulawesi Selatan, yaitu Gowa sebanyak 3200 orang, Bantaeng sebanyak 200 orang, Galesong sebanyak 1200 orang, serta Binamu dan Bangkala 1500 orang. Jumlah pasukan seluruhnya sebanyak 7900 orang dan hanya sebagian yang bersenjata senapan.¹⁷¹

Ekspedisi ini didukung oleh perlengkapan senjata-senjata modern yang terdiri atas 4 meriam ukuran 12 pon, 2 meriam ukuran 6 pon, 2 mortir ukuran 20 inci, dan 2 mortir ukuran 15 inci. Meriam lapangan terdiri atas 5 kanon berukuran 3 pon, 2 meriam berdaya tembak jauh (*howister*) berukuran 24 pon, 2 *howister* berukuran 20 inci. Sementara artileri ringan terdiri atas 3 kanon berukuran 2 pon, 2 kanon ukuran 1 pon, 6 *howitser* berukuran 10 inci, dan 6 *howitser* ukuran 13 inci.¹⁷² Dari angkatan laut kerahkan sebanyak delapan kapal perang dan tiga kapal meriam, juga kapal-kapal pengangkut pasukan dan perbekalan dikerahkan dari Sumenep. Beberapa puluh buah kapal partikulir yang disewa bersama 80 buah perahu layar pengangkut pasukan bumiputera.¹⁷³

¹⁷⁰ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 120-121; Standen, 1884, *op. cit.*, hlm. 189; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*

¹⁷¹ Standen, 1884, *op. cit.*, hlm. 190; Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 80; Poelinggomang, ddk, 2005, *loc. cit.*; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 121; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 341.

¹⁷² Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 121; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*

¹⁷³ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 341. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa kapal angkut dipersiapkan oleh Tuan De Siso atas biaya sendiri (Mappangara. 1996, *op.*

Ekspedisi militer Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Geen tersebut, diberangkatkan secara bertahap sehingga mereka tidak bersamaan tiba di tempat tujuan. Pasukan pertama tiba di Makassar pertengahan Januari 1825, sedangkan pasukan terakhir tiba pada 31 Januari 1825. Setelah tiba di Makassar, pasukan ini menunggu selama beberapa hari untuk mengumpulkan pasukan-pasukan Belanda, baik yang datang dari Pulau Jawa dan Madura maupun yang berasal dari sekutu-sekutu Belanda yang berada di Sulawesi Selatan. Pasukan Gowa, Tallo, panglima-panglima perang tertinggi dari kerajaan-kerajaan ini bersatu untuk bersama-sama menyatukan kekuatan menaklukkan Bone dan sekutu-sekutunya.¹⁷⁴ Sementara Belanda menyusun kekuatan perang untuk penyerangan, Raja Bone We Maniratu memerintahkan sebagian laskar Bone tetap berada pada kubu-kubu pertahanan mereka di Pegunungan Camba dan Maros. Kubu-kubu pertahanan laskar Bone di Bantaeng sudah ditinggalkan, kecuali beberapa kubu pertahanan di Bulukumba tetap disiagakan. Hal ini dimaksudkan untuk memecah konsentrasi musuh dan agar medan pertempuran tetap luas, tersebar di wilayah pertahanan yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda.¹⁷⁵

Taktik dan strategi perlawanan laskar Bone tersebut, menjadi salah satu sebab pasukan Belanda tidak mengarahkan sasarannya langsung kepada Bone, sebagaimana tujuan ekspedisi militer ini. Kerajaan-kerajaan kecil yang turut bergabung dengan Bone atau daerah-daerah yang dijadikan sebagai kubu pertahanan laskar

cit., hlm. 122; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*).

¹⁷⁴ Berdasarkan sumber tradisional Bugis (*Iontarak*), persiapan ini diceritakan secara panjang lebar, bagaimana panglima-panglima perang menyatukan kesanggupannya dengan mengadakan tari-tarian perang sebelum terjun ke medan laga (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 122 dan 247).

¹⁷⁵ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 314-342; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 53.

Bone menjadi sasaran terlebih dahulu. Tujuannya agar medan pertempuran sedikit demi sedikit dapat dipersempit. Pasukan Belanda sebagian diarahkan menyerang Sinjai dan Bulu-Bulu, dan sebagian lagi diarahkan untuk menyerang Maros. Penyerangan terhadap Maros di bawah pimpinan Mayor van Der Wijk, bukan hanya dimaksudkan untuk mempertahankan benteng-benteng Belanda dari serangan laskar Bone, tetapi juga bertujuan sebagai batu loncatan atau pintu masuk dalam penyerangan terhadap Bone dari arah barat.¹⁷⁶

Pimpinan ekspedisi pasukan Belanda, Van Geen juga terlebih dahulu mengirimkan angkatan lautnya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Roeder ke daerah selatan pada 5 Februari 1825. Setelah itu, barulah pasukan Belanda yang disertai pasukan Gowa meninggalkan Makassar menuju Bantaeng dan Bulukumba pada 28 Februari 1825. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Le Bron melakukan penyerang terhadap pertahanan laskar Bone di wilayah pesisir Bantaeng. Namun mereka tidak mendapat perlawanan yang berarti, karena laskar Bone meninggalkan pertahanannya di daerah itu seiring dengan semakin majunya pasukan Belanda. Mayor Le Bron bersama pasukannya yang disertai suatu kesatuan pribumi meneruskan penyerangan melalui Bulu Batu dan Kassi menuju Bulukumba. Meskipun mendapat perlawanan dari laskar Bone, mereka berhasil merebut empat pertahanan laskar Bone di dekat Kassi dan melumpuhkan sejumlah pertahanan lainnya di wilayah ini. Dari Bulukumba pasukan Van Geen kemudian meneruskan perjalanannya, baik melalui darat maupun melalui laut untuk menaklukkan Kajang dan Sinjai. Kedua kerajaan atau negeri ini bersekutu dengan Bone. Sinjai merupakan suatu daerah

¹⁷⁶ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 122-123; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 227.

yang penting untuk dikuasai sebagai pintu masuk ke wilayah Bone dari arah selatan.¹⁷⁷

Pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Lo Bron yang disertai dengan Karaeng Bantaeng (I Bagala) memasuki wilayah kekuasaan Kajang pada 10 Maret 1825. Karaeng Kajang, yaitu I Mallu Daeng Pahakkang tidak melakukan perlawanan dan memilih jalan untuk berdamai dengan syarat pasukan Belanda tidak mengganggu rakyat Kajang dan rumah-rumah serta kebun-kebun mereka tidak dirusak dan dibakar. Perundingan yang dilakukan di rumah kediaman Karaeng Kajang menimbulkan kesalahfahaman yang menyebabkan laskar Bone dan orang Kajang mengamuk. Karaeng Bantaeng yang ikut serta dalam perundingan itu tewas, tetapi Mayor Lo Bron dapat meloloskan diri. Pasukan Belanda beserta sekutu-sekutunya tidak tinggal diam. Wilayah Kajang diserang dan dibakar sehingga banyak rakyat Kajang yang tewas. Namun Karaeng Kajang berhasil meloloskan diri dan mencari perlindungan di daerah-daerah perbukitan.¹⁷⁸

Setelah membakar habis rumah-rumah penduduk, pasukan Belanda melanjutkan perjalanannya untuk menguasai Sinjai, daerah perbatasan Bone di sebelah selatan. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh pimpinan Van Geen tiba di pelabuhan Mangara`bombang (Sinjai) pada 14 Maret 1825. Sementara Mayor Le Bron bersama pasukannya yang melalui jalan darat mendapat rintangan yang tidak mudah, bukan karena takut pada musuh yang

¹⁷⁷ Sumber Arsip, 1854, *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes*, dalam *TNI*, *op. cit.*, hlm. 182; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 342; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 123; Abduh, Muhammad, 1985, *loc. cit.*

¹⁷⁸ Perlawanan yang dihadapi oleh pasukan Belanda di Kajang ini menghambat rencana sesungguhnya. Pada peristiwa itu, pihak Belanda tidak begitu banyak mengalami kerugian, hanya terdapat beberapa orang saja yang tewas dan puluhan yang mengalami luka-luka (Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 227-228; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 124).

setiap saat muncul di sejumlah tempat, melainkan karena medan jalan yang sulit sehingga menghambat perjalanan dan baru tiba di Sinjai pada 18 Maret 1825. Seperti yang telah diduga sebelumnya, bahwa pertempuran sengit berlangsung di wilayah ini. Laskar Bone-Sinjai berhasil menahan laju pasukan Belanda beserta sekutu-sekutunya. Benteng-benteng pertahanan yang dibuat sepanjang pantai pendaratan siap untuk menanti kedatangan pasukan penyerang. Gempuran demi gempuran, tidak hanya yang berasal dari laut tetapi juga dari darat, sehingga memaksa laskar Bone meninggalkan benteng-benteng pertahanannya di Sinjai untuk kemudian memusatkan pertahanan mereka di wilayah Bone.¹⁷⁹

Kekalahan laskar Bone di Sinjai, bukan hanya telah melapangkan jalan bagi pasukan Belanda untuk memasuki Bone dari arah selatan, tetapi kekalahan itu juga memaksa laskar Bone untuk memusatkan perlawanannya di wilayah Bone. Untuk itu Raja Bone We Maniratu memerintahkan Dulung Awang Tangka memperkuat pertahanan laskar Bone di perbatasan Bone dan Sinjai. Sedangkan Van Geen membagi dua pasukannya, sebagian melalui jalur darat dan yang lainnya melalui jalur laut menuju Bone. Pasukan yang melalui jalur laut segera diperintahkan untuk menaiki kapal mereka masing-masing untuk selanjutnya menuju perairan Bajoe. Sementara pasukan Belanda lainnya di bawah pimpinan Mayor Le Bron yang disertai pasukan pribumi tetap melalui jalur darat untuk menaklukkan Bone. Selain medan perang yang berawa-rawa dan serangan penyakit malaria sangat menghambat laju perjalanan pasukannya, mereka juga dengan susah payah dapat menembus pertahanan laskar Bone di bagian selatan yang berada di bawah koordinir Dulung Awang Tangka. Walaupun demikian, semangat

¹⁷⁹ Sinjai adalah daerah taklukan Kerajaan Bone yang terletak di bagian selatan wilayah Kerajaan Bone. Sumber Arsip, 1854, *op. cit.*, hlm. 182-183; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 124-125; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 342.

mereka tetap menggebu-gebu untuk secepat mungkin sampai di pesisir pantai Teluk Bone, yaitu di Bajoe yang telah disepakati sebelumnya sebagai basis untuk menyerang pusat kerajaan. Tempat ini merupakan pelabuhan utama Bone, dan salah satu pusat pertahanan yang dipercaya oleh sebagian rakyat Bone tidak dapat direbut atau dikuasai oleh musuh.¹⁸⁰

Pasukan Belanda meninggalkan Sinjai menuju Bone pada 23 Maret 1825, dan mereka tiba pada keesokan harinya. Dalam ekspedisi ini pasukan Belanda dibantu oleh Raja Gowa I Mappatunru Karaeng Lembangparang Tumenanga ri Katangka bersama pasukannya. Pasukan Van Geen yang tiba di pelabuhan Bajoe pada 24 Maret 1825 tidak segera melakukan penyerangan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Polenggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 228; Sumber Arsip, 1854, *op. cit.*, hlm. 183; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 53. Sumber lain menyebutkan bahwa setelah berhasil menaklukkan Sinjai, semua pasukan Belanda yang mendarat di Sinjai diperintahkan untuk kembali naik ke kapal yang mereka tumpangi sebelumnya. Medan perang yang berawa-rawa, dan serangan penyakit malaria sangat menghambat majunya pasukan Belanda. Walaupun demikian semangat mereka tetap saja menggebu untuk secepat mungkin mengakhiri agresi militer ini. Kerajaan Bone diserang dari berbagai arah. Tekad yang membara dari sebagian pasukan pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Mayor Le Bron de Vexela, tidak menghalangi mereka menyerang Bone yang penuh dengan rintangan terutama rawa-rawa. Mereka berupaya untuk dapat menembus pertahanan Kerajaan Bone agar dapat segera ke pesisir pantai Teluk Bone yang telah disepakati sebelumnya sebagai basis untuk menyerang Kerajaan Bone, yaitu ke Bajoe, pelabuhan Kerajaan Bone, satu daerah pertahanan yang oleh sebagian rakyat Bone percaya tidak dapat dijatuhkan (Mapangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 125).

¹⁸¹ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 343; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.* Sementara sumber lainnya menyebutkan bahwa karena penyakit mulai muncul dan penyebarannya yang sangat cepat di kalangan pasukan Belanda, sehingga pimpinan ekspedisi Belanda segera memerintahkan agar pasukan segera bergerak menuju Bajoe, kota dagang utama Bone yang dipertahankan dengan benteng-benteng yang sangat baik. Pada 23 Maret 1825, panglima bersama pasukan induk berangkat dengan kapal ke Bone, dan Mayor Le Bron de Vaxela bersama pasukan pribumi berangkat melalui darat. Namun ia disesatkan oleh pemandunya sehingga pasukannya terlambat mengadakan serangan dari arah timur. Setelah pasukan Belanda berlabuh di depan Bajoe, orang-orang Belanda mengadakan pemantauan seadanya. Jenderal van Geen dan Mayor Gey memerintahkan pasukannya agar tidak berlabu dalam jarak tembak meriam Bone. Pada 27 Maret 1825, pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan dengan menggunakan beberapa rakit yang dilindungi dengan tembakan-tembakan meriam dari kapal pasukan Belanda. Pasukan yang baru tiba segera bergabung bersama panglimanya, kendati pun medan agak sulit ditembus oleh kapal laut karena kondisi air yang mulai surut. Suatu serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh

Rintangan medan yang amat sulit setidaknya mengurungkan niatnya untuk sementara. Pasukan Belanda menduga bahwa medan pertempuran di Bone tentu lebih sulit jika dibandingkan dengan apa yang telah dihadapinya di Sinjai. Oleh karena itu diadakan pengintaian untuk mengetahui pertahanan laskar Bone dan keadaan medan pertempuran yang sebenarnya. Van Rijneveld ditugaskan untuk mengadakan pengintaian dan dari hasil pengintaian itu diketahui bahwa benteng-benteng yang ada di sepanjang pantai tidak merupakan masalah karena hanya dilindungi dengan tanah liat dan batu karang.¹⁸²

Sebelum melakukan pendaratan, pasukan Belanda terlebih dahulu menembaki dengan meriam sebagai provokasi terhadap benteng pertahanan Bone yang ada di pinggir pantai Bajoe untuk melemahkan semangat perlawanan laskar Bone. Namun tembakan itu segera dibalas pula dengan tembakan meriam oleh laskar Bone, sehingga terjadi tembak-menembak antara pasukan Belanda dengan laskar Bone. Ketika tembakan balasan laskar Bone mereda, pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan dengan menggunakan skoci dan rakit pada 27 Maret 1825. Pendaratan di pagi hari itu, bukan hanya dihambat oleh keadaan medan yang sulit dan kondisi air laut yang surut, tetapi juga karena pengawal pantai mempertahankan wilayahnya dengan sekuat tenaga dan laskar Bone mempertahankan bentengnya dengan gagah berani. Namun

Belanda yang baru tiba dengan bayonet sehingga orang-orang Bone mengundurkan diri mencari posisi yang strategis untuk mengadakan serangan balik. Baru setelah orang Belanda semuanya mendarat, orang-orang Bone tampaknya mulai menyerang orang-orang Belanda di laut dengan kekuatan yang besar. Setelah itu, pendudukan benteng-benteng pertahanan segera diambil alih oleh Belanda dengan demikian Bajoe segera dikuasai (Sumber Arsip, 1854, *op. cit.*, hlm. 183-184).

¹⁸² Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 53-54; Mattulada, 1998, *loc. cit.*; Poeling-gomang, dkk., 2005, *loc. cit.* Sementara sumber lain menyebutkan bahwa benteng-benteng yang ada tersebut diibaratkan sebagai kubangan kerbau semata-mata (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 126; Standen, 1884, *op. cit.*, hlm. 25).

karena peralatan persenjataan yang tidak seimbang, wilayah pantai dan pelabuhan Bajoe akhirnya berhasil direbut oleh pasukan Belanda. Dalam pertempuran mempertahankan pantai Bajoe, Bone menderita kerugian yang tidak sedikit, yaitu kehilangan ratusan anggota laskarnya, puluhan meriam dan senapan, termasuk puluhan perahu pengangkut. Kubu-kubu pertahanan laskar Bone serta rumah-rumah di pesisir pantai dan sekitar pelabuhan juga dibumihanguskan oleh pasukan Belanda.¹⁸³

Kekalahan laskar Bone yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan di sepanjang pantai dan pelabuhan Bajoe tersebut, mendorong pasukan Belanda untuk segera melancarkan serangan terhadap ibukota kerajaan, Watampone. Raja Bone We Maniratu yang dikawal oleh laskar wanita bersama laskar Bone lainnya memberikan perlawanan sengit dalam mempertahankan ibukota kerajaan dari serangan pasukan Belanda. Untuk menghindari kerusakan di ibukota kerajaan supaya tidak bertambah parah, raja Bone bersama pembesar-pembesar kerajaan memutuskan meninggalkan Watampone pada 29 Maret 1825. Raja Bone bersama para pembesar kerajaan dengan pengawasan khusus dan perbekalan secukupnya, mengungsi ke daerah pedalaman, di tempat-tempat yang diperhitungkan kuat untuk dijadikan sebagai kubu-kubu pertahanan dalam menghadapi pasukan Belanda. Oleh karena ibukota kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong, sehingga pasukan Belanda dengan mudah dapat memasuki Watampone atau tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti.¹⁸⁴

Laskar Bone yang mendapat tekanan dari serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda, memaksa mereka mengun-

¹⁸³ Sumber Arsip, 1854, *op. cit.*, hlm. 183; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 53; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 344; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 126-127.

¹⁸⁴ Petta Nabba, Andi Palloge, 2006, *op. cit.*, hlm. 185; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 53-54; Mattulada, 1998, *loc. cit.*; Paoelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 229.

durkan diri seiring dengan majunya pasukan Belanda. Dalam menghadapi pasukan Belanda, laskar Bone menghindari pertempuran secara frontal dan memilih taktik dan strategi perang gerilya sebagai alternatif dalam menghadapi pasukan Belanda untuk memenangkan pertempuran. Taktik yang demikian ini sangat mendukung karena laskar Bone mengetahui dengan baik medan pertempuran. Itulah sebabnya dewan peperangan kerajaan memutuskan untuk mengungsikan raja Bone ke daerah pedalaman, di tempat-tempat yang dianggap kuat dan aman untuk dijadikan sebagai basis konsentrasi pasukan atau pangkalan penyerangan balik laskar Bone yang sewaktu-waktu dapat dilakukan tanpa dapat diperkirakan oleh pasukan Belanda. Pengungsian itu secara psikologis juga telah membangkitkan perlawanan di kalangan rakyat Bone, karena raja bagi rakyat Bone dianggap sebagai inti kerajaan.¹⁸⁵

Pimpinan pasukan Belanda Van Geen merasa kecewa karena tidak berhasil menangkap Raja Bone We Maniratu Arung Data, Sultana Saleha Rabiattuddin. Segala upaya dilakukan untuk mencari tahu keberadaan raja Bone. Namun upaya itu juga mengalami kegagalan karena rakyat atau penduduk tidak mau memberitahukan dan tidak bersedia membantu pasukan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa raja Bone bersama para pembesar kerajaan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam perlawanan terhadap serangan pasukan Belanda. Demikian pula dalam upaya mencari hubungan dengan raja Bone atau para pembesar kerajaan

¹⁸⁵ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 127; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 54; Daeng Patunru, 1989, *op. cit.*, hlm. 249-250. Sumber lain menyebutkan bahwa tampaknya taktik "perang gerilya" sudah direncanakan Kerajaan Bone. Laskar Bone meninggalkan sejumlah senjata berat seperti meriam dan peralatan perang lainnya yang berat untuk dibawa bergerak dan berpindah-pindah di daerah pedalaman. Semua peralatan perang yang ditinggalkan itu, dirampas oleh pasukan Belanda atau dimusnahkan. Watampone dirampok habis-habisan oleh penyerang, dan bangunan-bangunan penting di Lalebbta-Watampone dibumihanguskan (Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 344-345).

juga menemui jalan buntu, sebab mereka tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat mengadakan pembicaraan dengan Belanda atas nama pemerintah kerajaan. Berdasarkan laporan yang dapat diperoleh, diketahui bahwa Raja Bone We Maniratu Arung Data bersama Arung Lompu La Mappaewa berada di daerah pertahanan Tanah Wajo. Sebagian pembesar kerajaan dan laskar Bone berada di daerah pertahanan Pasempe. Pertahanan alam yang terletak di atas lereng gunung ini, merupakan sebuah pertahanan yang sangat kuat dan sulit ditembus karena kedudukannya yang sangat startegis.¹⁸⁶

Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda untuk menaklukkan Bone, menelan korban sebanyak enam orang tewas dan 22 orang mengalami luka-luka di pihak Belanda. Sementara pasukan bumiputera dari kerajaan-kerajaan sekutu atau sahabat Belanda yang membantu atau turut menyertai pasukan Belanda tidak diperoleh keterangan. Karena tidak mendapat perlawanan yang berarti, membuat mereka kecewa dan putus asa sehingga nafsu perangnya meluap-luap dan menumpahkan kemarahannya dengan menghancurkan dan menjarah ibukota kerajaan. Untuk menghindari tindakan-tindakan liar dan penjarahan yang dilakukan pasukan bumiputera yang membantunya, Van Geen memerintahkan semua pasukannya kembali ke pelabuhan Bajoe. Selain mengalami kehancuran ibukota kerajaan, Watampone, Bone juga kehilangan anggota laskarnya kurang lebih 200 orang, 60 pucuk meriam, puluhan bedil dan mesiu dalam pertempuran melawan pasukan Belanda sejak mereka melakukan pendaratan di pesisir pantai Bajoe.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Poelinggomang, dkk, 2005, *op. cit.*, hlm. 229; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 344; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 54; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 250.

¹⁸⁷ Sumber Arsip, 1854, *op. cit.*, hlm. 184; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 344-345;

Meskipun pasukan Belanda dapat mengalahkan laskar Bone dan menduduki ibukota kerajaan, namun mereka belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Sebab, mereka tidak berhasil menangkap Raja Bone We Maniratu Arung Data dan memaksa pemerintah kerajaan tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Padahal penangkapan raja Bone merupakan salah satu di antara sekian banyak tujuan Belanda untuk memaksa kerajaan ini menerima dan penandatanganan Kontrak Bungaya yang diperbaharui pada 1824. Selama raja Bone masih hidup, berarti selama itu pula perlawanan senantiasa terjadi. Oleh karena itu, Van Geen mengirim surat kepada dewan *Ade Pitu* (Adat Tujuh) Kerajaan Bone dan juga kepada raja Bone, untuk segera bersama-sama menyerahkan diri di Watampone. Namun usaha ini tidak berhasil, karena kurir yang diutus menemui mereka tidak berhasil bertemu dengan raja Bone dan dewan *Ade Pitu*. Kurir itu hanya bertemu dengan Mangkubumi Kerajaan Bone tanpa mendapat jawaban yang diharapkan. Itulah sebabnya Van Geen amat kecewa dan berusaha untuk mengadakan penyerangan melalui Sungai Cenrana ke daerah Bone bagian utara dan Wajo atau tempat raja Bone diperkirakan berada.¹⁸⁸

Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 127-128.

¹⁸⁸ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 128-129; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 229. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa berdasarkan laporan yang berhasil diperoleh Van Geen, diketahui bahwa Arumpone We Maniratu Arung Data bersama saudaranya Arung Lompu berada di daerah pertahanan Wajo. Sebagian Pembesar Tanah Bone dan pasukan pertahanan berada di daerah pertahanan Pasempe di atas lereng gunung, sebuah kubu pertahanan Tanah Bone yang cukup kuat dan tangguh. Usaha keras yang dilakukan oleh General Mayor van Geen untuk bertemu sendiri dengan raja Bone atau para *punggawa* (panglima) laskar perang Bone, tidak berhasil. Karena itu, dituliskan sebuah surat ultimatum kepada raja Bone yang diketahuinya berada di Wajo, yang isinya bahwa raja Bone bersama pembesar-pembesarnya dan serta para *punggawa-punggawa* (panglima-panglima) perang yang menyertainya harus menyerahkan diri di Watampone. General Mayor van Geen menjanjikan pengampunan apabila seruannya untuk menyerahkan diri dipenuhi. Kurir yang membawa surat itu, tak berhasil menemui raja Bone dan Arung Lompu. Pembesar kerajaan yang berhasil ditemuinya, hanyalah Mangkubumi Kerajaan Bone, *Tomarilaleng* dan beberapa orang pembesar lainnya. Para pembesar Bone itu, sama sekali tidak memberi

Penyerangan terhadap kedudukan raja Bone melalui Pallime dan Sungai Cenrana tersebut, menemui kegagalan karena cuaca yang tidak memungkinkan. Hujan deras yang turun terus menerus mengakibatkan sungai itu meluap sehingga penyakit malaria berjangkit dengan cepat dan membawa bencana pada pasukan Belanda. Selain itu, juga karena pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Zoutman bersama 100 orang infanteri yang dipimpin oleh Kapten Herzen mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di sepanjang aliran Sungai Cenrana. Pada penyerangan itu, terdapat enam orang perwira, termasuk Mayor Gambier, Letnan Vlingius, Bouwman, Bestelmeijer, Rubay, dan Cevers yang wafat karena terserang penyakit malaria dan disentri.¹⁸⁹

Keadaan itu menyebabkan pasukan Belanda dan laskar bumi-putera yang membantunya merasa kecewa dan putus asa, ditambah lagi karena adanya laporan yang diterima bahwa di Jawa terjadi perang yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro. Perang yang bergejolak di Jawa sangat mengkhawatirkan Belanda. Hal ini memaksa pihak Belanda lebih memusatkan perhatiannya di wilayah Jawa dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk mengantisipasi agar perang ini tidak meluas, pemerintah Belanda memutuskan untuk menarik pasukan Belanda yang berada di Sulawesi Selatan. Dalam situasi yang sangat sulit dan merepotkan, Van Geen memutuskan untuk kembali ke Makassar. Mayor Le Bron ditunjuk dengan satu kesatuan yang terdiri atas 110 infantri, 95 orang korps Sumenep, 11 pemuda, serta dua orang pelempar mortar di bawah satu orang perwira artileri dan sebagian besar bantuan pasukan bumiputera dari Sulawesi Selatan, melakukan perjalanan lewat darat menuju Makassar. Pada 9 April 1825,

reaksi terhadap ultimatum Belanda itu (Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 345).

¹⁸⁹ Sumber Arsip, 1854, *op. cit.*, hlm. 184; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 345-346; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 129.

pasukan ini meninggalkan Bajoe, bergerak selama tiga hari ke selatan sepanjang pantai dan dari sana lewat Camba, Maros, dan sampai Makassar. Pasukan lainnya diangkut lewat laut dan diberangkatkan pada 11 April 1825. Meskipun perjalanan darat yang memakan waktu selama sehari-hari itu mengalami banyak rintangan dan penderitaan, namun mereka dapat tiba di Makassar pada 22 April 1825. Dengan semangat yang luar biasa dan dapat mengatasi banyak rintangan, pemerintah Belanda memberikan apresiasi dan kepada Ajudan O.O. Passe, Sersan Mayor Petit dan Poland dan Sersan Preville dipromosikan menjadi Letnan Dua.¹⁹⁰

Penarikan seluruh pasukan Belanda dari Bone, dapat dikatakan bahwa ekspedisi militer Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Geen untuk menaklukkan Bone mengalami kegagalan dan tidak menghasilkan keputusan politik yang berarti. Sebab ekspedisi militer secara besar-besaran itu, tidak berhasil memaksa kerajaan ini menerima dan menandatangani Kontrak Bungaya yang diperbaharui (1824). Kenyataan ini tentu membawa kekecewaan para penguasa Belanda, baik di Makassar maupun di Batavia. Oleh karena ekspedisi militer yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda bukan hanya dianggap gagal karena tidak menghasilkan satu keputusan politik yang diharapkan, tetapi hubungan Belanda dengan Bone juga menjadi semakin renggang.¹⁹¹

Sementara itu, Raja Bone We Maniratu Arung Data bersama seluruh pembesar kerajaan kembali ke ibukota kerajaan—Watampone. Ibukota kerajaan yang hancur oleh serangan pasukan Belanda bersama sekutunya perlahan-lahan dibangun kembali. Mereka bahu-membahu membenahi dan membangun kembali

¹⁹⁰ Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 230; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 346; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 129-130.

¹⁹¹ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 130; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 54.

seluruh kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Belanda bersama sekutunya serta menata kembali kota itu dengan sebaik-baiknya. Konsolidasi pasukan perang, perbaikan pertanian dan kehidupan ekonomi dibangun kembali dengan segala kesungguhan serta daya upaya yang keras dan berkelanjutan.¹⁹² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun pasukan Belanda berhasil menghancurkan Kota Watampone, namun mereka tidak dapat meruntuhkan semangat perlawanan Raja Bone We Maniratu Arung Data bersama para pembesar kerajaan dan laskar Bone. Itulah sebabnya selama We Maniratu Arung Data memegang jabatan sebagai raja Bone, sikap anti Belanda dan semangat perjuangannya tidak pernah padam sehingga perlawanan terhadap pemerintah Belanda senantiasa terjadi.

Akhir Perlawanan

Setelah seluruh pasukan Belanda meninggalkan Bone, Raja Bone We Maniratu Arung Data bersama pembesar-pembesar kerajaan kembali ke Watampone. Mereka bukan hanya diliputi kesedihan karena kehancuran ibukota kerajaan oleh pasukan Belanda dan sekutunya, tetapi juga karena mereka kehilangan ratusan anggota keluarganya yang gugur sebagai kusuma bangsa di medan pertempuran. Korban jiwa manusia itu tentu saja memberikan akibat yang memedihkan dan memilukan karena tidak sedikit wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, dan bahkan yatim piatu sebab ditinggalkan oleh suami atau ayah mereka yang meninggal atau gugur di dalam peperangan. Walaupun demikian, semangat raja Bone dan para pembesar kerajaan lainnya tidak padam atau tetap berkobar untuk terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Mereka pun tetap

¹⁹² Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 346.

bertekad untuk membangun kembali kehancuran ibukota kerajaan-nya dan segera membenahi segala urusan tata kehidupan masyarakat yang selama perang berlangsung diabaikan.

Pemulihan kembali segala tata kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama Raja Bone We Maniratu Arung Data bersama seluruh pembesar kerajaan pascaperang. Mereka bahu-membahu dengan rakyat Bone dan berusaha dengan sekuat tenaga memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Belanda dan sekutunya. Namun dalam upaya-upaya itu, mereka kembali dihadapkan suatu persoalan, yaitu munculnya konflik atau perpecahan di antara para bangsawan tinggi Bone. Konflik intern yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, karena berbeda pandangan terhadap pemerintah Belanda, terutama terhadap kebijakan yang ditempuh sehubungan dengan kehadiran Belanda kembali di Sulawesi Selatan. Di satu pihak timbul pemikiran untuk bekerjasama dan menerima kembali kehadiran Belanda, sedangkan di pihak lain terdapat kelompok yang tetap menolak bekerjasama dan tidak menyetujui kehadiran Belanda.¹⁹³

Kedua kelompok yang berbeda pandangan terhadap Belanda tersebut, masing-masing berusaha menjalankan fungsi dan peran yang dipegangnya mengarah pada keinginan kelompoknya. Maksudnya, jika kelompok yang satu mempunyai pengaruh yang besar, maka kebijakan yang ditempuh mengacu pada keinginan kelompok tersebut, demikian pula sebaliknya. Konflik antara

¹⁹³ Sumber Arsip, 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5, hlm. 306-307; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.* hlm. 252. Sumber lain menyebutkan bahwa konflik intern itu muncul setelah kerja keras yang dilakukan dalam membenahi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah pasukan-pasukan Belanda dan sekutunya dapat diselesaikan. Demikian pula setelah perbaikan pertanian dan kehidupan ekonomi selesai dilakukan (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 134; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 231).

golongan yang pro dan kontra terhadap Belanda itu, mulai tampak setelah pasukan Belanda meninggalkan Bone pada 1825, dan semakin tampak ketika pemerintah Belanda kembali melirik ke Bone yang masalahnya belum terselesaikan dengan tuntas. Meskipun dalam kenyataan tidak ada kendala yang begitu berarti dalam hubungan Belanda dengan Bone, namun tingkah laku Bone yang menolak untuk menandatangani Kontrak Bungaya yang telah diperbaharui dipandang sebagai suatu ancaman dan sangat mengkhawatirkan pemerintah Belanda.¹⁹⁴

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa sejak 1825 timbul dua golongan pendapat yang berlawanan di kalangan pembesar kerajaan. Kedua golongan pendapat yang berlawanan itu adalah sebagai berikut:

1. Golongan pertama, adalah pendirian Raja Bone We Maniratu Arung Data Sulatana Saleha Rabiattuddin, didukung oleh Arung Lompu dan *Punggawa* (panglima perang) Kerajaan Bone serta sebagian pembesar pemerintahan pusat Kerajaan Bone. Pendirian dari golongan ini ialah sama sekali menolak adanya niat dan usaha perdamaian dengan pemerintah Belanda.
2. Golongan kedua, dipelopori oleh Mangkubumi Kerajaan Bone, Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie, didukung oleh sejumlah pembesar kerajaan lainnya. Golongan ini bersikap moderat. Mereka menerima usaha yang bersifat kompromi, menerima perdamaian dan persekutuan dengan Belanda,

¹⁹⁴ Selama kekuasaan pemerintahan Raja Bone We Maniratu Arung Data (1823-1835), hubungan Bone dengan pemerintah Hindia Belanda dalam keadaan yang tidak menentu. Bahkan pemerintah Belanda menuduh Kerajaan Bone sebagai juru bicara bagi kerajaan-kerajaan yang tidak ikut menandatangani Kontrak Bungaya yang telah diperbaharui di Ujungpandang pada 1824 (Sumber Arsip, 1973, *op. cit.*, hlm. CX dan 306); Poeling-gomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 231. Mappangara, Suriadi, 2012. I Manneng Arung Data, Ratu Bone Yang Menolak Kehadiran Belanda. Makalah pada Seminar "Penggalian Nilai-nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV, di Watampone, pada 5 November 2012.

dengan harapan Bone terhindar dari kehancuran karena dilanda peperangan.¹⁹⁵

Perbedaan sikap dan pandangan antara kedua kelompok itu, semakin menghangat pada 1828, yaitu tiga tahun setelah penyerangan pasukan Belanda terhadap Bone. Untuk mengatasi perbedaan pandangan itu, Raja Bone We Maniratu Arung Data menegaskan kembali sikap dan pendiriannya dalam menghadapi Belanda dengan berkata, bahwa "Selama saya masih hidup dan menjadi *Arumpone*, maka saya akan usir setiap orang Belanda yang mencoba menginjakkan kakinya di Tanah Bone".¹⁹⁶ Sikap yang ditunjukkan oleh raja Bone itu ditentang oleh Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie bersama para pendukungnya. Sikap La Mappangara yang menerima perdamaian dengan Belanda mendapat dukungan kuat dari Arung Barru Sumangerukka To Patarai bersama istrinya yang bernama I Baega (putri Raja Bone To Appatunru) yang sejak lama bermukim di Bone.¹⁹⁷

Meskipun Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie berulang kali berusaha untuk mengubah sikap raja Bone yang anti

¹⁹⁵ Perpecahan yang dipicu oleh kehadiran kembali Belanda di Sulawesi Selatan tersebut, merupakan suatu persoalan besar dalam Kerajaan Bone sepanjang abad ke-19. Ijzereef, Willem 1994. *De wind en bladeren, Hiererchi en autonomie in Bone en Polombangkeng 1850-1950*. Groningen: Rijksuniversiteit, hlm. 37; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 346-347; Daeng Patunru, dkk. 1989. *op. cit.*, hlm. 252-253; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 135-136.

¹⁹⁶ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 347. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa selama baginda masih hidup, ia akan menyuruh untuk membunuh tiap orang Eropa (Belanda) yang berani menginjakkan kakinya di daerah kerajaannya (Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 232); Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 253.

¹⁹⁷ Arung Barru Sumangerukka adalah putra mahkota dari Kerajaan Barru yang kawin dengan I Baega, putri Raja Bone Toappatunru (1812-1823) dan bermukim di n Bone. Oleh karena itu, I Baega dan Sumangerukka adalah kemanakan dan menantu dari Raja Bone Arung Data, sebab Toappatunru adalah bersaudara kandung dengan We Maniratu Arung Data. Tidak lama kemudian Sujmangerukka berhasil menduduki tahta Kerajaan Barru atas bantuan *Tomarilalang* Kerajaan Bone dan juga Pemerintah Belanda (Baca, Silsilah raja-raja Bone. Koleksi Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar); Ijzereef, Willem, 1994, *op. cit.*, hlm. 37-38.

terhadap Belanda, namun usaha itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ia tidak cukup tenaga untuk mengubah pandangan raja Bone. Bahkan perbedaan di antara keduanya semakin menajam, sehingga La Mappangara terpaksa harus meninggalkan Bone dan pindah ke wilayah Makassar. Kepergian Tomarilalang La Mappangara itu, semakin melapangkan pengaruh kelompok pertama yang dipelopori oleh raja Bone dan sebagian besar pembesar kerajaan yang berhaluan keras terhadap kehadiran Belanda. Kelompok ini semakin kuat karena raja Bone sendiri sebagai panutan dan pemimpin rakyat Bone adalah tokoh penentang paling keras terhadap Belanda, kemudian diamini oleh para pembantunya yang juga sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Sementara itu, La Mappangara berusaha berhubungan dengan Belanda selama berada di Makassar. Ia berusaha keras agar Bone mendapat pengampunan dan tidak diperangi lagi oleh pemerintah Belanda. Usaha La Mappangara sedikit demi sedikit dapat menyakinkan Belanda bahwa Bone kelak dapat menjalin persahabatan dengan Belanda.¹⁹⁸

Perbedaan sikap dan pendirian antara kedua kelompok tersebut, dapat memperjelas tentang posisi kekuatan yang ada di

¹⁹⁸ Mattulada, *loc. cit.*; Sumber lain menyebutkan bahwa pada umumnya raja Bone selalu mengambil sikap anti terhadap orang asing, khususnya Belanda. Ketika Belanda menerima kembali kekuasaannya dari tangan Inggris pada tahun 1816, Kerajaan Bone menolak kehadiran Belanda. Meskipun satu ekspedisi yang besar dilancarkan pada tahun 1825 untuk menghukum Kerajaan Bone yang dianggap membangkan terhadap Perjanjian Bungaya yang pernah ditanda-tanginya, namun hal itu tidak membuat adanya perubahan yang berarti pada hubungan Belanda dengan Kerajaan Bone. Walaupun kemudian kerajaan ini diduduki dan dihancurkan oleh pasukan Belanda, kemudian memperjelas golongan yang pro dan anti terhadap Belanda. Tiga Raja Bone yang menjalankan dasar anti Belanda adalah Mappatunru (1812-1823), I Maniratu (1823-1835) dan La Mappaselling (1836-1845), sedangkan kelompok yang menyetujui dan sedikit bersikap moderat terhadap kehadiran Belanda adalah kelompok Tomarilalang La Mappangara Arung Sinri, bersama dengan Arung dari Kerajaan Barru dan Istrinya I Baega, Putri La Mappatunru (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 136); Meinsma, J. J. 1873. *Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Bezittingen*. 's-Hage, Joh. IJkema, tweede afdeeling, hlm. 207; IJzereef, Willem, 1994, *op. cit.*, hlm. 37-38.

Bone. Dalam sejarahnya yang panjang, tampak bahwa hanya ada dua kekuatan yang dapat saling bersaing dalam merebut kekuasaan di Bone. Di satu pihak terdapat raja sedangkan di pihak lain berdiri mangkubumi (*tomarilaleng*). Tidaklah mengherankan jika keduanya berselisih, maka dapat memberikan dampak yang besar pada kerajaan. Jabatan *tomarilaleng* bukanlah jabatan yang diperoleh karena prestasi besar yang pernah dilakukan, tetapi ia berkaitan erat dengan pendahulu-pendahulunya. Jabatan ini hanya dapat diduduki bagi mereka yang telah mempunyai keturunan yang memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu, pengaruh yang dimiliki oleh seorang *tomarilaleng* tidak hanya besar, tetapi juga dapat dikatakan memiliki akar yang kuat. Pengaruhnya bukan hanya didapatkan dari dalam kerajaan, tetapi juga ada pada diri raja. Demikian pula kekuasaan dan pengaruh raja tidak hanya berakar pada inti kerajaan, tetapi juga pada daerah bawahan (*palili*). Para putra-putri raja ditempatkan sebagai raja muda pada daerah-daerah yang diduduki, dan ini berarti memperluas kekuasaan dan pengaruh raja sendiri.¹⁹⁹

Perpecahan atau konflik yang terjadi antara raja dengan *tomarilaleng* sehubungan dengan kehadiran Belanda kembali merupakan satu persoalan besar dalam Kerajaan Bone sepanjang abad XIX. Sebab konflik itu muncul pada dua figur yang memiliki kharisma dan kekuasaan yang besar. Meskipun akhirnya *tomarilaleng* harus meninggalkan Bone dan mengungsi ke tempat lain, namun pengaruhnya masih tetap bertahan di dalam wilayah kerajaan. Keadaan ini membuat Bone terpecah belah dari dalam. Hubungan antara raja dengan *tomarilaleng*, yang secara tradisional

¹⁹⁹ Untuk mengetahui panjang lebar mengenai bagaimana kekuasaan didistribusikan di Kerajaan Bone, dapat dilihat disertasi IJzereef, Willem, 1994, *op. cit.*, hlm. 38; Caldwell, Ian, 1995. *Power, State and Society Among the Pre-Islamic Bugis*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkkenunde, deel 151*, hlm. 394-421; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 137-138.

sangat dekat dan erat tidak hanya oleh sejarahnya yang panjang, tetapi juga karena keduanya ingin menjalin kerjasama untuk membentuk satu kekuatan. Kerjasama itu biasanya dibangun lewat perkawinan.²⁰⁰

Ketika Perang Diponegoro berakhir pada 1830,²⁰¹ pemerintah Belanda kembali memusatkan perhatiannya pada daerah Sulawesi Selatan, terutama terhadap Bone. Jika sebelumnya kebijakan yang diambil adalah sedapat mungkin menahan diri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, selama hal itu tidak mengganggu keberadaan Belanda di daerah ini, maka setelah perang dilakukan langkah-langkah untuk menata keadaan yang telah ada sebelumnya. Sementara itu, perpecahan atau konflik di kalangan pembesar Bone belum juga berakhir, sehingga semakin menyulitkan kedudukan kerajaan ini dalam menghadapi pemerintah Belanda. Meskipun demikian Raja Bone We Maniratu Arung Data tetap dalam pendiriannya, menolak kerjasama dan bersahabat dengan Belanda. Sikap permusuhan itu tetap ditunjukkan sampai ia wafat pada 1835. Ia tetap konsekuen pada sikap dan prinsip perjuangannya menentang pemerintah Belanda sampai akhir hayatnya. Mattulada melukiskan sikap Raja Bone We Maniratu Arung Data terhadap Belanda, bahwa baginda tetap dalam pendiriannya, tetap bermusuhan dengan Belanda sampai akhir hayatnya. Baginda diberi gelar anumerta *Matinroe ri Kessi*. Baginda adalah Srikandi Tanah Bone yang bertahan pada semangat perjuangan yang tidak pernah menyerah kepada Belanda. Baginda juga dikenal sebagai pencinta kesenian dan *pallontara*,

²⁰⁰ Sesungguhnya *Tomarilalang* La Mappangara Arung Sinrie memiliki hubungan darah dengan Raja Bone We Maniratu Arung Data (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 138-139; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 232-233).

²⁰¹ Pengerang Diponegoro tertawan dan diasingkan ke Manado oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1833 Pengerang Diponegoro dipindahkan tempat penawanannya ke Makassar dan ditempatkan di Fort Rotterdam.

yang tekun mempertahankan martabat Tanah Bone sebagai negeri panutan orang Sulawesi Selatan.²⁰²

Kematian Raja Bone We Maniratu Arung Data yang kemudian disusul oleh wafatnya *pongawa* (panglima perang) Kerajaan Bone, La Mappaewa Arung Lompu pada tahun yang sama, membuat pengaruh dari pihak yang berhaluan keras terhadap kehadiran Belanda mulai mengalami kemerosotan di Bone. Kemerosotan itu bukan hanya karena Raja Bone We Maniratu Arung Data termasuk salah satu yang sangat anti terhadap Belanda, tetapi juga karena panglima angkatan perang Bone juga sangat bersikeras menolak kehadiran Belanda. Seiring dengan kematian kedua tokoh yang berpendirian keras terhadap Belanda itu, pengaruh Tomarilaleng La Mappangara Sinrie yang pro Belanda mulai tampak kembali. Oleh karena We Maniratu Arung Data tidak memiliki keturunan, maka atas persetujuan dewan *Ade Pitu*, La Mappaseling Arung Pannyili (saudara We Maniratu), dilantik untuk menggantikan Arung Data menjadi raja Bone. Pada masa awal pemerintahannya keadaan di Bone sedikit guncang dengan makin meningkatnya suhu konflik antara mereka yang pro dan kontra terhadap Belanda. Sikap yang demikian ini tentu saja membuat raja Bone yang baru dilantik sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan agar tidak mengecewakan salah satu pihak. Karena desakan yang sangat kuat dari dalam, Raja Bone La Mappaseling Arung Pannyili terpaksa memulihkan kembali kedudukan La Mappangara Arung Sinrie sebagai *tomarilaleng* Kerajaan Bone pada 1836.²⁰³

²⁰² Raja Bone Maniratu Arung Data tidak mempunyai keturunan karena tidak pernah bersuami (Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 348). Poelinggomang, Edward L., 2012. I Manieng Arung Data, Srikandi Bone Abad XIX. Makalah pada Seminar "Penggalian Nilai Kepahlawanan Imanneratu Arung Data Raja Bone Ke-25" di Kabupaten Bone, pada 5 November 2012.

²⁰³ Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 233; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 140. Menurut Mattulada, bahwa sepeninggal Raja Bone Arung Data dan *Pongawa* Kerajaan Bone, maka pengaruh mantan Mangkubumi La Mappangara semakin meluas. Pendiriannya yang moderat itu mendapat dukungan dari raja-raja lain di Sulawesi Selatan, terutama *arung*

Pemulihan kembali kedudukan La Mappangara Arung Sinrie sebagai *tomarilalang* Kerajaan Bone, membuat kebijakan yang diambil terhadap Belanda cenderung moderat, sesuai dengan sikap La Mappangara sendiri. Sikap yang demikian itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Para pembesar kerajaan yang menentang kehadiran Belanda tidak tinggal diam dan mengorganisasikan kekuatan untuk menentang kelompok yang pro Belanda. Namun kelompok yang pro Belanda ternyata dapat menakutkan Raja Bone La Mappaseling Arung Pannyili, sehingga kelompok inilah yang berpengaruh. Berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh La Mappangara, raja Bone bersedia membuka kembali perundingan-perundingan dengan pemerintah Belanda pada 1837.²⁰⁴

Perundingan antara Bone dengan Belanda yang diwakili oleh Gubernur Makassar De Filietas Bousquet, membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi pihak Belanda. Pada 1838 utusan Gubernur Makassar yang terdiri atas Letnan Krovel dan Tomarilalang La Mappangara Arung Sinrie berhasil menggerakkan Raja Bone La Mappaseling Arung Pannyili untuk mengadakan perdamaian. Perjanjian perdamaian antara Bone dengan Belanda ditandatangani pada 13 Agustus 1838.²⁰⁵ Perjanjian yang dijalin antara keduanya untuk sementara dapat memulihkan keadaan di Sulawesi Selatan. Ketidakpuasan Bone, terutama yang menyangkut

Berru, raja Gowa, *datu* Sidenreng, dan *datu* Soppeng. Keadaan yang menguntungkan itu dipergunakan oleh pihak Belanda dengan sebaik-baiknya, untuk membangun kekuasaan pemerintah Hindia Belanda secara perlahan-lahan tetapi pasti di seluruh Sulawesi Selatan (Mattulada, 1998, *loc. cit.*).

²⁰⁴ Emanue, L.A. 1948. *Memorie van Overgave (MVO), Asistent Resident van Bone*. Periode 25 Oktober 1945-20 April 1948, hlm 31; Daeng Patunru Abd. Razak, 1989, *op cit.*, hlm. 253-254; Parelal, M.T.H. 1872, *op. cit.*, hlm. 86; Poelinggomang, dkk., *op. cit.*, hlm. 234; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 141.

²⁰⁵ Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, *op. cit.*, hlm. 306-307; Ijzereef, Willem, 1994, *op. cit.*, hlm. 38; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 254. Menurut M.T.H. Parelal, bahwa perjanjian itu secara definitif berlaku pada tanggal 26 Oktober 1846 (Parelal, 1872, *op. cit.*, hlm. 86).

dengan hak-hak istimewa yang didapatkan dari VOC, dapat diselesaikan dengan mencantumkan bahwa utusan atau wakil dari raja Bone atau raja Gowa mendapatkan kedudukan yang istimewa.²⁰⁶

Perjanjian perdamaian antara Bone dengan Belanda tersebut, ternyata dapat meredam perang yang muncul sejak tahun 1824. Kedua belah pihak berusaha sekeras mungkin untuk mematuhi persyaratan-persyaratan dalam Pembaharuan Kontrak Bungaya yang telah ditandatangani. Hal ini setidaknya sangat memberi kepuasan kepada pemerintah Belanda. Meskipun mereka tidak dapat menekan Bone, terlebih lagi untuk memaksa kerajaan ini tunduk kepada pemerintah Belanda. Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan satu kemajuan yang sangat positif, di tengah munculnya konflik sehubungan dengan kehadiran Belanda. Kepuasan itu semakin bertambah dengan sikap tegas Raja Bone La Mappaseling Arung Pannyili yang menolak uluran tangan James Brooke untuk membuat satu perjanjian persahabatan antara Bone dengan Inggris pada 1840.²⁰⁷

²⁰⁶ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 142; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*; Daeng Patunru, Abd. Razak *loc. cit.*

²⁰⁷ Meskipun demikian, hubungan antara Bone dengan Belanda kembali menjadi suram kemudian (Colenbrander, H.T. 1926. *Koloniale Geschiedenis III, De oost Sinds 1816*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 194); Emanuel, L.A. 1948, *Memorie van Overgave*, hlm. 31. Pada tahun itu Raja Serawak James Brook, seorang bangsa Inggris yang menjadi penguasa di Serawak, dengan kapalnya 'The Royalist' berlabuh di pelabuhan Bajoe. Sewaktu berada di Bone, James Brooke telah memberikan bantuan persenjataan kepada raja Bone. James Brooke kemudian mencoba untuk melaksanakan pengaruh dan kekuasaannya dengan mengajak raja Bone masuk dalam satu ikatan perjanjian. Namun demikian ajakan James Brooke ditolak oleh raja Bone. Sikap yang ditunjukkan oleh kerajaan ini dinilai oleh Belanda sebagai kepatuhan Bone atas perjanjian yang telah disepakati. Penolakan itu didasarkan pada Pasal 16 dari *spondentien met vreemde natien en het ontvangen gezanten zonder de toestemming van het Gouvernement is verboden "wilde houden"* (Dilarang mengadakan korespondensi dengan bangsa-bangsa asing dan dilarang menerima utusan-utusannya tanpa izin Gubernur). Arsip Makassar, No. 6/5. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta; Perelaer, M.T.H. 1872, *op. cit.*, hlm. 87-88; Mappangara, *op. cit.*, hlm. 142-143; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 234-235.

PASCA PERLAWANAN

Perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Raja Bone La Mappaseling Arung Pannyili dengan pemerintah Belanda pada 1838, ternyata memberi dampak yang kurang baik bagi Kerajaan Bone. Sebab, suhu politik di Bone cenderung tidak kondusif dan pertentangan antara yang pro dan anti Belanda kian memanas. Kelompok anti Belanda yang diorganisir oleh Arung Kajuara telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie. Konflik antara keduanya kemudian menimbulkan perang saudara pada 1842. Perselisihan itu akhirnya dapat diselesaikan dan keadaan dalam kerajaan kembali aman dan kondusif.²⁰⁸

Situasi aman di Bone tidak berlangsung lama. Pada tahun 1843 terjadi perang yang dilancarkan oleh para pembesar kerajaan yang berhaluan keras dan menentang sikap Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie. Perang yang dilancarkan oleh sekelompok bangsawan Bone yang tidak setuju terhadap sikap moderat Tomarilaleng La Mappangara, sehingga ia bersama pengikut-pengikutnya terpaksa meninggalkan Bone. Perselisihan ini tidak hanya melibatkan *tomarilaleng*, tetapi juga melibatkan raja Bone yang kemudian berselisih paham dengan Singkeru Rukka, yang juga berpandangan pro terhadap Belanda. Intrik-intrik persekongkolan mewarnai kehidupan di istana. Saling curiga mencurigai muncul. Oleh karena desakan dan tekanan-tekanan yang semakin keras, La Mappangara dan Singkeru Rukka bersama sejumlah pembesar-pembesar kerajaan terpaksa melarikan diri. Tomarilaleng La Mappangara melarikan diri ke Maros, dan di

²⁰⁸ Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, *op. cit.*, hlm. 307. Meskipun perang saudara itu dapat diakhiri namun bibit permusuhan antara keduanya tetap terwujud dalam bentuk lain. Bahkan dendam di antara kedua kelompok itu tetap ada di kalangan pembesar Kerajaan Bone.

tempat ini ia kemudian mendapatkan bantuan perlindungan dari pemerintah Belanda. Sementara Singkeru Rukka melarikan diri ke Barru dan mendapat perlindungan dari Arung Barru.²⁰⁹

Ketika Raja Bone La Mappaseling Arung Pannyili mangkat pada 29 Oktober 1845, terjadi perselisihan tentang siapa pengganti raja. Masalah ini muncul karena putra mahkota (Singkeru Rukka) yang seharusnya menggantikan Arung Pannyili menjadi raja Bone berada di Barru. Keadaan yang demikian itu dimanfaatkan oleh golongan yang anti terhadap Tomarilaleng Arung Sinrie untuk segera melantik penggantinya tanpa menunggu kedatangan Singkeru Rukka. Mereka beralasan bahwa tidak baik membiarkan mayat menunggu sekian lama, dan alasan ini amat ditunjang karena raja dan rakyat Bone adalah penganut agama Islam yang kuat. Usul ini kemudian disetujui oleh dewan *Ade Pitu* dan dilantiklah La Parenrengi Arung Pugi menjadi raja Bone. La Parenrengi kemudian diberi gelar Sultan Ahmad Saleh Muhiddin. Pelantikan ini tentu saja tidak disetujui oleh kelompok yang menginginkan kembalinya Singkeru Rukka.²¹⁰

Perselisihan tentang pergantian raja Bone tersebut, tidaklah selesai dengan dilantiknya seorang raja yang baru. Ketika itu di dalam kerajaan muncul intrik-intrik untuk menggulingkan

²⁰⁹ Arsip Makassar, No, 354/7. *Beknopt overzigt der Stukken en aangelegenheden rakende, de Regten welke Bone zich heft aangematigd over de Landen gelegen in de Tomini baai*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 144-145; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 235.

²¹⁰ Arung Pannyili tidak mempunyai keturunan. Menurut aturan pergantian tahta di Kerajaan Bone, terdapat lima orang yang mempunyai hak untuk dipilih menjadi raja Bone, yaitu Arung Palengoreng, Arung Kajuara, Arung Timurung, Arung Palakka, dan Arung Pugi (Sumber, Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, *op. cit.*, hlm. 309; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 254-255). Namun di antara kelima *ana' pattola* (putra mahkota) itu Arung Palakka (Achmad Singkeru Rukka) yang amat pantas untuk menduduki tahta kerajaan. Ia adalah *ana' pattola* (putra mahkota) dan mempunyai darah murni, satu persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang calon raja (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 145; Poelinggomang, dkk., 2005, *loc. cit.*).

raja yang sedang berkuasa dengan bantuan dari Singkeru Rukka dan Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie. Demikian pula hubungan antara Bone dengan Belanda pada awal pemerintahan La Parenrengi masih berjalan dengan baik yang ditandai dengan pengiriman utusan ke Makassar untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Namun dalam tahun-tahun berikutnya, hubungan antara Bone dengan Belanda mulai menemui banyak hambatan. Hal ini disebabkan karena La Parenrengi termasuk salah seorang bangsawan Bone yang tidak senang atas kehadiran Belanda. Bahkan dalam beberapa kesempatan, La Parenrengi menunjukkan pendiriannya, misalnya ia dengan tegas menolak kehadiran pemerintah Belanda sebagai penengah untuk menyelesaikan persoalan suksesi kepemimpinan di Kerajaan Soppeng.²¹¹

Setahun setelah La Parenrengi Arung Pugi dilantik menjadi raja Bone, timbul perselisihan antara Belanda dengan Bone sehubungan dengan pernyataan pemerintah menyangkut perubahan Gubernur Makassar menjadi Gubernur Celebes. Perubahan ini berkaitan erat dengan dicanangkannya pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan bebas pada 1846. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah terbukanya daerah Sulawesi Selatan oleh pihak luar. Pengalaman telah memperlihatkan bahwa orang-orang Inggris selalu berupaya untuk melakukan satu kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, baik itu yang berhubungan dengan ekonomi maupun politik, seperti yang dilakukan oleh James Brooke dengan Bone dan Wajo

²¹¹ Untuk keterangan lebih lanjut sehubungan dengan keterlibatan Belanda dalam perang saudara di Kerajaan Soppeng, baca, Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, *op. cit.*, 304-305; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 235 dan 239. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Kerajaan Bone dengan pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bukan hanya disebabkan karena perselisihan antara kelompok pro dan kontra atas kehadiran Belanda di daerah ini semakin memuncak, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi yang menghendaki adanya garis-garis yang jelas untuk bertindak dengan tepat dan benar (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 146).

pada 1840. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan kebijakan pelabuhan bebas, pemerintah Belanda mengumumkan perubahan nama *Gouverneur van Makassar* (Gubernur Makassar) menjadi *Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden* (Gubernur Celebes dan Daerah Taklukannya) pada November 1846. Diharapkan dengan perubahan nama ini, tidak hanya dapat menguntungkan Belanda dari segi politik dan ekonomi, tetapi juga hal itu setidaknya telah menutup kemungkinan pihak lain menanamkan kekuasaannya di daerah Sulawesi Selatan.²¹²

Perubahan gelar tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima oleh Bone. Sebab, perubahan itu dapat dianggap sebagai tanda bahwa kerajaan ini merupakan bawahan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, Bone mengambil tindakan tegas dengan membatalkan secara sepihak kontrak politik yang telah ditandatangani sebelumnya. Selain itu, ketidakpuasan Bone terhadap pernyataan sepihak yang dilakukan oleh Belanda diwujudkan juga dengan melarang pedagang-pedagang Bone untuk melakukan transaksi perdagangan dengan Makassar. Larangan ini tidak hanya diperuntukkan khusus untuk para pedagang Bone, tetapi juga menyangkut pedagang-pedagang dari Wajo dan Luwu.²¹³ Selain itu, Bone juga mencoba mengundang kerajaan-kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan cara mengirim utusan untuk bersama-sama membangun kekuatan dalam menghadapi Belanda.²¹⁴

²¹² *Staatsblad*, Tahun 1846, No. 605. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J. J. Rochussen (1845-1851). Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, *op. cit.*, hlm. 268-269; Poelinggomang, dkk., 2005, *op.cit.*, hlm. 240.

²¹³ Poelinggomang, dkk., 2005, *loc cit.*; Ijzereef, Willem, 1994, *op. cit.*, hlm. 23.

²¹⁴ Tindakan yang dilakukan oleh Kerajaan Bone itu mendapat tantangan dari pemerintahan Hindia Belanda karena melanggar isi Kontrak Bungaya yang diperbaharui pada 1824 (Emanuel, L. A. 1948, *Memorie van Overgave*, *loc. cit.*; Parelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 98-101.

Berdasarkan data perdagangan yang diperoleh diketahui bahwa akibat yang kurang bersahabat yang ditunjukkan oleh Bone terhadap Belanda, juga berpengaruh pada pelayaran niaga penduduk ke pelabuhan asing, khususnya pelayaran dari Makassar ke Singapura. Pada 1844 diketahui jumlah perahu dari Sulawesi yang mengunjungi kota pelabuhan itu sebanyak 110 perahu, dan menurun menjadi 40 perahu pada 1850.²¹⁵ Berkurangnya para pedagang dari Makassar yang mengunjungi Singapura disebabkan karena banyaknya pedagang yang langsung berkunjung ke Singapura tanpa menyinggahi pelabuhan Makassar. Hal ini membuat Makassar kini semakin merosot. Hubungan dagang secara langsung yang dilakukan oleh orang Bugis tanpa menyinggahi pelabuhan Makassar sangat merugikan Belanda. Keadaan yang kurang menguntungkan ini memaksa Gubernur Jenderal J.J. Rochussen berangkat ke Makassar untuk melihat lebih dekat apa sesungguhnya yang terjadi.²¹⁶

Meskipun kunjungannya tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dikehendaki, namun Rochussen membuat sebuah nota yang diserahkan kepada gubernur Celebes sebelum bertolak ke Batavia. Nota ini memuat tentang wawasan dan pendapatnya mengenai kepentingan-kepentingan perdagangan dan kenegaraan yang perlu dijadikan tuntunan dan petunjuk pelaksanaan. Nota ini kemudian menjadi prinsip dasar dalam penyelesaian persoalan Bone, yang berbunyi antara lain:²¹⁷

1. Gubernur Jenderal menyetujui secara menyeluruh dasar pemikiran untuk sejauh mungkin tidak mencampuri per-

²¹⁵ Namun dalam perkembangannya kemudian meningkat kembali pada tahun 1873 (Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 241).

²¹⁶ Gubernur Jenderal J. J. Rochussen (1845-1851) bertolak dari Batavia menuju Makassar pada 1849 dan penyelidikan yang dilakukan tidak mendatangkan hasil (Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 90). Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 160.

²¹⁷ Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 241-242; Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 89-91.

selisihan-perselisihan yang timbul dan terjadi di antara raja-raja di Sulawesi Selatan, karena campur tangan dalam hal tersebut, pada umumnya tidak didukung dengan kelengkapan data dan informasi mengenai situasi yang sedang terjadi, dan senantiasa bertentangan dengan keinginan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berselisih; campur tangan sedemikian itu biasanya berguna karena biaya yang harus dikeluarkan, tidak dikompensasi oleh pemerintah Belanda.

2. Perbedaan wawasan antara bekas VOC dan pemerintah Hindia Belanda harus dianggap sebagai akibat waktu, perubahan keadaan dan persetujuan antara Nederland dan Inggris Raya pada persetujuan London 1824, dimana *ste/se/*monopoli VOC dinyatakan dihapus selama-lamanya.
3. Keuntungan yang segera dapat dipetik Inggris dari penghapusan *ste/se/*monopoli itu, ialah dibukanya sebuah pelabuhan bebas di ujung barat Kepulauan Nusantara, dimana dengan mudah dapat diturunkan hasil-hasil bumi dari Indonesia dan ditukar dengan produk-produk Eropa dan Cina; hendaknya jangan dilupakan bahwa pemerintah tidak menggubris hal tersebut, tetapi sebaliknya mempertahankan dan mempersulit pajak masuk dan pajak keluar.
4. Tidaklah mengherankan apabila orang-orang Bugis membawa barang-barang dagangannya ke Singapura, atau orang-orang asing menjemput barang-barang itu di pelabuhan-pelabuhan Celebes sehingga perdagangan Makassar menjadi suram, terlebih lagi dengan dikeluarkannya larangan perdagangan budak-budak sebagai salah satu komoditi perdagangan yang paling banyak memberikan keuntungan.

Dalam situasi sedemikian itu dan upaya yang tidak tepat untuk segera memperluas kekuasaan, satu-satunya jalan untuk menangkal

pengaruh dari luar dan menghidupkan serta menguatkan pengaruh pemerintah Belanda ke dalam adalah menyatakan Makassar sebagai pelabuhan bebas atau terbuka. Hal ini dimaksudkan agar Makassar dapat kembali menjadi pusat perdagangan seperti sedia kala.²¹⁸

Selain itu, ketidakharmonisan hubungan Bone dengan Belanda juga karena Belanda mulai memperhatikan wilayah pantai timur Sulawesi, sehubungan dengan dicanangkannya pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada 1846. Perhatian tidak hanya ditujukan untuk memberantas bajak-bajak laut yang berkeliaran di perairan pantai timur Sulawesi, tetapi juga sehubungan dengan makin meluasnya pengaruh yang dimainkan oleh Bone, terutama dalam hal keterlibatan orang-orang Bugis dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dalam wilayah pantai timur Sulawesi. Pada 1846, raja Banggai telah melakukan pemberontakan untuk melepaskan diri dari Ternate. Pemberontakan yang dilancarkan oleh raja Banggai mendapat bantuan dari beberapa orang Bugis yang dipimpin oleh Oewa Mustakim dari Togian serta para kawula dari Moton dan Parigi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan yang ketiga yang dilakukan oleh Banggai.²¹⁹

Tindakan yang dilakukan oleh Banggai tersebut, memaksa Ternate untuk mengambil tindakan sehingga raja Banggai terpaksa melarikan diri. Pada mulanya raja Banggai melarikan diri ke Buton,

²¹⁸ Nota yang ditinggalkan oleh Gubernur Jenderal J. J. Rochussen itu telah menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil tindakan dalam berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Hindia Belanda bukan berarti membiarkan Kerajaan Bone beserta sekutu-sekunya untuk bertindak lebih jauh, yang pada akhirnya akan dapat mengganggu kewibawaan pemerintah Hindia Belanda (Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 90-91).

²¹⁹ Arsip Makassar, No. 354/7. *Beknopt overzicht der stukken en aangelegenheden rakende de Regten welke Bone zich heeft aangematigd over de Landen gelegen in de Tomini baai*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

kemudian karena tidak begitu merasa aman, ia memutuskan untuk mencari perlindungan ke Bone.²²⁰ Menurut laporan dari Khatib Mandon Museng pada 18 November 1848, diketahui bahwa syahbandar di Banggai yang diketuai oleh orang Bugis Bone dan berusaha untuk menarik para kepala distrik Banggai masuk ke dalam wilayah Bone, bahkan juga berusaha untuk memasukkan wilayah Ternate ke Kerajaan Bone.²²¹ Hal ini tampak dalam surat residen Ternate pada 10 Desember 1848, yang menyampaikan beberapa bukti bahwa raja Bone berulang kali mencoba untuk mendorong raja Tambuku dan Banggai untuk menjatuhkan Ternate. Hasutan-hasutan yang dilakukan oleh Bone terhadap wilayah-wilayah itu pada akhirnya akan menguntungkan Bone sendiri.²²²

Pemberontakan Banggai tersebut, mengundang pemerintah Belanda untuk memperhatikan wilayah pantai timur Sulawesi. Berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke Gubernur Celebes telah memberikan keyakinan, bahwa seolah-olah syahbandar di Tojo secara diam-diam dilaksanakan oleh raja Bone.²²³ Keadaan yang demikian ini membuat hubungan dengan Belanda berada dalam ketidakpastian. Itulah sebabnya Gubernur Celebes mengirim surat kepada raja Bone pada 30 Desember 1848, yang berisi beberapa penjelasan tentang daerah di wilayah tersebut.²²⁴

²²⁰ Arsip Makassar, No, 354/7. *Beknopt overzigt der stukken en aangelegenheden rakende de Bangai*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

²²¹ *ibid.*; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 244. Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 167-168.

²²² *Ibid.*; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 244-245.

²²³ Arsip Makassar, No, 354/7. *Beknopt overzigt der stukken en aangelegenheden rakende de Regten welke Bone zich heeft aangematigd over de Landen gelegen in de Tomini baai*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

²²⁴ Surat Gubernur Celebes kepada raja Bone, bernomor 512/I Z, tertanggal 30 Desember 1848, antara lain menjelaskan bahwa: (1). Dalam Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 Nopember 1667 yang dimuat pada Pasal 17, telah ditegaskan bahwa wilayah-wilayah yang terdapat di Teluk Tomini dan di Pantai Timur Sulawesi secara sah berada di bawah wewenang Sultan Ternate. (2). Pada tanggal 7 Juli 1683, sebagai akibat kekalahan Ternate melawan VOC pada tahun 1680, wilayah-wilayah itu diserahkan kepada VOC

Meskipun surat Gubernur Celebes itu telah menjelaskan bahwa Bone dalam segala hal tidak memiliki kekuasaan atas daerah-daerah yang dituntutnya, namun Bone telah memberikan beberapa argumentasi sehubungan dengan tuntutananya.²²⁵

Ketegasan sikap Bone tersebut, mendorong Belanda mengirim surat sekali lagi ke Bone pada 13 Juni 1849. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Belanda tidak memahami apa yang dimaksud oleh Bone.²²⁶ Keadaan yang demikian ini menyebabkan hubungan Belanda dan Bone semakin meruncing. Dalam keadaan itu Belanda berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan jalan damai. Selain mengorganisasikan kekuatan laut untuk menjaga agar kekuatan Belanda dan Ternate di wilayah itu dalam keadaan aman, juga menekankan untuk menghindari gangguan perdagangan Bugis di kawasan tersebut. Namun hubungan yang kurang baik antara

dan perdamaian dicapai pada tahun 1682. (3) Wilayah-wilayah itu kemudian dipinjamkan kembali kepada Sulatan Ternate, yang termasuk Balante, Tomaiki dan Tambuku di Sulawesi dan juga beberapa pulau termasuk Banggai. (4) Belanda tidak mengetahui apakah VOC atau pemerintah Belanda yang berkuasa telah menyerahkan kekuasaan sah atas daerah ini, baik semua atau sebagian, kepada salah satu leluhur raja Bone ataupun kepada orang lain. Namun perlu ditegaskan bahwa pemerintah Belanda merasa perlu memberitahukan bahwa guna mempertahankan kekuasaan yang sah atas daerah ini, persahabatan dengan Bone tetap dapat terjalin dengan syarat bahwa raja Bone dapat mengakui apa yang menjadi wilayah Belanda dan memerintahkan semua kawula Bone untuk mencegah segala penguasaan atas daerah ini (Arsip Makassar, No, 354/7, *loc. cit.*; Poelinggomang, dkk, 2005, *op. cit.*, hlm. 245).

²²⁵ Dalam surat tertanggal 2 April 1849 yang ditujukan kepada Gubernur Celebes, secara panjang lebar raja Bone mengulas tentang hak-hak yang dimilikinya secara tradisional, terutama kerjasama yang dilakukan sewaktu memenangkan perang melawan Gowa yang diakhiri dengan Perjanjian Bungaya 1667. Menurut raja Bone, kedudukan Ternate dengan Bone adalah sama. Oleh karena itu apa yang diperoleh oleh Ternate yang termuat dalam Pasal 17 Perjanjian Bungaya 1667, seharusnya juga Bone termasuk di dalamnya. Hal itu dipertegas kembali bahwa Bone merupakan sekutu tertua dari Belanda (Arsip Makassar, No, 354/7, *loc. cit.*; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 170).

²²⁶ Surat Kerajaan Bone yang ditujukan kepada Gubernur Celebes dipandang mengandung hal-hal yang tidak dimengerti. Terdapat dualisme dalam pemahaman tentang isi Perjanjian Bungaya (1667) dan juga tentang sekutu tertua. Menurut pemerintah Belanda, Bone menuntut terlalu banyak dari apa yang seharusnya diperolehnya sehubungan dengan kerjasamanya dengan VOC dalam menjatuhkan Gowa. Itulah sebabnya Gubernur Celebes sekali lagi mengirim surat No. 167/I Z, tertanggal 13 Juni 1849 kepada Bone (Arsip Makassar, No, 354/7, *loc. cit.*; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 245-246).

Bone dan Belanda tetap berjalan meskipun keduanya tetap mempertahankan pendirian masing-masing.²²⁷

Pemerintah Belanda kembali mengirim surat kepada Bone pada 12 Mei 1852. Isi suratnya tetap menekankan bahwa tidak ada gunanya Bone mempersoalkan kekuasaan di wilayah pantai timur Sulawesi yang merupakan hak milik yang sah pemerintah Belanda sesuai dengan Perjanjian Bungaya 1667. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bone, maka pemerintah Belanda akan bertindak tegas, kalau perlu dengan menggunakan kekerasan. Namun desakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tidak mengubah sedikit pun pendirian Bone. Melalui suratnya pada 16 September 1852, 16 Agustus 1853, dan 5 April 1854, Bone secara tegas mengatakan bahwa Bone dan bukan Belanda yang berhak atas daerah pantai timur Sulawesi dan pulau-pulau yang terletak di sekitarnya.²²⁸

Sikap tegas Bone itu direalisasikan dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di daerah Kaeli, pantai selatan Teluk Tomini, dan Kepulauan Togian. Menurut Kolonel van den Hart, mantan Gubernur Celebes, jika perluasan ini tidak ditanggulangi dengan cepat, pemerintah Belanda akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk menaklukkan Parepare, Teluk Suppa, Palu, dan Parigi, serta menempatkan satu-an-satuan tempur di wilayah tersebut pada 1854. Penguasaan daerah ini tidak hanya sebagai upaya untuk memblokir Bone, tetapi juga karena daerah-daerah ini merupakan daerah yang sangat potensi dari segi ekonomi. Menurut van den Hart, Celebes pada masa itu menghasilkan 100 ribu pikul kopi pertahun yang berasal dari daerah Bone, Wajo, Gowa, Bantaeng, Mandar, dan Sidenreng,

²²⁷ Arsip Makassar, No, 354/7, *loc. cit.*; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 171-172..

²²⁸ Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 95; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 246.

yang hampir seluruhnya mengalir ke Singapura.²²⁹

Selain itu, ketegangan antara Raja Bone La Parenrengi Arung Pugi dengan pemerintah Belanda juga terkait dengan meninggalnya Daeng Magassing pada 12 Februari 1852.²³⁰ Daeng Magassing merupakan pamong Bonerate yang berada di bawah kekuasaan Bone ditahan pada Oktober 1851, dengan tuduhan bahwa ia terlibat dalam perampokan yang terjadi di Bawean. Ia kemudian dibawa ke Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam penyelidikan yang dilakukan terhadap Daeng Magassing ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa ia terlibat dalam perampokan itu. Untuk penyelidikan lebih lanjut ia dibawa ke Surabaya. Tindakan yang dilakukan oleh Belanda ini menimbulkan kemarahan raja Bone, karena dianggap sebagai suatu penghinaan bagi Bone. Itulah sebabnya pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk membebaskan Daeng Magassing. Namun sebelum dibebaskan, Daeng Magassing secara misterius meninggal dalam penjara.²³¹

Persoalan lainnya yang memicu ketegangan antara Belanda dan Bone adalah pengibaran bendera Belanda yang dilakukan secara terbalik di wilayah Bone. Berita tentang pengibaran bendera

²²⁹ Selain itu, ditentukan pula bahwa Residen Manado dalam laporannya mengatakan, bahwa daerah-daerah pesisir Teluk Tomini dan Kepulauan Togian menghasilkan emas, penyu, teripang, kain cita, tembakau, sagu, lilin, sarang burung, dan lain sebagainya. Hasil-hasil seluruhnya dikirim ke Singapura dan ditukarkan dengan alat-alat dari besi, senjata, dan bahan peledak yang kesemuanya itu menghidupkan perdagangan antara Inggris dan Kerajaan Bone. Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 246-247; Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 103-104.

²³⁰ Pada tahun 1847 Daeng Magassing, pamong Bonerate yang berada di bawah kekuasaan Bone, ditangkap karena dituduh bekerjasama dengan perompak-perompak laut. Letnan Satu Du Cloux berangkat ke Bonerate untuk menyelidiki hal itu. Penyelidikan yang dilakukan tidak mendapatkan keterangan yang berarti. Oleh karena itu, Daeng Magassing dibebaskan (Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 97).

²³¹ Meskipun pemerintah Belanda telah menyatakan rasa penyesalannya dan minta maaf atas kejadian tersebut, namun raja Bone sangat terpukul mengenai kejadian itu. Arsip Makassar, No. 354/7A. *Beknopt overzicht der stukken en aangelegenheden rakende Opstand op Bangaide*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta; Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 97-78; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 247.

Belanda secara terbalik pertama kali disampaikan oleh Ramberge, utusan Belanda yang membawa sepucuk surat untuk raja Bone pada Oktober 1855.²³² Selama mengadakan pembicaraan yang dilakukan di Palatte, sebuah tanjung yang terletak di Teluk Bone, ia melihat banyak kapal-kapal yang berlayar di perairan Bone yang mengibarkan bendera Belanda secara terbalik yang menurut informasi yang diterimanya dilakukan atas anjuran Raja Bone La Parenrengi Arung Pugi. Hal ini disampaikan kepada pemerintah Belanda di Makassar.²³³ Berita yang sama mengenai pengibaran bendera yang dilakukan secara terbalik juga disampaikan oleh Ince Jaya.²³⁴

Sementara itu, ketidakpuasan Singkeru Rukka yang disebabkan karena kedudukannya sebagai pewaris tahta Kerajaan Bone dibatalkan lantaran tidak menghadiri pemakaman Raja Bone La Mappaseling Arung Panyili. Hal ini tidak hanya mengecewakan dirinya sendiri, tetapi juga pemerintah Belanda dan golongan yang pro terhadap Belanda. Oleh karena itu, ia berusaha mencari

²³² Pertemuan antara utusan Belanda dengan raja Bone sedikit tercemar karena sewaktu surat tersebut dibuka, raja Bone jatuh pingsan dan diyakini bahwa penyebabnya adalah surat tersebut yang sengaja diracuni. Raja Bone tidak mengambil tindakan tegas karena raja Bone tidak menginginkan permusuhan dengan Belanda. Namun hal itu menunjukkan bahwa ada upaya dari Belanda untuk menjatuhkan Kerajaan Bone (Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 101-102; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm.175).

²³³ Mengenai pengibaran bendera yang dilakukan secara terbalik di perairan Bone, pemerintah Belanda telah mendengarnya. Namun tidak ada kepastian dan juga bukti-bukti yang nyata.

²³⁴ Pada tahun 1856, Ince Jaya, seorang kirir dan juga sekaligus seorang zending, diutus ke Bone untuk membawa sepucuk surat sehubungan adanya keputusan pemerintah Belanda pada 6 Agustus 1856, No. 43, yang berisi tentang masuknya Kerajaan Tallo dalam kekuasaan Belanda. Namun pada waktu yang bersamaan, terlebih dahulu ada seorang kurir dari Buton yang sedang beraudensi dengan raja Bone. Oleh karena itu Ince Jaya harus menunggu sampai utusan Buton itu kembali. Ince Jaya tiba di Bone pada 22 Nopember 1856 dan baru diberi waktu untuk menghadap pada 18 Desember. Waktu yang cukup lama itu dianggap sebagai suatu penghinaan oleh pemerintah Belanda. Selain itu, hal ini juga dapat berarti bahwa pemerintah Belanda sama sekali tidak memiliki hak di Bone. Arsip Makassar, No. 11/3. *Kort verslag over de maand November 1856, Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta; Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm., 247-248.

dukungan, tidak hanya dari raja-raja lokal tetapi juga dari pemerintah Belanda. Suasana di dalam kerajaan semakin mengkhawatirkan, karena Singkeru Rukka bersama para pendukungnya semakin menunjukkan sikap ketidakpuasannya dan mencoba melakukan persiapan untuk melancarkan kudeta terhadap raja yang sedang berkuasa. Berkat dukungan dari sejumlah pembesar kerajaan, di antaranya La Mappangara Arung Sinrie yang pro terhadap kembalinya Belanda, Singkeru Rukka melancarkan kudeta pada 1852.²³⁵ Namun usahanya itu mengalami kegagalan, karena kurangnya dukungan yang diperoleh dari dalam kerajaan, dan bantuan dari pihak Belanda yang sangat diharapkan tidak kunjung datang. Ia kemudian terpaksa meninggalkan Bone dan bermukim di Sinjai.²³⁶

Singkeru Rukka datang ke Makassar pada Juni 1853, untuk melaporkan kepada pemerintah Belanda bahwa keadaan di Bone dalam keadaan siap untuk mengadakan perubahan besar seperti yang dikehendaki oleh rakyat Bone. Diharapkan dengan kunjungan ini pihak pemerintah Belanda akan memberikan bantuan jika keadaan menghendaki demikian. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Singkeru Rukka menjadi bahan pertimbangan pemerintah Belanda. Untuk mencari tahu apakah hal itu benar, gubernur Celebes mengunjungi Barru dalam perjalanannya ke pantai barat. Selain itu, gubernur Celebes juga mencari informasi tentang keadaan yang sedang terjadi di Bone dari raja Tanete dan Sidenreng.²³⁷

Pemerintah Belanda tentu saja senang dengan terjadinya perpecahan dalam istana di Bone. Sebab, sejak awal sering mencari alasan untuk ikut campur tangan secara langsung dalam

²³⁵ Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, op. cit., hlm. 308-309; Sumber Arsip, 1852, *Algemene Overzicht van Buitenbezittingen*. Register No. 1.

²³⁶ Tanda-tanda ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh Singkeru Rukkaitu telah diketahui oleh pemerintah Belanda di awal tahun 1852 (Daeng Patunru, 1989. op. cit., hlm. 262.

²³⁷ Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, op. cit., hlm. 309; Poelinggomang, dkk., 2005, op. cit., hlm. 236.

pemerintahan di Bone. Namun apa yang diinginkan oleh Singkeru Rukka tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Belanda. Singkeru Rukka tidak berada dalam wilayah kekuasaan Belanda, bahkan apa yang sedang terjadi merupakan sengketa dalam negeri Bone. Meskipun demikian, perpecahan yang terjadi dalam di Bone menjadi perhatian besar pemerintah Belanda yang selalu ingin mencari celah dalam menanamkan pengaruh dan kekuasaannya. Selain itu, pemerintah Belanda juga berusaha untuk sedapat mungkin menjaga keamanan di wilayah ini, baik di daerah kekuasaannya maupun di wilayah sekitar kekuasaannya. Oleh karena itu, perpecahan yang sedang terjadi di Bone dan permohonan dari Singkeru Rukka, harus mendapatkan perhatian yang besar karena dari segi kepentingan politik keadaan yang demikian seharusnya tidak ditolak.²³⁸

Meskipun demikian, pemerintah Belanda ternyata tidak memberikan satu pengharapan kepada Singkeru Rukka. Sebab dengan pertimbangan yang jauh ke depan dan mengingat situasi yang kurang menguntungkan karena keadaan yang belum mengizinkan. Juga karena kepastian yang belum jelas mengenai hubungan Bone dapat lebih harmonis dibandingkan dengan keadaan saat itu. Oleh karena itu, pemerintah Belanda tidak akan mengambil tindakan perang terhadap raja Bone selama ia diakui sebagai raja yang sah dan ternyata tidak melawan pemerintah Belanda.²³⁹ Singkeru Rukka yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah Belanda, sehingga ia mencoba untuk mencari bantuan kepada kerajaan-

²³⁸ Tampaknya pemerintah Belanda menyadaribetul bahwa timbulnya kekacauan di sekitar wilayah kekuasaannya akan mempengaruhi aktivitas perdagangan di wilayah kekuasaan pemerintah Belanda (Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 236-237; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 148-149).

²³⁹ Untuk bertindak lebih jauh, perintah Belanda sangat berhati-hati karena tingkah laku politik di daerah ini amat sulit untuk diduga. Gagalnya aksi kudeta yang dilakukan oleh Singkeru Rukka erat hubungannya dengan penolakan Belanda untuk membantunya (Sumber Arsip, 1973, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*, *op. cit.*, hlm. 309; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 149).

kerajaan yang berada dalam kekuasaan Belanda. Namun karena Singkeru Rukka tidak berada dalam wilayah kekuasaan Belanda, sehingga ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Belanda.²⁴⁰

Berbeda halnya dengan La Mappangara Arung Sinrie, yang harus meninggalkan Bone karena perselisihannya dengan para bangsawan Bone yang tidak senang dengan pandangan politiknya sehubungan dengan kehadiran Belanda. Kehadirannya di Maros, dalam wilayah kekuasaan Belanda, berarti ia berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda. Supaya tidak menimbulkan salah sangka dari pihak Bone, La Mappangara tidak diperbolehkan meninggalkan daerah persembunyiannya selama Raja Bone La Perenrengi Arung Pugi masih memerintah. Himbauan ini dipatuhi oleh La Mappangara, kecuali ada hal-hal yang mendesak yang memaksanya untuk pergi ke Bone. Singkatnya, apapun yang dilakukan oleh La Mappangara Arung Sinrie dan Singkeru Rukka secara politik menguntungkan Belanda, namun pihak Belanda masih banyak bersikap diam mengingat perkembangan politik yang sering tidak menentu di Sulawesi Selatan.²⁴¹

Setelah kematian Raja Bone La Perenrengi Arung Pugi pada 16 Februari 1857, dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone sepakat memilih dan mengangkat Besse Kajuara (istri La Perenrengi Arung Pugi) untuk menggantikannya menjadi raja Bone.²⁴² Setelah mendapat ampunan

²⁴⁰ Meskipun demikian, sikap berdiam diri yang ditunjukkan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika Singkeru Rukka memberitahukan keadaan yang sedang terjadi, memberikan sedikit harapan, bahkan ia merasa puas akan pertemuannya dengan pemerintah Hindia Belanda di Makassar (Poelinggomang, dkk, 2005, *op. cit.*, hlm. 237).

²⁴¹ Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie meninggal di Maros pada tanggal 9 Januari 1854 (Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 150).

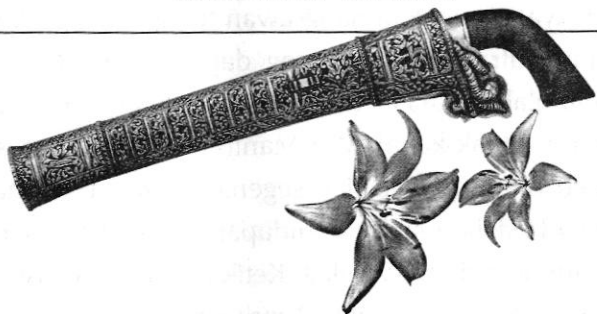
²⁴² Bakkers, J.A., 1866. "Leenvorstendom Boni", dalam *Tijdschrift van Nederlandsch – Indie (TNI)*, XV, hlm. 184. Menurut M.T.H. Perelaer, bahwa Raja Bone La Perenrengi Arung Pugi mangkat pada tanggal 14 Februari 1857. Lain halnya dengan L.A. Emanuel, bahwa La Perenrengi Arung Pugi meninggal pada tanggal 16 Februari 1857. Kemungkinan yang benar adalah pada tanggal 16 Februari 1857. Sewaktu pemerintah Belanda gagal

dari dewan *Ade Pitu* dan Raja Bone Besse Kajuara, Singkeru Rukka bersama para pengikutnya kembali ke Bone pada 1858. Namun demikian, Singkeru Rukka tidak diberi satu jabatan pun dan tingkah lakunya senantiasa diawasi. Sementara itu, pemerintah Belanda berharap kepada Raja Bone Besse Kajuara, agar hubungan Bone dengan Belanda dapat dibina lebih baik. Namun harapan itu tampaknya jauh dari kenyataan. Sebab, Besse Kajuara sama halnya dengan suaminya, bahkan lebih menunjukkan sikap yang kurang bersahabat dengan Belanda. Sikapnya yang kurang senang terhadap Belanda, ditunjukkan dengan menganjurkan agar setiap kapal yang menggunakan bendera Belanda dan melewati perairan Bone harus ditembak hingga tenggelam.²⁴³ Sikap keras inilah yang mendasari pemerintah Belanda kembali melancarkan serangan militer terhadap Bone pada 1859-1860.[]

menaklukkan Bone pada awal tahun 1859, Ahmad Singkeru Rukka Arung Palakka melarikan diri ke Makassar. Di tempat ini ia kemudian mengadakan kerjasama dengan Belanda untuk sama-sama menyerang Bone pada 1859-1860 (Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 42); .

²⁴³ Poelinggomang, dkk., 2005, *op. cit.*, hlm. 250; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 151 dan 181.

KESIMPULAN



We Maniratu Arung Data adalah putri Raja Bone La Tenritappu Toappaliweng dari istrinya yang bernama We Padauleng Arung Timurung. Ia dilahirkan di Lelebbata–Watampone pada 14 Oktober 1776. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan tinggi *anak pattola* (pewaris tahta atau putra mahkota) yang dapat diangkat menjadi raja pada sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, sejak masa kanak-kanak We Maniratu Arung Data selalu ditempah oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabat terdekat yang berada dalam siklus kehidupannya agar kelak menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Ketika La Mappasessu Toappatunru diangkat menggantikan La Tenritappu menjadi raja Bone pada 1812, We Maniratu Arung Data diberi amanah untuk menjadi panglima (*pongawa*) laskar wanita. Setelah La Mappasessu wafat, We Maniratu Arung Data diangkat menjadi raja Bone pada 1823, dan ia merupakan salah seorang dari enam raja wanita yang pernah memerintah Kerajaan Bone. Pada masa pemerintahannya kembali terjadi konflik berupa perang antara Bone dengan Belanda yang berlangsung hingga akhir kekuasaannya pada 1835.

Konflik antara Bone dengan Belanda tersebut, kembali bergolak setelah Belanda mulai melakukan penataan pemerintahan pasca

kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan pada 1816. Oleh karena Bone menolak dan menentang kembalinya Belanda di daerah ini. Sebab hal itu bukan hanya mengancam eksistensi Kerajaan Bone, tetapi juga mengancam pengaruh dan kekuasaannya atas sejumlah wilayah yang diduduki, seperti Maros, Pangkajene, Labakkang, Segeri, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Bahkan tidak sedikit kerajaan di daerah ini yang menyandarkan kewibawaan dan kekuatannya pada Bone. Dengan demikian, penolakan Bone terhadap kembali Belanda, antara lain karena Bone tidak rela pengaruh dan kedudukan kekuasaan terhadap sejumlah wilayah dan kerajaan di daerah ini beralih kepada pemerintah Belanda.

Selain itu, penolakan Bone terhadap kembalinya Belanda, juga karena keengganan pemerintah Belanda untuk mengakui kedudukan Bone sebagai mitra setara dan ketua persekutuan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Hal itulah yang antara lain menjadi penyebab hubungan antara Bone dengan Belanda menjadi tegang yang kemudian berujung pada timbulnya konflik antara kedua belah pihak. Pada awalnya Raja Bone We Maniratu Arung Data bersikap lunak terhadap Belanda dengan harapan bahwa mereka dapat mengembalikan hak-hak istimewa Bone sebagai mitra setara dan ketua persekutuan kerajaan, yang selama Inggris berkuasa tidak diakui lagi. Namun harapan itu tidak kunjung teralisasi, bahkan pemerintah Belanda melanjutkan kebijakan yang dilaksanakan Inggris. Penolakan pemerintah Belanda itu, dibalas pula dengan penolakan Bone atas kembalinya Belanda di Sulawesi Selatan.

Konflik antara kedua belah pihak semakin meruncing ketika pemerintah Belanda mengundang raja Bone, untuk membicarakan pembaharuan Kontrak Bungaya. Sebab, Raja Bone We Maniratu Arung Data hanya mengirimkan utusan untuk

menghormati kedatangan Gubernur Jenderal Van der Capellen, dan menyampaikan tuntutan Bone bahwa semua penguasa kerajaan di Sulawesi Selatan yang hendak berhubungan dengan pemerintah Belanda di Makassar harus dengan perantaraan raja Bone. Van der Capellen menolak tuntutan itu dan memberi waktu 15 hari kepada raja Bone untuk berpikir dan mengubah sikapnya. Penolakan itu sangat mengecewakan raja Bone, sehingga dibalas pula dengan penolakan untuk menghadiri pertemuan lanjutan mengenai pembaharuan Kontrak Bungaya. Itulah sebabnya Van der Capellen memutuskan untuk menaklukkan kerajaan yang bekerjasama dengan Bone, sebagai ancaman dan segera mengubah sikap politiknya.

Namun kegagalan pemerintah Belanda menaklukkan Suppa pada Agustus 1824, mendorong raja Bone memerintahkan laskar Bone yang bertahan di Lamuru dan Camba kembali melancarkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Labakkang, Pangkajene, dan Maros pada September 1824. Demikian pula di wilayah bagian selatan, laskar Bone kembali melakukan penyerangan terhadap kubu pertahanan Belanda di Bulukumba dan Bantaeng pada Oktober 1824. Itulah sebabnya pimpinan pasukan Belanda di Makassar, Kolonel van Schalle mendesak pemerintah Belanda di Batavia, agar secepatnya mengirimkan bantuan pasukan dan persenjataan yang memadai untuk melakukan penyerangan terhadap Bone. Sebab Bone merupakan salah satu pusat perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan. Bantuan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Bischoff tiba di Makassar pada November 1824. Menyusul pasukan ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal van Geen yang tiba di Makassar pada Januari 1825.

Serangan laskar Bone terhadap sejumlah wilayah kekuasaan Belanda tersebut, memicu terjadinya konflik terbuka berupa perang

antara kedua belah pihak. Pemicu lainnya adalah pembaharuan Kontrak Bungaya. Sebab isi kontrak itu bukan hanya membuat Bone kehilangan banyak kekuasaan yang selama ini digenggamnya, tetapi juga terdapat banyak hal yang dirasakan tidak adil dalam isi kontrak tersebut. Wibawah dan kekuasaan Bone terhadap kerajaan-kerajaan yang menghadiri pertemuan mulai memudar. Bahkan pemerintah Belanda menjadi pelindung dan perantara bagi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kenyataan itu menyakitkan bagi Bone dan merasa tersingkir, sehingga bangkit melawan Belanda. Itulah sebab sejumlah wilayah kekuasaan Belanda yang berbatasan dengan Bone diserang dan diduduki.

Oleh karena itu, pemerintah Belanda segera memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Van Geen untuk menaklukkan Bone. Sebelum menyerang ibukota kerajaan –Watampone, pasukan Belanda terlebih dahulu menyerang kedudukan laskar Bone di Maros, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Setelah itu pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan di pantai Bajoe pada 27 Maret 1825. Pendaratan itu mendapat perlawanan dari laskar Bone di bawah pimpinan Raja Bone We Maniratu Arung Data. Namun dalam pertempuran sengit untuk mempertahankan Watampone, laskar Bone mengalami kekalahan, sehingga ibukota kerajaan itu berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada 29 Maret 1825. Kekalahan yang dialami oleh laskar Bone tersebut, memaksa dewan peperangan memutuskan untuk mengungsikan raja Bone ke daerah pedalaman.

Meskipun pasukan Belanda berhasil mengalahkan laskar Bone dan menduduki Watampone, tetapi mereka belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Sebab, mereka tidak berhasil menangkap raja Bone dan memaksa pemerintah kerajaan itu tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Selama raja Bone masih

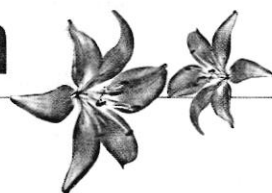
hidup, berarti selama itu pula perlawanan senantiasa terjadi. Itulah sebabnya segala upaya dilakukan untuk mencari keberadaan raja Bone. Namun upaya itu juga mengalami kegagalan karena rakyat atau penduduk tidak mau memberitahukan dan tidak bersedia membantu pasukan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa raja Bone bersama para pembesar kerajaan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam perlawanan terhadap Belanda. Kegagalan itu juga karena pasukan Belanda terpaksa harus ditarik kembali ke Jawa sehubungan munculnya perlawanan Pangeran Diponegoro.

Setelah pasukan Belanda meninggalkan Bone, raja Bone bersama para pembesar kerajaan kembali ke Watampone. Mereka bahu-membahu dengan rakyat Bone untuk memperbaiki segala kerusakan akibat perang dan berusaha dengan sekuat tenaga memulihkan kembali segala tata kehidupan masyarakat. Namun dalam upaya-upaya itu, mereka kembali dihadapkan suatu persoalan, yaitu munculnya konflik atau perpecahan di antara para bangsawan tinggi Bone. Konflik intern yang terjadi itu karena berbeda pandangan terhadap kembali Belanda di Sulawesi Selatan. Di satu pihak timbul pemikiran untuk bekerjasama dan menerima kembali kehadiran Belanda, sedangkan di pihak lain terdapat kelompok yang tetap menolak bekerjasama dan tidak menyetujui kehadiran Belanda. Untuk mengatasi perbedaan itu, raja Bone menegaskan kembali sikap dan pendiriannya terhadap Belanda, bahwa selama ia masih hidup dan menjadi raja Bone (*arumpone*), maka ia akan mengusir setiap orang Belanda yang mencoba menginjakkan kakinya di Tanah Bone.

Sikap dan pendirian Raja Bone We Maniratu Arung Data yang menolak kembalinya Belanda itu tetap ditunjukkan sampai ia wafat pada 1835. Ia tetap konsekuen pada sikap dan prinsip perjuangannya menentang pemerintah Belanda sampai akhir

hayatnya. Nama dan jasa-jasanya tetap akan dikenang, sebab ia bukan hanya seorang raja yang pantang menyerah dan patriotik yang konsekuen, tetapi ia juga seorang srikandi yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan dengan bangsa lain. Bahkan ia tidak segan-segan mengorbankan seluruh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan tanah airnya. Kepemimpinan dan sikap perjuangannya merupakan suriteladan dalam kehidupan masyarakat. Ia telah meninggalkan jejak kakinya pada pasir zaman yang tetap akan dikenang oleh masyarakat, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Banyak pemimpin yang kita miliki, tetapi hanya sedikit yang dapat meninggalkan jejak kesejarahan untuk bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu, kepemimpinannya, sikap dan prinsip perjuangannya serta patriotismenya yang mengandung nilai-nilai luhur patut dikenang dan diteladani oleh kita semua dalam mengisi kemerdekaan di era reformasi sekarang ini.[]

Daftar Pustaka



Arsip dan Lontarak

Adatrechtbundels Tahun 1925. "Kasoewijang, Ornaments en Ambtvelden".

Adatrechtbundels Tahun 1929. "Heffingen van Rechten op Grond in Boeginesche en Makkarsche Landen".

Adatrechtsbundel Tahun 1932. Oogstfesten en Grondenrecht in Soppeng Riaja.

Anonim, 1910. Nota van Toelichting bij de Korte Verklaring Geteekend en Beeedigd door den Adatoewang en de Hadatsleten van het Landschap Sawito op 27 sten Mei 1908, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde (TBG) Jilid LII*.

Arsip Bone, 1912. *Memorie Betreffende De Onderafdeeling Bone Met Bijlagen (Opgemaakt Ingevalge Schrijven Van Het Departemen Van Oorlag VII Afdeeling DD. 12 Agustus 1912 No. 765)*. Ditrasliterasi dan diterjemahkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (2007).

Arsip Makassar, No. 6/5. *spondentien met vreemde natien en het ontvangen gezanten zonder de toestemming van het Gouvernement is verboden "wilde houden"*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

- Arsip Makassar, No. 11/3. *Kort verslag over de maand November 1856, Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Arsip Makassar, No. 354/7. *Beknopt overzicht der Stukken en aangelegenheden rakende, de Regten welke Bone zich heft aangematigd over de Landen gelegen in de Tomini baai*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta.
- Arsip Makassar, No. 354/7. *Beknopt overzicht der stukken en aangelegenheden rakende de Bangai*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Arsip Makassar, No. 354/7A. *Beknopt overzicht der stukken en aangelegenheden rakende Opstand op Bangaide*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Emanuel, L.A. 1948. *Memorie van Overgave (MVO), Asistent Resident van Bone*. Periode 25 Oktober 1945-20 April 1948.
- Leyds, W.J. 1940. *Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar*. Majene: 9 Februari 1940.
- Lontarak Akkarungeng Bone*. Koleksi Andi Maryam, Staf Peneliti dan Penerjemah Naskah *Lontarak* pada Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.
- Lontarak* atau *Surek Bilang* (Catatan Harian) Raja Bone La Tenritappu Toappaliweng. Makassar: de la macca.
- Lontarak Attoriolong Bone*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. *Regeerings Almanak* (Laporan Tahunan: 1898).
- Staatsblad van Nederlandsche-Indie*, Tahun 1846, No. 605.
- Sumber Arsip. 1854. Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (TNI)*, Jilid II.
- Sumber Arsip. 1971. *Staakundig Overzicht van Nederlandsh Indie*,

1837(Laporan Politik Tahun 1837). Djakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sedjarah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), No. 4.

Sumber Arsip. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Djakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), No. 5,

Sumber Arsip, *Memorie Betreffende de Onderafdeeling Bone met Bulagen*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan.

Sumber Arsip, 1852. *Algemene Overzicht van Buitenbezittingen*. Register No. 1.

Buku, Jurnal, Disertasi, Tesis, dan Laporan Penelitian

Abduh, Muhammad. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

Abdullah, Hamid. 1991. *Andi Pangerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ali, Andi Muhammad. 1984. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai.

Ali, Andi Mauhammad. 1986. *Rumpa'na Bone (Perang Bone) 1905*. Watampone: Damai.

Amir, Muhammad. 2011. *Konflik Balanipa-Belanda di Mandar 1862-1872*. Makassar: Tesis Universitas Hasanuddin.

Amir, Muhammad, dkk. 2012. *Konflik dan Perubahan Sosial*,

Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan Abad XIX. Makassar: De La Macca.

- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Ininnawa.
- Asba, A. Rasyid. 2010. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis, Raja Tenete Lapatau Menentang Belanda*. Yogyakarta: Ombak.
- Anonim. 2013. "Persekutuan Tujuh Anang". *Dalam, Majalah Proviles, Vol.V/No.28/April 2013*.
- Bakkers, J. A. 1866. "Leenvorstendom Boni", dalam *Tijdschrift van Nederlandsch – Indie (TNI)*, XV.
- Caldwell, Ian. 1995. Power, State and Society Among the Pre-Islamic Bugis, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkendunde, deel 151*.
- Colenbrander, H.T. 1926. *Koloniale Geschiedenis III, De oost Sinds 1816*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Daeng Patunru, Abd. Razak 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Daeng Patunru, Abd. Razak, dkk. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Daeng Patunru, Abdurrazak. 2004. *Bingkisan Patunru: Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Ernawati. 1997. *Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada Tahun 1905*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana IAIN Alauddin.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1973. *Beberapa Ungkapan Dalam Lontarak Tentang Kepemimpinan dan Pemerintahan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.

- Friedericy, H.J. 1933. "De Standen bij de Boeginezen en Makassaren", dalam *Bijdragen tot de Taal, Landen en Volkenkunde van Nederlandsche Indie (BKI)*.
- Gilberr J. Garraghan. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press.
- Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hamid, Abu, dkk. 2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, hlm. 220.
- Hamzah, Aminah P. 1984. "Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan", Ujung Pandang: Pemda Tk.I. Sulawesi Selatan.
- Hamonic, Gilbert. 1983. "Pengantar Studi Perbandingan Kosmologi Sulawesi Selatan", dalam *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ijzereef, Willem. 1994. *De wind en bladeren, Hiererchi en autonomie in Bone en Polombangkeng 1850-1950*. Groningen: Rijksuniversiteit.
- Kadir, Harun, dkk. 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

- Kemp, P.H. van der. 1910. *De Teruggave der Oost Indische Kolonien 1814-1816: Naar Oorspronkelijke Stukken*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kemp, P. H., van der. 1901. *Brieven Van en aan Mr. H.J. Van de Graaff 1816-1826, eenbijdrage tot de kennis der Oost-Indische Bestuurstoestanden Onder de Regeering van G.A.G.P. Baron Van Der Capellen*. Batavia: Albrecht & Co, Tweede deel.
- Kila, Syahrir. 2012. *Ketuguhan Dalam Menegakkan Siri'; Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda*. Makassar: de la macca.
- Kooreman, P. J. 1883. *"De Feitelijke Toesland in het Gouvernementsgebied van Zuid Celebes"*
- Lamallongeng, Asmat Riady. 2012. Nilai Perjuangan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV (1823-1835) Melawan Belanda. Makalah pada Seminar "Penggalian Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV, di Watampone, 5 November 2012.
- Latif, Abd. 1997. *Yang Menentang dan yang Bersahabat Inggris di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Tesis (belum terbit) Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Latif, Abd. 2012. *Kofederasi Ajatappareng 1812-1906: Penyelidikan Terhadap Sejarah Politik Orang Bugis di Sulawesi Selatan*. Makassar: Draf Disertasi.
- Limbugau, Daud. 1989. *Perjalanan Sejarah Kota Maritim, Makassar Abad Ke 19-20, Dalam Persepsi Sejarah Kawasan Pantai, Ujung Pandang*: Unhas.
- Leur, J.C. van dan F.R.J. Veroeven. 1974. *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Bhara.
- Mappangara, Suriadi. 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-1860)*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

- Mappangara, Suriadi. 2012. I Manneng Arung Data, Ratu Yang Menolak Kehadiran Belanda. Makalah pada Seminar Penggalan Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV, Watampone, 5 November 2012.
- Mattulada. 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Meinsma, J. J. 1873. *Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Bezittingen*. 's-Hage,- Joh. Ijkema, tweede afdeeling.
- Morris, D.F. van Braam. 1890. Nota van Toelichting op het Contract Gesloten met het Landschap Sawieto (Adjataparang) op den 30 Sten Oktober 1890, dalm *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde (TBG) Tahun 1893, Jilid XXXVI*.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- PaEni, Mukhlis. 1985. "Menanti Kembalinya Ratu Adil Orang Makassar", dalam *Akselerasi No. 2*.
- PaEni, Mukhlis, dkk. 1989. *Daeng Pabarang Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Pedalaman Bugis*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Universitas Hasanuddin.
- PaEni, Mukhlis, dkk. 1995. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Jakarta: Depdikbud.
- PaEni, Mukhlis, dkk. 2002. *Batara Gowa: Massianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perelaer, M.T. H. 1872. *De Bonische Expeditien Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860*. Leiden: Gualth. Kolff, eerste deel.

- Petta Nabba, Andi Palloge. 2006. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Makassar: Yayasan Al Muallim.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L., dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*. Makassar: Balitbangda Propinsi Sulaesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. 2005. *Sejarah Tanete, Dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru*. Pemda Barru: Laporan Penelitian.
- Poelinggomang, Edward L. 2012. I Manieng Arung Data, Srikandi Bone Abad XIX. Makalah pada Seminar Penggalan Nilai-Nilai Kepahlawanan We Maniratu Arung Data, yang diselenggarakan di Watampone pada tanggal 5 November 2012.
- Sagimun MD. 1976. *La Pawawoi Karaeng Segeri Raja Bone XXXI*. Jakarta: Depdikbud.
- Sagimun, MD. 1964. *Perang di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Panitia Museum Sejarah Nasional.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta; Ombak.
- Shahib, M. Roem. 1980. *Bone Kartu Mati Bagi Perjuangan Merah Putih di Sulawesi Selatan Pada Tahun 1945-1950*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Sillars, Harvey Barbara. 1974. *Tradition, Islam in Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*.
- Spengler, Johan Albert. *De Nederlandsche Oost Indische Bezittingen onder het Bestuur van den Gouvernment General G.A.G.P. Baron van der Capellen 1816-1825*. Utrecht: Kemink en Zoon, eerste gedeelte.

Standen, P.B. 1884. *Zuid-Celebes, Bijdragen tot de Krijgsgeschiedenis en Militaire Geographie van de Zuidelijke Landtong van het Eiland Celebes*. Utrecht: Kemink & Zoon.

Stuers, H. van de. 1854. De Expeditie Tegen Tanette en Soepa in 1824, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie (TNI)*, Volume 59.

Sumadi, Suryabrata. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Tidemen, J. 1908. "Batara Gowa op Zuid-Celebes", dalam *BKI*, No. 64.

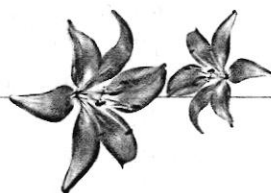
Tideman, J. 1935. "Het Landschap Bone", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde (TNAG)*, Bagian LII.

Vollenhoven, C. van. 1931. *The Adatrecht van Nederlandsch-Indie, Jilid I*. Leiden: E.J. Brill.

<http://jelajahi-imajinasiku.blogspot.com/2012/12/sejarah-bone-terbentuk-perkembangan-dan.html>. Diakses pada tanggal 26 September 2013.

<http://bugislaten.blogspot.com/2011/04/asal-usul-kerajaan-bone.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2013

Indeks



- A**
Abd. Razak Daeng Patunru 10, 54
ade' 20, 25, 27
Ade Pitu (Adat Tujuh) 128
Afdeling 29
Ajudan O.O. Passe 130
Albertus H. Wiese 69
Alitta 7, 83, 84, 85, 110, 111
Anakarung 41, 53
anak arung matase (putra mahkota) 56
anak pattola 41, 55, 56, 158
anumerta Matinroe ri Kessi 138
Arung Kajuara 52, 53, 141, 142
Arung Kayu 44
Arung Lempang 52
arung mangkau 27
arung matasa 41
Arung Palakka iv, ix, 18, 20, 25, 45, 52, 53, 59, 63, 70, 71, 75, 77, 81, 84, 95, 106, 142, 156, 168, 192
Awangpone 20, 33
- B**
Bajoe 31, 32, 79, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 140, 161
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar iv, v, xi, 13, 15, 52, 135, 166
Bantaeng 4, 7, 8, 31, 32, 63, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 86, 93, 114, 118, 119, 120, 121, 151, 159, 160, 161
Barebbo 20, 30
Barru 30, 56, 94, 99, 108, 134, 135, 136, 142, 154, 172, 190
Batara Gowa 47, 58, 59,

- 60, 64, 65, 89, 90, 91,
171, 173
Batara Gowa Amas Madinah
58, 59, 60
Batara Gowa I Sangkilang 47,
59, 65, 89, 90, 91
Bate Salapang 73, 78
Belgia 88
Besse Kajuara vii, 37, 62, 156
Bischoff 8, 160
Bosowa Sipilu 33
Bulo-Bulo 120
Bulukumba 4, 7, 8, 63, 67,
68, 71, 72, 74, 75, 77, 78,
79, 86, 93, 114, 119, 120,
159, 160, 161
Bulu Sepon 113
Bulu TarettaE 30
Bumi Arung Palakka 18
Bungaya viii, ix, xv, 5, 7,
38, 44, 45, 50, 64, 69,
70, 71, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 107, 108,
109, 111, 128, 130, 133,
135, 140, 145, 149, 150,
159, 160, 161, 187
Buton 6, 94, 97, 99, 148,
152, 153, 187
- C**
Camba 8, 101, 111,
119, 130, 160
Cambang 91
Cappaya ri Bungaya 5
Celebes 4, 29, 45, 65, 69,
104, 110, 112, 113, 114,
115, 117, 121, 143, 144,
145, 146, 148, 149, 150,
151, 153, 154, 166, 170,
171, 173
Cina vii, 20, 31, 62, 73, 79,
83, 92, 146
- D**
Daeng Magassing 151, 152
Daeng Tanisanga 7, 109
de onrust eiland 9
D.M Dalton 87
Dulung Awang Tangka 122,
123
- E**
Eropa 48, 63, 64, 67, 68, 70,
83, 87, 88, 91, 92, 134,
146
- F**
Fatimah Banri Arung
Timurung Matinroe ri
Bolampare'na vii, 63
Flores 72, 94
Ford Rotterdam 45
- G**
Gempa bumi 21
Godert Alexander Gerard
Philip van der Capellen 5
Gowa 4, 6, 21, 29, 41, 43,
45, 46, 47, 52, 56, 58, 59,
60, 64, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 76, 77, 78, 80,

81, 82, 84, 85, 86, 89, 90,
91, 94, 97, 98, 99, 106,
113, 114, 118, 119, 120,
123, 139, 140, 149, 151,
168, 171, 173, 191
Gubernemen Celebes 29

H

historical method 13
huzaar 110

I

Ince Jaya 152, 153
I Sangkilang 46, 47, 59, 60,
65, 66, 89, 90, 91
isteri (baine) 35

J

Jan David van Schelle 5, 90
Jan Willem Janssens 69
Jawa 12, 59, 68, 69, 84, 86,
87, 119, 129, 162, 185
J.J. Rochussen 145
Joan Hendrik Tobias 90
Johan Hendrik Tobias 5

K

Kajang 78, 121
Kalibone 85
kalompoang 46, 47, 66, 71,
73, 74, 76, 78
kalula 18, 20, 21
kapal angkut Syrena 111
kapal perang Eurydice 110
Kapten Laut Dieta 4
Kapten Le Clerg 113

Kapten Wood 83, 84, 85
Karaeng Data 90, 91
Karaeng Kajang 121
kawerrang 26
kerajaan pinjaman (leen
Vorstendon) 93, 94
kerajaan sekutu (Bondgenoot-
schappelijke Landen) 94
Kolonel Jan David van Schelle
5
Konfederasi Ajatapparang 94
Konfederasi Mandar 3, 6, 94,
191
Konfederasi Turatea 4, 94

L

La Baloso Toakkaottong
Ponggawa Bone 52
La Bataru 31
Labbakang 4, 7
Labbakkang 8, 64, 111, 112,
159, 160
La Fontaine 90, 91
La Galigo 20, 21
Lakipadada 89
La Maddukkelleng 64
La Mappaewa Arung Lompu
52, 108, 138
La Mappangara 102, 103,
133, 134, 135, 137, 138,
139, 141, 142, 143, 153,
155, 156
La Mappangara Arung Sinrie
133, 134, 135, 137, 139,
141, 143, 153, 155, 156

- La Mappapenning Daeng
Makkuling Arung Berru 51
- Lamuru 8, 29, 30, 32, 111,
160
- Landschap Swatantra 30
- La Parenrengi Arung Pugi
142, 143, 151, 152, 156
- La Patau 7, 52, 70, 83, 109
- La Patau Matanna Tikka
Matinroe' ri Nagauleng 52
- La Perenrengi Arung Pugi
155, 156
- La Temmassonge
Toappaweling 52
- La Tenritappu Toappaliweng
51, 52, 53, 55, 158, 166
- La Wawo 47
- Lelebbata 158
- Letkol Bischeff 4
- Letnan Gilliam 112
- Letnan Gubernur Jawa 84, 86
- Letnan Jackson 80, 84, 85
- Letnan Weits 113
- lombo 26
- lontara 14
- Lontarak Akkarungeng Bone
38, 51, 52, 54, 58, 166
- Lontarak Bilang (Catatan
Harian) 51
- Luwu 6, 33, 43, 90, 94, 96,
97, 144
- M**
- Makassar en
Onderhoorigheden 93
- Mallisujawa Arung Mampu
59, 60
- Maluku 65, 67, 68, 69, 93,
96, 189, 190
- Mangarabombang 79
- Mangkubumi 78, 102, 128,
129, 133, 139
- Mappatunru Karaeng Lembang
Parang 78
- mappolo bicara 27
- Maros 4, 7, 8, 29, 63, 64, 65,
71, 72, 74, 75, 77, 83, 84,
86, 93, 99, 100, 110, 111,
112, 113, 114, 119, 120,
130, 142, 155, 156, 159,
160, 161
- massangiang 23
- massangiang ridie 23
- Matajang 18, 21, 22, 25, 26,
41
- MatasilompoE 18, 25, 26, 27,
41
- matowa 18, 19, 22, 23, 24,
27, 28
- matowa anang 20, 27, 28
- Mayor Lo Bron 121
- M. Francis 6, 90, 96
- monarchi 25
- N**
- Napoleon Bonaparte 87
- Negara Indonesia Timur 2,
166
- Nooder Provincie 72, 79, 80
- Noorder Provincie 63, 68,
105, 106

O

Onderafdeling 29, 30, 32

P

pabbaju pute 21

Pabiring 31

Palakka iv, ix, 18, 20, 25, 26,
32, 45, 46, 52, 53, 59, 63,
70, 71, 75, 77, 81, 84, 95,
106, 142, 156, 168, 192

palili ix, 82, 100, 115, 136

pallapa barambang 91

Pallime 79, 129

pallontara 138

Panembahan Sumenep 117,
118

Pangeran Diponegoro 129,
162

Pangkajene 4, 7, 8, 29, 63,
64, 73, 74, 83, 90, 99,
111, 112, 113, 114, 159,
160

pariama 19, 28

passiajingeng 35

patrimonial 19

pelabuhan Bajoe 123, 125,
127, 140

Pelabuhan Parepare 47, 48,
75, 79

perahu kecil (pajala) 32

perahu palari 32

Perancis 67, 68, 69, 87, 88

Perjanjian Bungaya 5, 38, 45,
64, 70, 71, 93, 94, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103,
105, 107, 135, 149, 150

Perkampungan Bugis 76

pesse 57

Peter Theoderus Chasse 4, 87

prajurit Sepoy India 87

proklamasi 2

pulau keonaran 9

pulaweng 23

R

Rappang 7, 83, 84, 85, 110

Reijke 60

Richard Philips 69, 70, 71,
74, 79, 80, 81, 83, 86

ridie 23

S

Sailon 58, 59, 65

salassa 26

salenrang 23

Sangkara 85

Sangkilang 46, 47, 59, 60, 65,
66, 89, 90, 91

Sawitto 7, 83, 84, 85, 110,
111, 190

Segeri 4, 64, 83, 111, 114,
159, 172

siajing 35

sianre bale tauwwe 19

Sidenreng vii, 4, 6, 7, 37,
47, 62, 70, 74, 77, 80, 81,
82, 84, 86, 90, 96, 97, 99,
109, 110, 139, 151, 154,
187

Singapura 92, 145, 146, 151

Singkeru Rukka 141, 142,
143, 153, 154, 155, 156

- Sinjai 4, 7, 35, 63, 120, 121, 122, 123, 124, 153, 159, 161, 189
- siri` 57
- Siwa 79
- Soekarno 2
- Soppeng 4, 6, 29, 30, 32, 33, 43, 52, 56, 70, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 97, 139, 143, 165, 190
- stelsel monopoli 146
- suami (lakkai) 35
- Sudanga 46, 60, 89
- Sultan Abdul Rauf 90
- Sultana Saleha Rabiattuddin 55, 102, 126
- Sultan Zainuddin 59, 60, 78
- Sumatera 69, 93
- Sumbawa 94
- Sungai Walanae 31, 32
- Suppa 3, 4, 6, 7, 8, 70, 74, 75, 80, 83, 84, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 151, 160, 189
- Sure 20
- Syekh Yusuf 52
- T**
- Tallo 76, 78, 80, 86, 94, 99, 119, 152
- Tanah Bone 18, 22, 58, 108, 128, 134, 138, 162, 172
- TawaroE 32
- teddung 23
- Tellumpoccoe 81
- Teluk Bone 29, 61, 72, 79, 81, 82, 123, 152
- Temmasongeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin 59
- Tenete 3, 109, 168
- teokrasi 25
- Thomas Stamford Raffles 84, 86
- Tobias 5, 6, 90, 95, 96, 101, 116
- Tomanurung 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 192
- Tomanurung ri Matajang 18, 26
- Tomarilalang 102, 103, 135, 137
- tomarilaleng 136, 137, 139, 141
- Tomarilaleng La Mappangara Arung Sinrie 133, 134, 135, 139, 141, 143, 156
- Toraja 94
- U**
- Ujung Palette 31
- Ujung Pandang 7, 18, 38, 45, 56, 63, 84, 98, 108, 113, 168, 169, 170, 171, 172, 183, 187, 189
- Ujung Pattiro 31
- ulu anang 18
- V**
- Valkenburg 112
- Van der Capellen 5, 6, 7, 99, 108, 160

van Geen 8, 101, 123, 128,
160
van Schalle 8, 160

W

Wajo 6, 29, 32, 33, 43, 79,
81, 82, 83, 86, 90, 94, 96,
127, 128, 144, 151
Wanua 18, 19, 22, 26, 28
Watampone 9, 10, 20, 51,
53, 55, 57, 62, 63, 112,
125, 126, 127, 128, 131,
133, 158, 161, 162, 167,
169, 170, 171, 172

We Hamidah Arung Takalarak
51, 52

We Mommo Sitti Aisyah 52

We Padauleng 51, 52, 53,
158

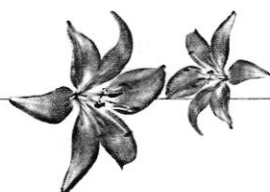
We Sundari Datu Baringeng
52

We Tenripada Arung Tim-
urung 51

Z

Zuider Propvincie 105

Lampiran



PEMBAHARUAN KONTRAK BUNGAYA (Verniewd Bongaijasch Kontract)

Pasal 1

Akan selalu berlangsung perdamaian. Persahabatan, persekutuan antara pemerintah Belanda dan raja-raja Sulawesi yang telah disebutkan

Pasal 2

Pemerintah (Hindia Belanda) adalah pemimpin utama dari persekutuan, dan perantara dan pelindung dari persekutuan itu

Pasal 3

Mutlak tidak akan ada yang superioritas diantara sekutu-sekutu lainnya tetapi sekutu- sekutu itu dinyatakan sebagai penguasa yang merdeka dan berdaulat, tidak ada perbedaan diantara sekutu-sekutu itu, kecuali penyebutan saudara tua dan saudara muda.

Pasal 4

Raja-raja dari Bone dan Makassar dipandang sebagai anggota tertua dari persekutuan ini.

Pasal 5

Sahabat dari Pemerintah (Hindia Belanda) menjadi sahabat dari kerajaan-kerajaan sekutu, dan musuh dari pemerintah juga dipandang menjadi musuh kerajaan-kerajaan sekutu, yang mana mereka sepakat mengerahkan rakyat dan senjata untuk menentanginya.

Pasal 6

Anggota dari kerajaan-kerajaan sekutu saling menjamin daerah kekuasaannya masing-masing, yang dalam waktu yang singkat akan menetapkan secara tepat dan berlandas pada kesepakatan luas dan batas-batas wilayah kekuasaannya masing-masing.

Pasal 7

Semua perselisihan antara kerajaan-kerajaan sekutu harus diputuskan kerajaan-kerajaan sekutu, yang akan berkedudukan di Ujung Pandang. Dewan ini dipimpin oleh Gubernur dan sejumlah raja-raja dari kerajaan sekutu atau memperoleh kuasa penuh, seperi tiap raja akan dipilih, yang dikirim untuk penyelesaian perselisihan

Pasal 8

Penyelesaian menyangkut semua perselisihan kecil, baik tentang perdagangan maupun yang lainnya, setiap kerajaan sekutu akan menempatkan seorang wakil yang medapat kuasa penuh secara permanen di Ujung pandang.

Pasal 9

Raja-raja kerajaan sekutu menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan saling berperang, tetapi mengajukan perselisihan mereka kepada dewan kerajaan sekutu dan mematuhi keputusan dari (dewan) kerajaan sekutu, sanksi hukuman yang ditangani dengan cara lain dipandang sebagai musuh oleh persekutuan kerajaan sekutu.

Pasal 10

Untuk membendung hasrat membunuh dan untuk melakukan pembalasan dendam sendiri yang masih umum terjadi diantara penduduk Sulawesi, maka pada kesempatan ini dinyatakan dengan hikmat, dan oleh setiap penguasa kerajaan-kerajaan sekutu dinyatakan sebagai suatu hukum yang berlaku dalam negerinya, bahwa tidak akan dilakukan lagi pembunuhan atau penganiyayaan yang berakibat kematian ditebus dengan denda berupa uang, dan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan seperti itu, tanpa membedakan orang, semua orang termasuk keluarga kerajaan, sesuai dengan hukum-hukum dari Al Quran, akan dihukum berat, tidak boleh ada orang yang melakukan pembunuhan, baik atas perintah dari raja maupun para Dewan Kerajaannya.

Pasal 11

Juga raja-raja berjanji akan menghapuskan semua jenis hukuman yang menghilangkan salah satu anggota badan di kerajaan mereka masing-masing, yang hanya merugikan penduduk dan akan memperbanyak kemiskinan.

Pasal 12

Untuk semua perselisihan yang terjadi tentang hukuman terhadap penjahat dengan tegas dinyatakan bahwa setiap penjahat akan dihukum menurut peraturan hukum pada negeri itu dan di negeri di mana ia melakukan kejahatan, tetapi harus dengan sepengetahuan dari penguasa yang syah dari pelaku kejahatan itu. Orang-orang Kristen hanya akan dikenakan hukuman oleh orang Kristen.

Pasal 13

Pada akhirnya untuk memperbaiki kondisi kemiskinan yang menyedihkan dan menyengsarakan penduduk Sulawesi, raja-raja dari kerajaan-kerajaan sekutu berjanji akan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mendorong rakyatnya meningkatkan usaha pertanian dan terutama mengusahakan semua produksi pertanian untuk perdagangan. pemerintah (Hindia Belanda) berjanji sedapat mungkin, dalam hal ini, memberikan dukungan kepada semua perusahaan petani.

Pasal 14

Penduduk dari kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri yang berada dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan sekutu diperbolehkan untuk melakukan pelayaran perdagangan ke mana saja dengan syarat membawa surat izin berlayar dari pemerintah Belanda di Sulawesi dan mentaati semua peraturan menyangkut pajak impor dan ekspor dalam pelayaran dan perdagangan yang akan diterapkan oleh pemerintah (Hindia Belanda).

Pasal 15

Untuk pengawasan lebih lanjut dari ketentuan dalam dua pasal terdahulu itu dan untuk memudahkan pedagang-pedagang, Governemen akan memiliki hak, yang berupa semacam persetujuan atas perundingan dengan raja-raja, mendirikan suatu bangunan yang permanen, yang mana raja-raja berjanji akan memberikan bantuan dengan menyerahkan material dan tenaga kerja dengan pembayaran imbalan yang pantas.

Pasal 16

Pada akhirnya persahabatan antara kerajaan-kerajaan sekutu dengan Governemen dijalin lebih kuat, raja-raja menyatakan tidak akan mengirim duta ke atau menerima duta dari negara-negara asing, juga tidak melakukan korespondensi dengan penduduk negara asing tanpa sepengetahuan Governemen.

Pasal 17

Semua mata uang emas dan perak dan tembaga yang berlaku di Jawa akan berlaku juga di seluruh pesisir Sulawesi.

Pasal 18

Untuk menghindari terjadinya perselisihan-perselisihan dan peristiwa-peristiwa berdarah yang sering kali terjadi ketika kematian seorang raja seperti ditetapkan sebagai suatu hukum yang pasti dan telah berlangsung berabad-abad, maka ketika setiap raja yang memerintah masih hidup, menurut tradisi dan kebiasaan dari setiap kerajaan, akan mengangkat seorang (calon) pengganti untuk menggantikan raja sesudah kematiannya. Pengganti itu akan menikmati tanda penghargaan dengan kedudukan raja muda atau seperti di tempat lain dengan kedudukan sebagai putera mahkota. Pemilihan seorang pengganti akan dengan segera diberitahukan kepada Pemerintah (Hindia Belanda, pen.) dan semua anggota dari persekutuan. Apabila terdapat beberapa alasan yang mendasar, mengapa orang yang ditetapkan menjadi pengganti di salah satu kerajaan tidak mendapat persetujuan dari anggota persekutuan maka pemerintah dari kerajaan itu berkewajiban untuk mentaati pendapat Pemerintah dan anggota persekutuan.

Pasal 19

Tidak seorang pun dalam persekutuan ini, sesudah kontrak ini akan diputuskan akan diperkenankan membatalkan persetujuan dari Dewan persekutuan itu.

Pasal 20

Pemerintah (Hindia Belanda, pen.) akan membuat kontrak secara terpisah dengan setiap kerajaan dari persekutuan ini tentang butir-butir itu sepanjang hanya memiliki kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan.

Pasal 21

Selanjutnya raja-raja yang disatukan ini berjanji akan menunaikan

secara religius Kontrak perdamaian, persahabatan, dan persekutuan ini, selanjutnya mereka berjanji akan bersama-sama memandang kerajaan yang menentang sebagai musuh dan akan membantu menghukumnya. Akhirnya mereka saling berjanji, dan terutama juga kepada Pemerintah (Hindia Belanda, pen.) akan memberikan bantuan dan dukungan penuh apabila hal itu dituntut.

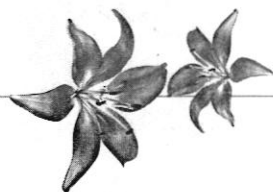
Pasal 22

Semua pasal dan syarat-syarat yang dibuat dan diputuskan demi perdamaian, persahabatan, dan persekutuan yang abadi antara Pemerintah dari paduka tuan yang mulia raja Belanda dengan raja-raja dari kerajaan besar Makassar, Sidenreng, Tanete, Buton, Sanrabone, Binamu, dan Laikang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kerajaan-kerajaan mereka, anak-anak mereka, dan kerurunan mereka kemudian juga untuk raja-raja yang lain, apabila setelah ini akan diminta untuk bergabung dalam persekutuan ini, dengan itu (Bone, pen), dikenakan syarat-syarat yang tegas, bahwa apabila raja Bone, dalam dua bulan setelah kontrak ini diputuskan, tidak akan bergabung secara sukarela sendiri dalam persekutuan ini, maka akan kehilangan hak sebagai sekutu tertua untuk selama-lamanya.

Catatan:

- Naskah pembaruan Kontrak Bungaya dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan diambil dari buku, Sartono Kartodirdjo, dkk, *Ikhtisar Keadanr Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta. ANRI: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5, hal. 294-797.
- Kontrak ini diputuskan di Benteng Jungpandang (Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam) pada 27 Agustus 1824.

Tentang Penulis



BAHTIAR, lahir di Kendari 5 November 1964. Menamatkan SD sampai SMA di Ujung Pandang. S1 pada Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. Menjadi staf peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon (1998-2000), Staf peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar (2000 – sekarang).

Karya tulis ilmiah yang pernah ditulis adalah Gerakan Saparatis Republik Maluku Selatan (RMS) (2002), Peranan LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Sulawesi Selatan (2005), Perlawanan Sinjai Terhadap Kolonial Belanda (1856-1858) (2006), Persekutuan Tellu Limpoe (2007), Peristiwa Andi Aziz 1950 (2008), Sejarah Kedatangan Orang Melayu di Sulawesi Selatan (2009) Sejarah Kerajaan Laiwui di Sulawesi Tenggara (2010), Suppa, Salah Satu Pusat Perlawanan di Sulawesi Selatan (1945-1950) (2011), Persekutuan Tellu Bocco di Mandar (2012), TRIPS Dalam Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Di Sulawesi Selatan (2014), Hubungan Antar Kerajaan: Bone dan Mandar (2014).



MUHAMMAD AMIR dilahirkan di Darampa (Bone), Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (1977) dan SMP (1981) di ArasoE, dan SMA di Mare pada 1984. Sarjana Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1990), dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin

– Program Studi Antropologi – Konsekrasi Ilmu Sejarah (2011). Lulus Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan Tingkat Dasar (2001) dan Tingkat Lanjutan (2003). Menjadi tenaga honorer pada Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan (1990-1995), dan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) Bidang Kebudayaan di Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru (1996-1997). Staf peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Ambon (1998-2000), dan BKSNT Makassar (2000 hingga sekarang). Sejak tahun 1990 telah aktif dalam penelitian dan penulisan tentang aspek kesejarahan. Karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku baik tim maupun mandiri, antara lain; Biografi Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo (1990), Biografi Pahlawan Opu Daeng Risaju (1991), Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (1993), Biografi Pahlawan Lanto Daeng Pasewang (1994), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan I (1995), Biografi Pahlawan La Sinrang, Bakkalolona Sawitto (1996), Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (2002), Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905 (2003), Kerajaan Gowa Pada Abad XIX (2004), Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 ((2005), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan Jilid 2 (2005), Sejarah Polewali Mandar (2006), Biografi Pahlawan I Makkulau Sultan Husain (2007), Andi Abdullah Bau Massepe: Profil Patriot yang Konsekuen Hingga Tetesan Darah

Terakhir (2008), Pahlawan Nasional Dari Sulawesi Selatan (2009), Kelaskaran di Mandar – Sulawesi Barat: Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (2010), Tiga Srikandi Dari Mandar-Sulawesi Barat (2011), Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Barat (2011), Membela Republik Indonesia: Kajian Sejarah Perjuangan Kelaskaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (2012), Konflik dan Perubahan Sosial: Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan (2012), Perlawanan Rakyat Ajatappareng; Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1905-1906 (2013), Gerakan Maraqlia Tokape di Mandar-Sulawesi Barat Pada 1870-1873 (2014), dan Perjuangan Hammad Saleh Menentang Jepang dan Belanda di Mandar 1942-1947 (2014).



ROSDIANA HAFID lahir di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) diselesaikan di Makassar. Srata 1 (S1) diraih pada Universitas 17 Agustus 1945 Makassar Jurusan Administrasi Negara. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai staf administrasi pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT)

yang kemudian berubah nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT), selanjutnya berubah menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) sampai sekarang. Mulai menjadi peneliti BPNB pada tahun 2012. Karya Tulis Ilmiah yang telah ditulis adalah Toponimi Daerah Pinrang (2012), Toponimi Daerah Majene (2014), *Tomanurung: Pendiri Kerajaan Bone* (Jurnal *Walasuji*, 2011), Pemberontakan Lapakokoe Arung Timurung dan Lasuni Karaeng Massepe Terhadap Arung Palakka (Jurnal *Walasuji*, 2014).



WE MANIRATU ARUNG DATA

*Srikandi Dalam Perjuangan
Melawan Belanda*

We Maniratu Arung Data adalah Raja Bone ke-25 (1823–1835). Ketika La Mappasessu Toappatunru menjadi raja Bone pada 1812, We Maniratu Arung Data diberi amanah untuk menjadi panglima (pongawa) laskar wanita. Setelah La Mappasessu wafat, We Maniratu Arung Data diangkat menjadi raja Bone pada 1823.

Konflik antara Bone dengan Belanda kembali bergolak setelah Belanda mulai melakukan penataan pemerintahan pasca kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan pada 1816. Kerajaan Bone menolak dan menentang kembalinya Belanda di daerah ini. Sebab selain mengancam eksistensi Kerajaan Bone, juga mengancam pengaruh dan kekuasaannya atas sejumlah wilayah yang diduduki. Bahkan tidak sedikit kerajaan di daerah ini yang menyandarkan kewibawaan dan kekuatannya pada Bone.

Konflik semakin meruncing ketika Belanda mengundang raja Bone, untuk membicarakan pembaharuan Kontrak Bungaya, dan itu ditolak raja Bone. Akhirnya terjadi perang antara Kerajaan Bone dengan Kolonial Belanda. Pertarungan yang seru kekuatan senjata dua belah pihak digambarkan dalam buku ini. Sikap dan pendirian Raja Bone We Maniratu Arung Data yang menolak kembalinya Belanda itu tetap ditunjukkan sampai ia wafat pada 1835.

ISBN:978-979-3570-80-8



PUSTAKA
REFLEKSI

Andi
Wahana
PUSAT BACA

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172
Email : refleksibooks@yahoo.co.id